

Edisi 6 | Tahun 2 | Juni - Agustus 2009

Jurnal

Sosial Demokrasi



Representasi Politik Perempuan:

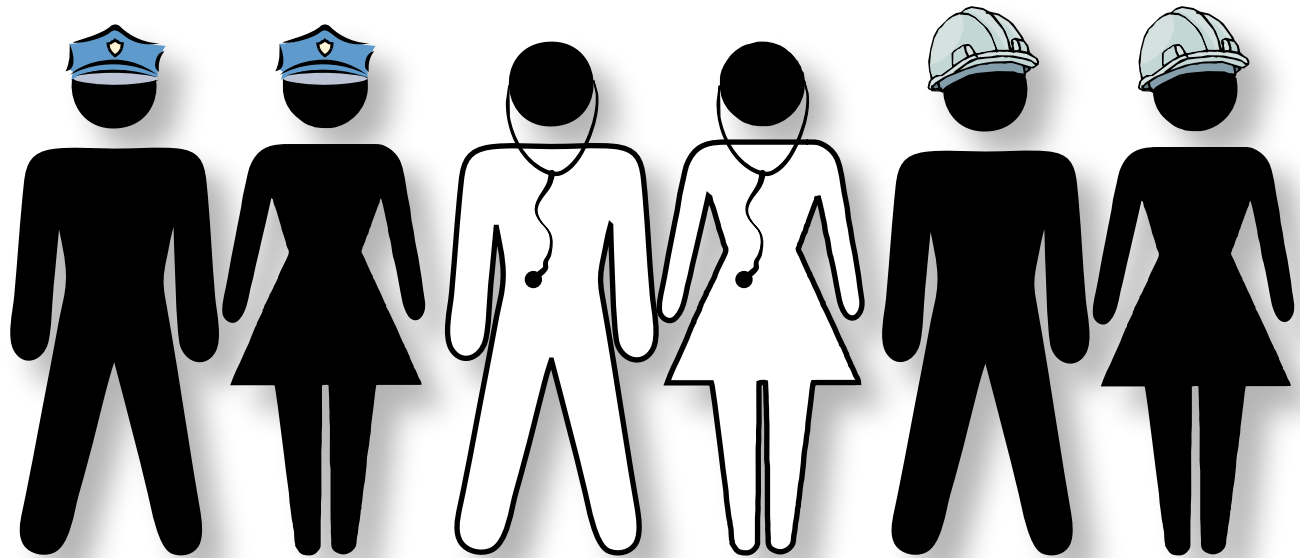
Sekadar Ada

atau

Pemberi Warna

ISSN 2085-6415





Hak kita **sama**
Pekerjaan kita **sama**
Upah kita seharusnya juga **sama!**

Jurnal

Sosial Demokrasi

Daftar Isi

Pengantar Redaksi
Representasi Politik Perempuan: Sekadar Warna, Atau Turut Mewarnai? 4

Laporan Utama
**TRANSKRIP DISKUSI
REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN: SEKADAR
WARNA ATAU TURUT MEWARNAI?** 12

Laporan Utama
**RESUME DISKUSI
REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN: SEKADAR
WARNA ATAU TURUT MEWARNAI?** 40

Artikel
**Meningkatnya Keterwakilan Perempuan dalam Politik:
Kesempatan yang Lebih Baik bagi Kesetaraan? Hasil
Pemilu Legislatif di Indonesia, Melanie Mörmel, Erwin
Schweisshelm, FES Jakarta, Juni 2009** 46

Artikel
**Perempuan dalam Pemilu 2009: refleksi kritis, Arie
Sujito** 52

Artikel
**Menuju Representasi Politik Perempuan yang lebih
Bermakna, Nur Imam Subono** 56

Profil Organisasi
HAPSARI Himpunan Serikat Perempuan Indonesia 62

Serial Sejarah Sosdem
JALAN KETIGA, BUKAN SEKEDAR JALAN TENGAH 64

Serial Sejarah Sosdem
PERBEDAAN KOMUNIS DENGAN SOSDEM 71

Resensi
Potret Buram Perdagangan Manusia di Indonesia 74

Dewan Redaksi

Ketua : Amir Effendi Siregar
Wakil Ketua : Ivan Hadar
Anggota : Faisal Basri
Mian Manurung
Nur Iman Subono
Arie Sujito

Pelaksana Redaksi

Koordinator : Azman Fajar
Redaksi : Puji Riyanto
Launa

Alamat Redaksi

Jl. Kemang Selatan II No.2A
Jakarta 12730
Telp. 021 -719 3711 (hunting)
Fax. 021 - 7179 1358

Jl. Mampang Prapatan XIX No.34
Mampang - Jakarta Selatan
Telp/Fax. 021 - 798 4559

Ilustrasi*

Kuss Indarto
Friedrich-Ebert-Stiftung

Penerbit

Pergerakan Indonesia dan Komite
Persiapan Yayasan Indonesia Kita

ISSN: 1978-9084

*) Dilarang mengcopy dan memperbanyak
ilustrasi tanpa seijin Friedrich-Ebert-Stif-
tung



Representasi Politik Perempuan: Sekadar Warna, Atau Turut Mewarnai?

HIRUK pikuk pesta demokrasi lima tahunan, utamanya dalam menyambut pemilu legislatif 9 April lalu, setidaknya disesaki oleh maraknya wacana keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia. Praktis, selama lebih dari tiga dasawarsa, publik politik nasional terus menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap kontruksi budaya dan relasi sosial-politik pasca reformasi yang masih bias jender, dan terindikasi menyimpan potensi untuk tetap memarjinalisasi dan mendominasi perempuan. Gugatan kaum perempuan ini sejalan dengan kian menguatnya isu keadilan dan kesetaraan jender yang makin mendapat tempat dalam wacana politik masyarakat dan ruang-ruang kebijakan negara.

Meski negara kini relatif akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum), namun harus disadari bahwa ruang ekspresi politik perempuan yang diberikan negara (dan para elite partai) masih jauh dari spirit keadilan dan kesetaraan. Kendati penetapan kuota 30 persen melalui akomodasi negara sudah di uji-coba sejak pemilu 2004 lalu, namun ditilik dari aspek sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan di parlemen, faktual masih berlangsung secara fluktuatif. Catatan representasi politik perempuan menunjukkan angka naik turun dari waktu ke waktu terkait keterlibatan perempuan dalam arena politik praktis, khususnya di lembaga legislatif. Anggota DPR Sementara 1950–1955 misalnya, berhasil mengakomodasi 9



Women Political Representation: Just a Colour or Gives Colour?

The five years feast of democracy, especially the last legislative general election on 9 April, at least is crowded with the discourse of woman political representation on Indonesian electoral political stage. At least during more than three decades, national political public keeps witnessing women intense criticism on the still gender biased- construction and social political relations after reform era and the strong indication of marginalization potential, even suppression on the women political rights. This women criticism is in line with the more strengthened issue of justice and gender equality that gets acknowledged more in the political discourse within society and public policies.

Even the state now is relatively accommodative to the discourse and claims of women political representation (as stated in the Law No. 2 Year 2008 on Political Party and Law No. 10 Year 2008 on General Election), yet the space for women political expression given by the state (and party elites) is still too far away from spirits of justice and equality. Even though the 30 percent quota establishment through state accommodation has been an experiment since 2004 general election, women political representation in the parliament from historical aspect is in fact still fluctuatively ongoing. Data on women political representation shows that the number goes up and down from time to time in accordance to the women engagements in practical political arena, especially within the legislative institution. Temporary Legislative Members (DPRS) 1950-1955 for instance, were successful in accommodating 9 seats for women (3.8%) from 236 legislative members at that time. The result of general election 1955-1960 showed increasing number to 17 seats (6.3%) from 272 elected parliament members.

Women representation in the parliament also quantitatively went up and down during the Constituent Assembly era (1956-1959) to 25 seats (5.1%) from 488 seats of Constituent Assembly members. During New Order era, women political representation in parliament also experienced up and down. The first New Order general election (1971-1977) succeeded to give 36 seats to women (7.8%), general election 1977 resulted 29 seats (6.3%), and 39 seats (8.5%) from 460 elected parliament members during those three election periods. Furthermore, general election 1987 gave 65 seats for women (13%) from 500 parliament seats, and from there kept decreasing during election 1992-1997, 1997-1999, and 1999-2004 by 62 seats (12.5%), 54 seats (10.8%), and 46 seats for women (9%) from each 500 seats achieved by respective parliament members at each period. The general election 2004 was successful to increase the number of women legislative members to 63 persons (11.45%)



Illustrasi: Kus Indarto © Friedrich-Bauer-Stiftung

kursi (3,8%) dari 236 kursi anggota legislatif terpilih saat itu. Jumlah keterwakilan perempuan hasil Pemilu 1955–1960 naik menjadi 17 kursi (6,3%) dari 272 anggota parlemen terpilih.

Representasi perempuan di parlemen secara kuantitatif kembali naik turun. Di era Konstituante (1956-1959) peroleh kursi legislatif perempuan turun menjadi 25 kursi (5,1%) dari 488 kursi anggota Konstituante. Bagitu pun di era Orde Baru, keterwakilan politik perempuan di parlemen juga mengalami pasang-surut. Pemilu pertama Orde Baru (1971–1977) berhasil menempatkan perempuan pada 36 kursi parlemen (7,8%), Pemilu 1977 29 kursi (6,3%), dan Pemilu 1982 39 kursi (8,5%) dari 460 anggota DPR terpilih pada tiga periode Pemilu tersebut. Selanjutnya, Pemilu 1987 berhasil menempatkan perempuan pada 65 kursi (13%) dari 500 kursi DPR, dan terus mengalami penurunan pada Pemilu 1992-1997, 1997–1999, dan 1999–2004 menjadi 62 kursi (12,5%), 54 kursi (10,8%), dan 46 kursi (9%) dari masing-masing 500 kursi yang berhasil di raih anggota DPR dari masing-masing periode pemilu tersebut. Berikutnya, Pemilu 2004 kembali menaikkan jumlah anggota legislatif perempuan menjadi 63 orang (11,45%) dari 550 anggota DPR terpilih, dan Pemilu 2009 berhasil menempatkan 99 anggota legislatif perempuan (17,68%) dari 560 calon anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2009.

Bagi Nur Iman Subono, representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah jender (*gender democracy*). Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih asyik dengan “narasi-narasi politik besar”, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30 persen representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama. Setidaknya, dalam satu dekade ini, kita menyaksikan sebuah geliat kuat dari hampir seluruh organ dan elemen perjuangan perempuan—baik dari kalangan politisi, aktivis LSM, ormas, akademisi, jurnalis perempuan, bahkan para artis dan selebritis—yang mengarahkan hampir seluruh energi politiknya ke satu titik: mengupayakan representasi politik perempuan yang lebih proporsional, adil, dan setara. Tak berlebihan, jika banyak pengamat dan aktivis mengatakan, wacana representasi politik perempuan kian nyaring dan menggema sejalan dengan bergulirnya era liberalisasi politik hasil reformasi politik 1998.

Sebab, semasa Orde Baru, wacana representasi politik perempuan dalam narasi besar demokratisasi—dus implementasi hak asasi manusia, hak sipil dan politik, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya perempuan—hampir tak mendapat tempat untuk besemai. Wacana representasi politik perempuan dalam kerangka demokratisasi, praktis tenggelam dalam gerusan narasi besar developmentalisme, sebuah program pembangunan yang pragmatis dan represif yang bersumber dari ideologi pertumbuhan dan pengendalian stabilitas politik ketat, yang demikian intens digenjut oleh rezim Soeharto ketika itu. Padahal, jika kita menyimak dengan seksama catatan sejarah perjalanan politik perempuan negeri ini, secara kualitatif, nilai dan semangat perjuangan perempuan Indonesia di masa awal revolusi terlihat lebih substantif dan membumi,

from 550 elected parliament members, and in 2009, 99 women from 560 parliament members (17.68%) were elected.

According to Nur Iman Subono, women political representation is an important element to place Indonesian concept of democracy into gender democratic perspective. Differs from man politicians who are fond of “big political narrations”, women activists are more focus and consistent to fight for the 30% quota of women political representation as a collective fighting agenda. At least within this decade, we have been witnessing a strong struggle from almost all organs and elements of women struggle – either from politicians, NGO activists, academicians, women journalists, or actresses and celebrities – which directs almost whole political energies to one point: attempt to fight for more proportional, just, and equal women political representation. It is not too much if many observers and activists say that women political representation discourse gets louder and stronger in accordance to the political liberalism era as the result of political reform in 1998.

During the New Order era, women political representation discourse within the whole democratization narration – implementation of human rights, civil and political rights, including economic, social, and women cultural rights – almost could not raise. This discourse within democracy framework practically sank in the big narration of developmentalism, a pragmatic and repressive development program which resource comes from development ideology and tight control on political stability that was intensely forced by Soeharto regime. Whereas, if we assess in detail the historical documentation of women political journey in this country qualitatively, the value and spirit of Indonesian women’s struggle in the past at the beginning of revolution were more substantive and down to earth; not artificial as seen in the contemporary Indonesian political discourse. Women’s spirits at the movement era were not only strong in sounding their rights, but also in fighting directly at the battlefield to defend proclaimed country.

History noted that two months after the Youth Oath was declared on 22nd December 1928 to be exact, almost 30 women organizations from 12 cities in Java and Sumatra gathered to hold the first congress in Yogyakarta. One of the main agenda of the congress was to unite various existing women organizations at that time into a federation without differentiating the political background, ethnic, social status, and religion. Nowadays, along with the time, women’s roles,

tidak artifisial seperti terekam dalam wacana politik Indonesia kontemporer. Spirit perempuan era pergerakan tidak cuma gigih dalam menyuarkan hak-hak politiknya, namun kaum perempuan juga berani turun ke medan perang untuk mempertahankan kedaulatan negara Proklamasi.

Lebih ke belakang, sejarah juga mencatat, dua bulan setelah Sumpah Pemuda dideklarasikan, persisnya pada tanggal 22 Desember 1928, sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera berkumpul untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. Salah satu agenda pokok kongres adalah meleburkan berbagai organisasi perempuan yang ada saat itu ke dalam sebuah federasi, tanpa melihat latar belakang politik, suku, status sosial, dan agama. Kini, seiring dengan perjalanan waktu, peran, posisi, dan aktualisasi perempuan dalam kancah kehidupan sosial-politik kian menyusut. Di era Demokrasi Terpimpin, peran sosial-politik perempuan cenderung terfragmentasi sebagai konsekuensi dinamika politik saat itu yang cenderung konfliktual. Kendati posisi politik perempuan saat itu relatif kuat, dalam praktiknya mereka tetap berada pada posisi subordinat dan kerap digunakan sebagai instrumen politik negara.

Di era Orde Baru, kendati pemerintah Soeharto memiliki *political will* membentuk kementerian yang khusus menangani masalah perempuan, akan tetapi orientasi politik negara korporatik yang menyuburkan pola politik *patron-client* dan kultur hegemoni "politik lelaki" tetap saja menjadi struktur atas dari bangunan budaya politik rezim ini. Perempuan diperbolehkan melakukan peran sosial-politiknya, akan tetapi sebatas fungsi normatifnya, di bawah kendali ketat negara korporatik. Memasuki era reformasi, para Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (terutama di era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa), secara gigih terus mengangkat isu kesetaraan jender sebagai *mainstream*. Namun, kerja keras para menteri perempuan, para aktivis, dan berbagai organisasi perempuan di Tanah Air untuk mewujudkan persamaan hak terus saja terbentur oleh kultur patriarki dan praktik politik anti partisipasi.

Salah satu penyebab penting yang mendasari, dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial-budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Legitimasi (dan dominasi) ini terlihat dari sikap masyarakat yang kian menempatkan seksualitas perempuan sebagai komoditas; alat pemuas hasrat seksual laki-laki. Dalam kekuasaan berstruktur patriarkis, politik bukan cuma refleksi dari interest kekuasaan dan uang, tapi juga seks. Terbongkarnya kasus mesum politisi DPR dengan artis dangdut beberapa waktu lalu membuktikan kebenaran hipotesis menyatunya "kekuasaan, uang, dan seks". Kuasa politik bukan cuma membuat para aktornya menjadi banal (politik haus kuasa), tapi juga binal (bukan cuma haus uang dan kuasa, tapi juga sarat syahwat).

Pesan penting dari terbongkarnya kasus mesum politisi DPR di atas, kemerosotan moral politik di level elite bukan hanya ditandai oleh *banality of politics*, tapi juga oleh binalitas manusia yang kian menunjukkan watak dasarnya sebagai *homo sexus*. Lebih dari itu, mesum DPR kian memperkuat argumen bahwa posisi perempuan

positions, and actualizations in social and political life get smaller. In New Order era, women's social and political roles had the tendency to be fragmented as the consequence of the multiparty system, which tended to be confliction. Although the women political position at that time was relatively strong, in practice they were in subordinate position and often misused as political bargaining tools.

In the New Order era, although Soeharto government had the political will to form ministry that particularly dealt with women issues, yet the state's corporatism political orientation enabled pattern of political patron client to grow well and "men in politic" hegemony culture kept becoming top structure from the cultural building of politics of this regime. Women were allowed to conduct their social-political roles, but limited to the normative function under strong control of corporatism state. Entering reform era, the Women Empowerment State Ministers (especially at the leadership era of Khofifah Indar Parawansa), strongly fight for the gender equality issue as mainstream. Yet, the hard work of these women ministers, activists, and various women organizations in the nation to materialize equal rights keeps facing obstacles from the patriarchal culture and anti-participation political practice.

Within the patriarchal society, construction of women social culture keeps being used as the tools of power legitimating. This legitimating and domination can be seen from attitude of the society that often put women sexuality as commodity; tools to fulfill men's sexual passion. In the patriarchal power structure, politics is not only reflection of power interest and money, but also sex. The exposed case of parliament politician with a dangdut actress shows the correct hypothesis of unified "power, money, and sex". Political power not only made the actors becomes power thirst, but also sex passion thirst.

Important message from the abovementioned exposed case of the parliament politician states that the degradation of political moral at the elites level is not only signalized by the power thirst, but also sex passion thirst that shows the basic characteristic of human as homo sexus. Moreover, that case strengthens the argument that women position in this country is still under strong domination of patriarchal political culture. The feminists who believe in democratic-pluralist ideology ensure that women must not be disadvantaged only because of the sex. As human, women also need acknowledgement of their existence. The feminist movements are against the stereotype perspective that has potential to marginalize women's roles with limitation

di negeri ini masih berada di bawah kekokohan dominasi budaya politik patriarki. Kaum feminis yang menganut paham pluralisme-demokratis meyakini bahwa perempuan tidak bisa dirugikan hanya karena jenis kelaminnya. Sebagai Manusia, perempuan juga butuh pengakuan atas eksistensi keperempuanannya. Gerakan feminis menentang pandangan stereotif yang berpotensi memarginalisasi peran perempuan sebatas fungsi domestiknya, bukan dalam konteks kehidupan publik yang lebih luas.

Bagi Julia Suryakusuma (2004), kendati sistem dan arah kebijakan politik pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif jender, namun posisi perempuan dalam konteks kekuasaan politik di Indonesia tetap saja rentan dari berbagai bentuk manipulasi politik dan tak jarang dipakai sebagai alat legitimasi politik. Asumsinya sederhana: perempuan adalah unit dasar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, kontrol atas peran perempuan merupakan instrumen efektif dalam mengendalikan seluruh operasi kekuasaan negara. Sementara bagi Fatimah Muhibbi (2005), feminis muslim Iran, perbedaan fisik perempuan dan laki-laki merupakan fakta yang tak bisa ditolak (*sunatullah*). Namun, jika perbedaan itu dibingkai dalam konstruksi budaya yang bias jender (apalagi jika ia dibingkai dalam ayat-ayat agama) maka definisi persamaan hak atas dasar klaim perbedaan alamiah itu akan kembali berujung pada ekspresi dan dominasi politik patriarki, yang secara substantif bertentangan dengan hukum Tuhan dan prinsip keadilan universal.

Berbagai regulasi negara menyangkut isu perempuan membuktikan bahwa konstruksi budaya politik patriarki sepanjang sejarah amat menentukan kehidupan perempuan. Sejak dekade 1960-an, gerakan feminisme yang menggeliat di berbagai belahan dunia (termasuk di Indonesia pada dekade 1990-an), terus menggugat dasar kebijakan negara yang bias jender, mendorong peran, fungsi, dan posisi perempuan secara lebih progresif, serta memprotes berbagai kebijakan konservatif negara dan stigma masyarakat yang memarginalisasi aspirasi, hak, dan kepentingan perempuan.

Kaum feminis yang peduli pada pentingnya kesetaraan jender dalam membangun watak bangsa, menuntut perubahan yang progresif atas posisi perempuan, seperti tercermin dalam polemik isu poligami, isu kekerasan dalam rumah tangga, isu hak-hak reproduksi perempuan, atau isu peraturan daerah tentang pelacuran. Menurut Gadis Arivia (2005), hampir seluruh regulasi negara yang terkait dengan soal perempuan mengandung materi bias jender. Sebab, dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial-budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik.

Dalam konteks demikian, tantangan fundamental gerakan perempuan ke depan, setidaknya dapat dipetakan ke dalam tujuh isu berikut: Pertama, globalisasi-neoliberal telah melahirkan kekuatan ekonomi dunia yang berpusat di negara-negara maju yang diikuti restrukturisasi ekonomi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Situasi ini telah menciptakan kemiskinan yang makin akut dan kompleks. Ekonomi global telah menyeret perempuan sebagai obyek dan komoditas ekonomi (menjadi PRT, PSK, buruh migran, atau pekerja upahan pabrik dan sektor informal bergaji mu-

to their domestic functions, not in broader public life context.

According to Julia Suryakusuma (2004), although the system and orientation of government political policy towards women issues are more gender responsive, but in context of political power in Indonesia, it is still sensitive to various types of political manipulation and often used as political legitimating tools. There is simple assumption: woman is the basic unit in family and society life. Therefore, control on women's roles is an effective instrument in controlling the whole state power operation. For Fatimah Muhibbi (2005), a muslim Iran feminist, physical difference between woman and man is inevitable fact (sunatullah). But if the difference is framed within gender-biased culture construction (moreover if it is legitimized by religious articles), then definition of equal rights on base of natural difference claim will end again at the patriarchal expression and domination, which is substantively against with God's law and universal principles of justice.

Various state regulations in relation to the women issue prove that construction of patriarchal political culture along history determines women's life. Since 1960s, the feminist movements that twist all over the world (including in Indonesia during the 90s), keeps criticizing the gender-biased basic of state's policy, pushing women's role, function, and position more progressively, and protesting various state's conservative policy and society's stigma that marginalize women aspiration, rights, and interest.

The feminists that have attention to the importance of gender equality in developing nation's characteristic, claim for progressive change on women's position, as mirrored in polemic of polygamy issue, domestic violence issue, women reproduction rights issue, or localization regulation issue. According to Gadis Arivia (2005), almost all of state's regulations on women consist of gender-biased material.

In that context, the fundamental of women's movements in the future, at least can be mapped into these seven issues: First, neoliberal globalization has given birth to the world economic strength that centralized at developed countries and followed by the economic restructurization of underdeveloped and developing countries. This situation has created more severe and complex poverty. Global economy has deserted women as an object and economic commodity (become maid, hooker, migrant worker, or factory paid worker and low-paid informal sector worker).

Second, authoritarianism of the state's politics. Overly state's control on citizens – especially on women

rah).

Kedua, otoriterisme politik negara. Kontrol negara atas warga negara yang berlebihan—terutama kaum perempuan—telah berakibat pada hadirnya berbagai kebijakan negara yang bias hak asasi manusia, bias jender, dan mereduksi hakekat demokrasi. Munculnya berbagai kebijakan bias jender (seperti RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi dan perda-perda di berbagai daerah yang berbasis pada penafsiran sempit atas agama tertentu), adalah sekelumit bukti bahwa implementasi atas hak-hak sipil dan politik perempuan belum sepenuhnya mendapat ruang gerak dari negara.

Ketiga, kebijakan negara yang tidak pro-rakyat. Seperti kita tahu, manajemen anggaran negara (APBN/APBD), prioritas pembangunan, dan manajemen pengelolaan sumber daya alam di negara ini masih sepenuhnya disandarkan pada pemenuhan kebutuhan para politisi, elite-elite ekonomi, para investor, dan kepentingan modal global. Kebijakan yang tidak *pro-poor* ini telah mereduksi akses masyarakat—khususnya perempuan—di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sumber-sumber kehidupan publik yang mendasar (pangan, energi, air, tanah, dan hutan).

Keempat, fundamentalisme agama. Berbagai gerakan agama yang disinyalir berupaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni Barat dan dominasi kekuatan kapitalisme yang berpijak pada sikap dan aksi yang radikal, sempit, dan sepihak, telah menimbulkan eksekusi baru hadirnya rantai kekerasan dan penindasan bagi perempuan. Munculnya organisasi-organisasi massa yang mengatasnamakan agama tertentu serta mewujudkan sikap dan aksinya dengan paham radikal seringkali menjadikan perempuan sebagai obyek kekerasan. Organisasi ini kerap membatasi ruang gerak dan ekspresi perempuan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kelima, liberalisasi politik yang terjadi sejak era reformasi tidak otomatis diikuti kesiapan lembaga pendidikan dan rekrutmen politik, terutama partai politik, untuk secara serius dan berkelanjutan untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, terutama untuk menempatkan perempuan dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang andal dengan kesempatan yang sama dan setara dengan caleg laki-laki.

Keenam, gerakan perempuan dengan demikian ditantang untuk mampu mendobrak lobi-lobi politisi laki-laki yang elitis dan budaya politik partai yang cenderung sentralistis dan patriarkat serta merubah budaya politik dan pola pikir jajaran elite partai agar memberi ruang dan peluang yang lebih besar pada kader politik perempuan untuk mendapat pelatihan dan edukasi politik, termasuk memberi kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam berbagai jabatan/posisi strategis serta dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Ketujuh, seperti diungkapkan Nur Iman Subono, meskipun kuota 30 persen sangat strategis, namun regulasi tersebut hanya salah satu elemen utama dalam upaya memperkuat representasi politik perempuan. Adalah saatnya, pasca pemilu 2009 kalangan perem-

– has resulted the existence of various state's policy that are human rights biased, gender biased, and reducing democratic values. The emergence of various gender biased policies (such as Anti-pornography and Anti-porno-action Law and other local regulations that are based on narrow interpretation on particular religion), is the proof that implementation of women civil and political rights has not obtained full space from the state.

Third, not proactive state policy. As we know, management of state budget (APBN/APBD), development priority, and management of natural resources in this country are still fully based on to the fulfillment of necessity of politicians, economic elites, investors, and global capital. This not pro-poor policy has reduced the access of society – especially women – within education, health, employment, and basic public life (food, energy, water, land, and forestry) sectors.

Fourth, religious fundamentalism. Various religious movements that are suspected to oppose the Western hegemony and domination of capitalism strength based on radical, narrow, and one side attitude and action, has created new excess of violence and torture on women. The emergence of mass organizations that uses particular religion and materialize their attitudes and actions with the radical understanding often place women as violence object. These organizations often limit women space of movement and expression in political, economical, social, and cultural fields.

Fifth, political liberalization that has happened since the reform era was not automatically followed by the readiness of educational institution and political recruitment, especially political party, to open the opportunity of women participation in politics seriously and continuously, especially in placing women at the significant organizational position and responsibility, besides preparing and placing women as capable legislative candidates with equal opportunity with the men candidates.

Sixth, women movements are therefore challenged to be able to break the elitist man politicians lobbies and culture of political parties which tend to be centralized and patriarchal and also change the political culture and mindsets of the party's elites, so that they will give bigger chance and opportunity for women to be responsible for strategic positions and be involved in the policy making processes. Therefore, women will have similar opportunity and contribution as men have.

Seventh, as stated by Nur Iman Subono, even though the 30 percent quota is very strategic, yet that

puan wajib memperluas makna representasi politik tersebut. Keterlibatan perempuan dalam sistem politik untuk tujuan representasi memang diperlukan (*necessary*), tapi sudah pasti tidak memadai (*sufficient*). Ini artinya, upaya *go politics* dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik (*crafting democracy*) tapi juga bagaimana representasi politik perempuan mampu memperluas basis konstituen (*broadening base*).

Setidaknya terdapat dimensi utama dalam konteks di atas, yakni menyangkut upaya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan publik; dan usaha untuk membangun basis sosial representasi politik perempuan, baik melalui lembaga-lembaga representasi politik formal maupun informal, termasuk partisipasi langsung (*direct democracy*). Terdapat rekoneksi antara gerakan perempuan (sebagai bagian integral dari gerakan sosial), dengan aksi-aksi politik perempuan (yang merupakan bagian dari demokrasi representasi). Seperti dikemukakan Lovenduski (2000), representasi politik yang diusung kalangan aktivis dan politisi perempuan setidaknya merepresentasikan tiga elemen penting, yakni mewakili pemilihnya (*functional*), partai politiknya (*ideology*) serta konstituen perempuan sebagai identitas (*social*). Bagaimana mensinergikan ketiganya dalam rekoneksitas tindakan-tindakan politik dengan gerakan sosial perempuan, merupakan tantangan yang harus dijawab kalangan perempuan di tengah-tengah kritik, keraguan, dan bahkan cibiran masyarakat (baca: laki-laki pada umumnya) atas kemampuan dan keberdayaan mereka.

Gerakan perempuan harus terus melakukan advokasi dan edukasi kritis pada semua level komunitas perempuan. Beragam perspektif analisis untuk melihat penindasan sistemik yang dialami perempuan harus diperkenalkan, seperti analisis feminis Marxian (untuk membedah penindasan yang dialami oleh buruh perempuan); analisis gerakan feminis Dunia Ketiga (untuk membedah penindasan perempuan dalam konteks kultur, religi, dan bentuk-bentuk kekerasan negara); atau analisis ekofeminis (untuk mengkaji ketertindasan perempuan dari aspek lingkungan dan sumber-sumber penghidupan alamiah).

Beragam perspektif dan strategi perjuangan perempuan yang ada sesungguhnya tak hanya efektif digunakan sebagai alat pencerahan dan penyadaran, tapi lebih dari itu sebagai instrumen dalam membangun koalisi besar gerakan perempuan Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, toleransi, dan demokrasi. Pun beragamnya organisasi perempuan yang tumbuh di Tanah Air harus dilihat secara positif dan diletakkan pada konteksnya, yakni saling mengisi dan melengkapi. Penyatuan banyak kekuatan dalam sebuah koalisi besar gerakan perempuan akan kian mempertinggi posisi tawar kaum perempuan *vis a vis* negara.

Nyata, perjuangan untuk mencapai keadilan gender dan mewujudkan representasi politik perempuan (yang bukan sekedar warna, tapi turut mewarnai) di negeri ini sepertinya masih butuh waktu panjang untuk dibuktikan, karena ia menyangkut kapabilitas untuk bersaing dan berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan,

regulation is only one main element in attempting to strengthen women political representation. Among others, after general election 2009, the women are obliged to broaden the meaning of such representation. Women involvement in political system for representation objective is of course necessary, but definitely still insufficient. This means that the efforts of women to go politics serve not only as activity to enter process, mechanism, institution, and political system (crafting democracy), but also how women political representation can broaden base constituent.

At least there is main dimension within above-mentioned context, which is the effort to influence the decision making process of public policy; and effort to build social basic of women political representation, either through formal, or informal political representation institutions, including direct participation. There is reconnection between women movements (as an integral part of social movement), with women political actions (as part of representation democracy). As stated by Lovenduski (2000), political representation that carried out by activists and women politicians at least represents three important elements, which are representing the voters (functional), political party (ideology) and women constituent as identity (social). How to synergize these three elements in reconnecting political actions with women social movement, is a challenge that has to be answered by the women in the middle of criticism, doubt, and even scorn from society (read: men in general) on their abilities and capacities.

Women's movements shall keep conducting advocacy and critical education at all level of women community. Various analysis perspectives to see the systemic torture experienced by women must be introduced, like the Marxian feminist analysis (to analyze the torture on female workers); analysis of feminist movements from the Third World (to analyze torture on women in context of culture, religion, and state violation forms); or ecofeminist analysis (to analyze torture on women from environmental aspect and natural living resources).

Various perspectives and strategies of women's struggles are in fact not only effective to be used as smartening and awakening tools, but also as instrument to build big coalition of Indonesian women to materialize equality, justice, tolerance, and democracy. The growth of various women organizations in nation must be viewed positively and put in context, which is to fill and complete one another. The unification of a lot of strength within a big coalition of women movement will give more bargaining position of the women

dukungan basis massa yang jelas, pengalaman yang relevan, serta visi misi yang tak hanya sejalan dengan partai politik yang diwakilinya, namun juga harus sebangun dengan harapan dan keprihatinan rakyat. Jika kita meyakini “politik tak bermula dari kebencian, tetapi dari rasa sayang dan nalar untuk membangun bangsa”, maka aspirasi politik perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsa bisa dimaknai sebagai bentuk penguatan demokrasi kita yang selama ini kental beraroma maskulin dengan cirinya yang cenderung arogan, culas, dan agresif. Dalam masyarakat yang terlanjur meyakini kodrat perempuan sebagai makhluk lemah dan kurang cerdas, jelas dibutuhkan upaya ekstra keras guna mengonstruksi isu representasi politik perempuan dalam bingkai demokrasi yang setara dan partisipatif dan wacana jender dalam frame pluralisme-demokratis (non-patriarkis) sebagai prioritas kebijakan negara ke depan agar tatanan masyarakat demokratis yang berkeadilan jender bisa sungguh-sungguh terwujud.

Jurnal Sosial Demokrasi edisi ke-6 dirancang untuk mengangkat isu penting ini sebagai topik bahasan dalam upaya mempromosikan gagasan representasi politik perempuan yang lebih substantif, sebagai komitmen untuk kian mengukuhkan wacana demokrasi Indonesia yang ramah jender. Hasil diskusi tematik redaksi edisi ke-6 tentang “Represetasi Politik Perempuan” yang tersaji dalam Laporan Diskusi, tentu bisa tersaji apik karena partisipasi aktif seluruh peserta. Suasana diskusi redaksi berjalan cukup keras dan argumentatif, namun tetap tertib dan efektif. Diskusi Redaksi Jurnal Sosial Demokrasi seperti biasa dipandu oleh Ivan Hadar (Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal Sosial Demokrasi) dan dihadiri oleh tim seluruh tim Redaksi Jurnal (Amir Effendi Siregar, Nur Iman Subono, Arie Sudjito, Launa, Puji Riyanto, Mian Manurung, beserta jajaran staf Friederich Ebert Stiftung yang terus setia memfasilitasi rangkaian diskusi Jurnal Sosial Demokrasi) serta partisipan lain, seperti Bini Buchori (Perkumpulan Prakarsa), Sri Budi Eko Wardani (Puskapol UI), Nurul Arifin (Partai Golkar), Rieke Dyah Pitaloka (PDIP) dan banyak rekan-rekan aktivis, peneliti, dan akademisi lainnya.

Mudah-mudahan, berbagai ide, gagasan dan perspektif pemikiran terkait representasi politik perempuan yang tertuang dalam berbagai artikel Jurnal edisi ke-6 ini dapat makin memperkaya wawasan dan khazanah pemikiran kita tentang masa depan bangunan demokrasi kita yang ramah jender. Selamat membaca. □

**Launa dan Azman Fajar,
Redaktur Pelaksana Jurnal Sosial Demokrasi**

toward the state.

In fact, the struggle to achieve gender equality and materialize women political representation (not only as colour, but also colouring) in this country seems still need long time to be proven, because it relates the capability to compete and contribute within practical politics significantly, support from clear basic mass, relevant experience, and vision and mission that are not only in line with the represented political party, but also with the people's hope and consideration. If we believe that "politics starts not from hatred, but from love and willingness to build the nation", then women political aspiration to participate within nation's political living can be understand as the form of our democratic empowerment, which so far has very strong masculine aroma with characteristic of tendency to be arrogant, tricky, and aggressive. Within the society that already believes in women destiny as weak creature and less smart, strong efforts are clearly necessary in order to construct women political representation issue within equal and participative frame of democracy and gender discourse within pluralism-democratic frame (non-patriarchy) as priority of state policy in the future, so that the democratic society arrangement that includes gender equality can really be achieved.

This 6th edition of SOSDEM journal was designed to discuss this sexy issue as topic of discussion as an effort to promote the more substantive idea of women political representation in order to settle Indonesian gender democracy discourse. The thematic editorial discussion of this 6th edition moderated by Ivan Hadar and attended by the editors team of Journal Sosdem (Amir Effendi Siregar, Nur Iman Subono, Arie Sudjito, Launa, Puji Riyanto, Mian Manurung, and staffs at Friedrich-Ebert-Stiftung who facilitated this discussion) and other participants, such as Binny Buchori (Perkumpulan Prakarsa), Sri Budi Eko Wardani (Puskapol UI), Nurul Arifin (Partai Golkar), Tere Pardede (Partai Demokrat), Rieke Dyah Pitaloka (PDIP), Raihana Diani (Partai Rakyat Aceh), Lely Zailani (Partai Peserikatan Rakyat), and many activists, researchers, and other academicians.

Hopefully, these various ideas, inputs, and perspectives related to women political representation in this journal 6th edition can enrich reader's knowledge and thought. Enjoy your reading and keep thinking free!

**Launa and Azman Fajar,
Team Editor Jurnal Sosdem**

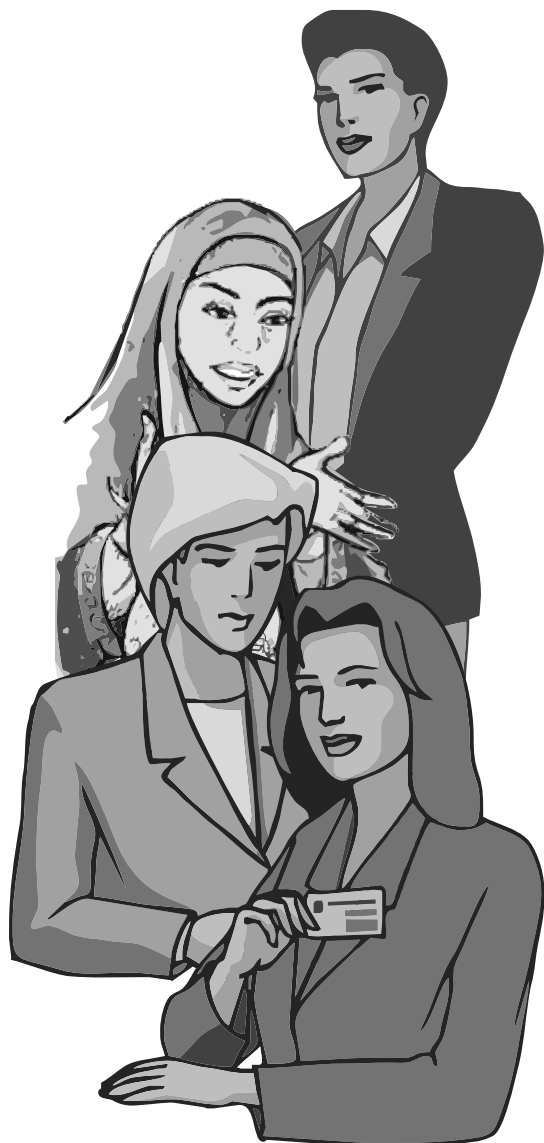


TRANSKRIP DISKUSI

REPRESENTASI POLI

SEKADAR W

TURUT MEV



Pengantar

Representasi politik perempuan adalah elemen utama jika kita hendak membicarakan upaya mempromosikan demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada demokrasi yang sejati tanpa melibatkan representasi perempuan di dalamnya.

Menjelang pergantian tahun, tepatnya 6 Desember 2007, kalangan perempuan menerima hadiah Tahun Baru dengan disahkannya UU Partai Politik yang memberi jaminan keterlibatan perempuan 30% dalam proses politik (Eko, Kompas, 14/1/08). Namun, hadiah tersebut sepertinya "mentah" kembali Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 214 UU No.10/2008. Ini membuat keterwakilan perempuan di parlemen menjadi sulit diprediksi. Di sisi lain, dari hasil pemilu legislatif yang baru lalu, realitas yang berkembang ternyata juga menyuguhkan sedikit

optimisme, dimana secara kuantitas jumlah perempuan dalam parlemen meningkat.

Setelah pemilu 2004 dan UU Parpol, kalangan perempuan mulai memperluas makna representasi politik perempuan tersebut. Keterlibatan perempuan dalam sistem politik untuk tujuan representasi memang diperlukan (*necessary*), tapi sudah pasti tidak memadai (*sufficient*). Oleh karena itu, harus diimbangi dengan tindakan-tindakan politik dalam kelompok-kelompok dan gerakan perempuan (Lister, 1997). Ini artinya, upaya go politics dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik (*crafting democracy*), tetapi juga bagaimana memperluas basis konstituen (*broadening base*). Dalam kaitan ini, ada dua dimensi utama yang perlu diperhatikan, yakni (1) menyangkut upaya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan

TIK PEREMPUAN: WARNA ATAU VARNAI?

keputusan publik; dan (2) usaha untuk membangun basis sosial representasi politik perempuan baik melalui lembaga-lembaga representasi politik, baik formal maupun informal, dan partisipasi langsung (*direct democracy*). Ada rekoneksi antara gerakan perempuan, yang menjadi bagian dari gerakan sosial, dengan aksi-aksi politik, yang merupakan bagian dari demokrasi representasi.

Latar belakang inilah yang mendorong Redaksi Jurnal Sosial Demokrat untuk mengangkat beberapa tema berdasarkan beberapa poin, yang diantaranya adalah Mengkritisi dan mengevaluasi gerakan politik perempuan, khususnya interaksinya dengan partai politik, sistem pemilu dan parlemen; Mencari ide-ide dan strategi-strategi politik perempuan dalam memanfaatkan "struktur kesempatan politik" yang ada untuk meningkatkan representasi politik perempuan, dan menjadikan demokrasi kita lebih bermakna bagi

perempuan, dan masyarakat pada umumnya; Memperluas basis konstituen gerakan politik perempuan; Melakukan perbandingan dengan negara-negara lain, baik dunia ketiga maupun negara maju, dalam kaitannya dengan representasi politik perempuan.

Beberapa peserta yang diundang dalam diskusi diantaranya adalah **Sri Budi Eko Wardani** (PUSKAPOL UI), **Nurul Arifin** (Caleg Golkar), **Rieke Diyah Pitaloka** (Caleg PDIP), **Binny Buchori** (Caleg Golkar), **Lely Zailani**, PPR, tim redaksi jurnal, dan peserta dari berbagai aktivis perempuan.

Mian Manurung (Jurnal Sosdem)

Selamat malam Bapak, Ibu sekalian dan juga kawan-kawan. Assalamu'alaikum wr.wb, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian, karena telah bersedia hadir dalam diskusi

malam ini. Diskusi dengan tema "Representasi Perempuan dalam Politik: Sekedar Warna atau Turut Mewarnai". Hasil diskusi malam ini akan kita pergunakan menjadi bahan Jurnal Sosial Demokrasi edisi keenam. Saya tidak akan lama-lama, tetapi bagi Bapak/Ibu dan juga kawan semua yang mungkin baru mengikuti diskusi Jurnal Sosdem, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, semua pembicaraan direkam dan akan kita pergunakan sebagai bahan untuk jurnal Sosdem. Oleh karena itu, kami mohon agar nanti ketika berbicara atau berpartisipasi dalam diskusi tolong memperkenalkan diri, nama dan asal institusinya. Kedua, acara malam ini akan di-moderatori oleh Pak Ivan Hadar. Ketiga, nanti akan ada pembicara utama, tetapi pada dasarnya semua yang hadir dalam diskusi malam ini adalah narasumber yang sangat diharapkan partisipasi aktifnya. Mas Boni (Nur Iman Subono) nanti akan menyampaikan perspek-

tif teoritiknya, dan kemudian Mbak Dani (Sri Budi Eko Wardani) dari Pusat Kajian Politik Fisip UI. Selain itu, kita juga menghadirkan Mbak Nurul Arifin yang akan bercerita tentang mengapa pada pemilu 2004 gagal, sedangkan pada tahun 2009 ini menang. Apakah benar karena memang Mbak Nurul melakukan banyak kegiatan ke pemilihnya atautkah seperti diperbincangkan orang selama ini, yakni semata karena ia seorang artis. Saya berharap tidak demikian. Kita berharap Mbak Nurul Arifin dapat bercerita tentang pengalaman-pengalaman tersebut. Kemudian, kita juga akan meminta pendapat Mbak Binny Buchori mengapa ia bisa kalah dalam pemilihan umum kemarin. Mengapa ada penjungkirbalikkan di lapangan, dan apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat Indonesia sehingga realitas politik yang terjadi seperti itu?

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka diskusi ini. Selanjutnya, saya persilahkan Bung Ivan Hadar untuk memimpin diskusi kita malam ini.

Ivan A. Hadar (Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal Sosdem)

Terima kasih Mbak Mian. Assalamu'alaikum wr..wb, dan salam sejahtera bagi semua. Apa yang disampaikan Mbak Mian saya kira sudah cukup mantap sebagai pengantar sehingga saya tidak perlu lama-lama memberikan pengantar diskusi malam ini.

Belum lama ini, saya dengan Mas Boni menjadi deklarator "Lelaki Feminis", yang menarik dalam deklarasi tersebut adalah pembacanya Kyai Husein. Menurut saya, transformasi Kyai Husein ini menarik. Beliau dari pesantren Salafiyah kemudian berproses menjadi kyai yang feminis. Pada waktu itu, beliau juga bercerita mengenai pengalamannya mengenai resistensi di kalangan pesantren

terhadap kyai yang berubah menjadi feminis. Saya kira itu sekelumit cerita menarik, dan karena waktunya sudah agak terlambat maka kami persilakan Mas Boni untuk presentasi kajian teoritik dan mungkin praksis tentang representasi perempuan dalam politik. Silahkan.

Nur Iman Subono (Jurnal Sosdem)

Selamat malam teman-teman. Assalamu'alaikum wr..wb..Salam sosdem. Nanti saya akan berbagi tugas dengan Dani karena ia akan mempresentasikan *current situation* representasi perempuan dalam politik. Tadi, saya sempat berdiskusi sebentar dan ternyata ada kenaikan dibandingkan dengan pemilu 2004. Diduga kenaikannya sekitar 100 perempuan di tingkat nasional, dan itu berarti sekitar 17%. Kita tentu masih ingat bahwa kelompok perempuan termasuk yang keberatan terhadap pembatalan Mahkamah Konstitusi mengenai undang-undang suara terbanyak. Kenaikan ini tampaknya menjadi bukti bahwa dengan suara terbanyak caleg perempuan lebih mempunyai kesempatan atau cukup mampu bersaing dalam pemilihan umum. Hari ini Kompas juga menangkap hal ini, dan menurut saya menarik bahwa begitu besarnya peranan mesin partai dan politik uang ternyata ada hal yang dilupakan oleh caleg laki-laki, yakni basis konstituen. Nah, di sini, tampaknya caleg perempuan yang justru memanfaatkan basis konstituen ini, dan pada pertarungan terakhir tampaknya justru inilah yang menentukan.

Kita mulai dengan hal yang sering dibicarakan, yakni situasi yang agak paradoks dalam perjalanan demokrasi kita. Pada satu sisi, ada kecenderungan peningkatan golput terlepas hal tersebut bersifat administratif ataupun politis dan mungkin juga apatis. Terlepas itu bersifat ala-

miah atau ada beberapa kawan yang turut serta mengkampanyekan. Namun kenyataannya memang, dalam beberapa pilkada terakhir, angkanya cukup tinggi. Termasuk di dalamnya, tentu saja, pemilihan legislatif yang baru saja berlalu. Dalam banyak hal, orang dapat menjelaskan bahwa ada semacam ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat terhadap perilaku politisi partai politik atau parlemen, tetapi sebenarnya pada waktu bersamaan kita menyaksikan antusiasme masyarakat karena kehadiran partai politik yang begitu besar. Saya kira jumlah terakhir 44 partai politik. Oleh karena itu, banyak orang mulai bertanya-tanya bagaimanakah masa depan demokrasi kita apakah masih dalam *on the right track* atau justru semakin jauh dari harapan yang dulu pernah kita tanamkan pada masa reformasi.

Sebelum masuk ke dalam representasi politik perempuan, ada beberapa riset yang dilakukan oleh lembaga Demos. Riset tersebut menemukan empat kesimpulan meskipun dalam riset berikutnya ada temuan-temuan baru, tetapi menurut saya empat temuan ini menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, perdebatan kita bukan pada tataran apakah demokrasi kita gagal atautkah masih *on the right track*. Namun, kita mempromosikan kata defisit demokrasi. Ini karena jika kita bandingkan dengan masa Orde Baru, maka kebebasan sipil dan politik jauh lebih baik. Kita dapat mendirikan partai politik, kita bebas mengeluarkan pendapat, kita bebas berdemonstrasi, dan seterusnya. Namun, jika kita lihat dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan juga budaya maka harus kita akui bahwa masih ada ketimpangan di sana. Kemudian, jika kita berbicara *good governance*, *law enforcement*, saya kira masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kita meminjam istilah ekonomi untuk me-

nyebut bahwa kita mengalami “defisit demokrasi”. Kedua, saya kira kita juga tidak berada dalam posisi untuk mengatakan bahwa Indonesia bukan sebuah negara demokrasi karena kita mempunyai partai politik, parlemen, dan relatif bebas melaksanakan pemilu sehingga secara prosedural kita bisa dimasukkan ke dalam negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat dan India dibandingkan dengan era sebelumnya. Namun, jika kita berbicara dalam konteks perwakilan, maka pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup terwakili? Oleh karena itu, di sini, muncul apa yang sering disebut sebagai representasi semu (*pseudo representation*). Ketiga, ada banyak yang mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di parlemen adalah orang-orang lama. Jika kita melihat dalam kasus di Banten, misalnya, ada 9 orang yang duduk di parlemen yang terdiri dari anak, menantu, mertua, dan sebagainya yang merupakan dinasti politik. Suasana dinasti politik ini cukup kuat mewarnai proses demokrasi di Indonesia. Terakhir, kelompok-kelompok yang kita anggap sebagai gerakan prodemokrasi, tampaknya dalam banyak kasus, mulai menyadari bahwa basis konstituen mereka belum jelas. Selama ini, teman-teman yang berada dalam kelompok sipil sebenarnya baru berbicara pada tingkatan kelompok dampingan. Namun, perubahan kelompok dampingan menjadi *voters* merupakan dua hal yang berbeda. Jadi, banyak aktivitas LSM sejak tahun 2004 yang berusaha mencalonkan DPD, misalnya, baru menyadari bahwa untuk mengumpulkan KTP sebanyak enam ribu saja mereka mengalami kesulitan. Jadi, saya kira ini beberapa situasi yang bisa kita lihat. Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah kemana perempuan atau dimana perempuan?

Dalam banyak kasus, secara sederhana, pilihannya ada dua. Per-



tama, mereka yang tetap merasa di luar atau *civil society* sehingga konsekuensi yang harus mereka terima adalah *voicesless* dalam proses pengambilan kebijakan kecuali sebagai kelompok kritis atau penekan. Namun, mereka bukan menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan.

Kedua, masuk ke dalam ranah politik formal dengan resiko isu dan kepentingan kemungkinan besar akan dikooptasi, tersubordinasi dan bahkan masuk ke dalam daftar kebijakan yang tidak menjadi skala prioritas. Oleh karena itu, teman-teman seperti Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka yang masuk ke dalam ranah politik harus hati-hati karena dalam banyak kasus isu-isu yang kita anggap isu perempuan bisa jadi terkooptasi dan juga tersubordinasi bahkan masuk ke dalam list yang bukan prioritas dalam perdebatan di parlemen. Ini situasi yang kita temukan hingga saat ini. Nah, bagaimana kita melihat berbagai kemungkinannya?

Ada kritik, dan mungkin kita bisa berdebat, saya kira refleksi gerakan sosial pada umumnya, fragmentasi itu cukup tinggi. Ini dialami teman-teman buruh, nelayan, dan tampaknya teman-teman kelompok perempuan tidak terlepas dalam situasi semacam itu. Trauma masa lalu saya kira juga

masih ada. Kita tahu bahwa selama Orde Baru kita mengalami masa depolitisasi yang begitu lama. Kemudian, saya kira kita harus menyadari bahwa kelompok perempuan tidak pernah homogen. Gerakan politik perempuan juga menghadapi kurangnya perluasan basis konstituen. Nah, ketika kotak pandora dibuka maka orang-orang saling berebut untuk mengambil peran. Selain itu, perempuan juga menghadapi kurangnya kepemimpinan yang kuat dalam gerakan politik perempuan serta kuatnya orientasi elitis dalam gerakan politik perempuan.

Kemudian, minimum *platform* saya kira juga menjadi masalah. Bagaimanapun kita harus sadar bahwa kelompok perempuan tidak pernah homogen, tetapi heterogen. Dalam kaitan ini, berbagai isu atau kepentingan saling berkontestasi. Semakin detil pembicaraan maka biasanya semakin sulit ditemukan titik temu sehingga minimal platform menjadi penting untuk dibicarakan dan disepakati.

Saya kira salah satu statement Kompas hari ini, yang menurut saya menarik, menyangkut kurangnya basis dukungan kelompok perempuan. Saya kira kampanye terakhir perempuan untuk perempuan bisa menjadi

bumerang karena menjadi sangat eksklusif. Ketiadaan kepemimpinan yang kuat saya kira juga menjadi persoalan dalam suatu gerakan sosial, kemudian orientasi elitis sebagai akibat depolitisasi yang berlangsung sangat lama. Meskipun demikian, kita bisa menyaksikan beberapa kemajuan meskipun belum cukup memadai. Kita tahu bahwa UU No. 10 2008 yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi saya kira agak kurang tepat jika dikatakan bahwa kita tidak mengalami kemajuan jika dilihat dari sudut pandang legalitas. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, saya kira langkah perjuangan kelompok perempuan lebih fokus, lebih pasti, dan menelurkan kebijakan yang muncul.

Nah, ada sebuah pertanyaan yang sering dikemukakan ke kita mengapa perempuan harus terlibat ke dalam politik? Saya kira ada beberapa alasan yang bisa diajukan. Pertama, mengenai keadilan dan kesetaraan. Secara legal konstitusional, jelas ini telah tercantum dalam konstitusi, Konferensi Beijing, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari komposisi jumlah, maka sebenarnya antara laki-laki dan perempuan berimbang sehingga tidaklah adil jika perempuan tidak terepresentasi dalam pembuatan legislasi. Di parlemen, perempuan hanya berjumlah sekitar 11,6% saja. Kedua, *woman interest*. Di sini, kaum laki-laki harus menyadari bahwa tidak semua kepentingan perempuan dapat diwakili. Banyak sekali isu-isu yang sifatnya spesifik dan karenanya hanya bisa direpresentasikan oleh perempuan. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang emansipasi dan perubahan, maka saya selalu mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang isu perempuan merupakan perubahan yang tidak bisa dihindari. Ketiga, perempuan membuat perbedaan. Nah, saya kira ini menjadi penting karena tidak hanya sekedar, mis-

Alasan	Argumentasi
Keadilan (<i>justice</i>) dan kesetaraan (<i>equality</i>)	Konstitusi, Cedaw, Konferensi Beijing, populasi
Kepentingan perempuan (<i>woman interest</i>)	Perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dengan laki-laki
Emansipasi (<i>emancipation</i>) dan perubahan (<i>change</i>)	Membongkar sistem patriarkal dalam negeri
Perempuan membuat "perbedaan" (<i>difference</i>)	Tidak hanya "add" terhadap demokrasi, tetapi "engender" demokrasi
Perempuan menjadi "panutan" (<i>role model</i>)	Perempuan menjadi inspirasi dan pemberi semangat perempuan lainnya

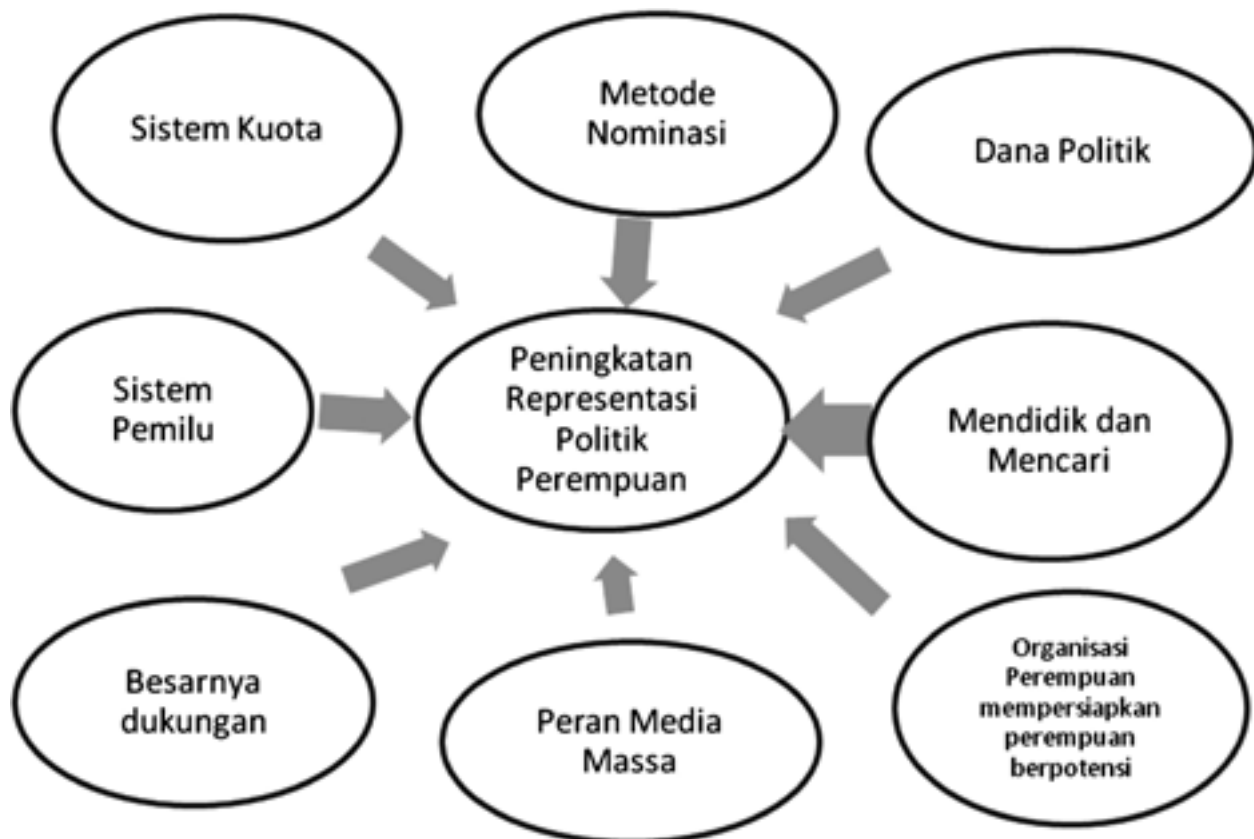
alnya, Mbak Nurul dan Rieke berada di parlemen, tetapi yang lebih penting adalah in-gender democracy. Ini karena ada premis yang mengatakan bahwa perubahan politik mempunyai dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, dan dalam banyak kasus gaya politik perempuan dan laki-laki berbeda. Sebagai contoh, kita bisa menyaksikan bahwa politik maskulinitas di parlemen hampir selalu dalam konteks "kami" dan "mereka". Politik sebagai sebuah pertempuran. Kita berharap bahwa teman-teman perempuan yang berada di parlemen dapat mengubah gaya politik maskulin semacam itu. Keempat, perempuan sebagai panutan saya kira juga penting untuk dikedepankan. Ini karena berbagai barrier yang ada tampaknya tidak mampu menghalangi orang-orang seperti Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka, Mbak Tere, dan juga Binny Buchori untuk masuk ke ranah politik.

Menariknya, dulu kita membayangkan bahwa semakin modern suatu negara maka akan lebih memberikan apresiasi terhadap representasi perempuan. Namun, ada sebuah penelitian yang justru menemukan sesuatu yang berkebalikan. Dalam banyak kasus, negara-negara industri justru dalam banyak kasus malah menjadi lebih konservatif menyangkut representasi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, kita harus

mewaspada gejala ini. Jadi, sesuatu yang modern itu tidak selalu menjadi tempat yang selalu nyaman untuk representasi perempuan. Kemudian, jika kita lihat secara prosedural, maka kita akan mendapati betapa keseluruhan mekanisme prosedural yang ada hampir sama sekali tidak ramah terhadap perempuan (*unwoman friendly*), baik berkenaan dengan sistem pemilunya, nominasi ataupun kampanye dalam pemilu sangat tidak ramah bagi perempuan. Nah, pertanyaan penting yang harus dijawab secara teoritik adalah apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan representasi?

Representasi berasal dari kata *to represent*, yakni suatu aktivitas yang membuat perspektif, opini, dan suara warga negara hadir dalam proses pembuatan kebijakan publik. Nah, menurut saya, ini yang paling penting. Oleh karena itu, hanya merupakan salah satu pintu saja. Namun, tentu, kita berharap bahwa ini hanya merupakan salah satu cara karena sebenarnya kita nantinya tidak perlu mempermasalahkan lagi laki-laki ataupun perempuan. Yang terpenting adalah kehadiran perspektif perempuan. Selama opini atau suara tersebut membawa aspirasi perempuan, saya kira tidak menjadi persoalan.

Persoalan berikutnya yang juga memerlukan klarifikasi adalah isu apa



Sumber: Jun so ok Kim, 2006

yang seharusnya direpresentasikan? Tadi, saya sudah mengatakan bahwa representasi perempuan tidak selalu homogen, tetapi heterogen. Oleh karena itu, representasi dapat diwujudkan dalam bentuk ideologis. Teman-teman yang berada di parlemen dan juga *civil society* harus selalu memeriksa ideologi ini. Sekarang ini, hampir seluruh partai politik mempunyai ideologi dan platform yang hampir mirip satu dengan yang lain sehingga kita perlu mengecek secara benar apakah ideologi mereka benar-benar pro-masyarakat. Jadi, representasi ideologis ini harus benar-benar senantiasa kita cek. Namun, pada waktu bersamaan, kita juga harus memperhatikan representasi sosial atau orang sering menyebutnya sebagai *descriptive representation*. Perempuan mewakili perempuan, buruh mewakili buruh, dan seterusnya. Inilah yang dalam banyak hal sedang diperjuangkan oleh kaum

perempuan dengan kuota 30% tersebut atau *affirmative action*. Angka 30 ini, menurut penelitian PBB-UNDP, merupakan angka kritis (*critical number*) suara atau aspirasi perempuan baru bisa diwakili dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, meskipun sudah terjadi kenaikan, tetapi tampaknya angkanya masih jauh dari 30%.

Berikutnya, kita perlu membicarakan hal yang bersifat fungsional. Menurut saya, tidak perlu kelompok perempuan beramai-ramai atau selalu secara bersama-sama, tetapi ada kalanya mereka sendiri-sendiri dan pada saat lainnya mereka bersama-sama. Kita tentunya dapat melihat bagaimana sejarah gerakan di belahan dunia lain ketika "Kotak Pandora" dibuka maka ada kecenderungan kelompok perempuan beramai-ramai mengambil peran dalam gerakan. Padahal, tidak selalu harus begitu karena terdapat isu-isu tertentu yang

memang tidak harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi, sifatnya memang lebih substantif.

Akhirnya, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang berada di parlemen? Pertama, tingkatkan kepedulian melalui kampanye di media. Kedua, tingkatkan kemitraan dengan laki-laki. Ini penting karena ketika orang berbicara tentang ketidaksetaraan atau keadilan kita harus sadar adanya empat premis yang harus kita yakini, yakni: (1) ini bukan perang laki-laki dan perempuan; (2) persoalan ini bukan menyangkut persoalan anti laki-laki; (3) dalam banyak kasus, laki-laki adalah korban meskipun perempuan sebagai korban lebih banyak; (4), jika situasinya demikian, maka kemitraan laki-laki dan perempuan di parlemen menjadi penting. Ketiga, memperluas kelompok politik perempuan atau dalam istilah kita *go politics*, yang artinya tidak alergi terhadap politik. Ini pent-

ing karena kita tidak menginginkan bahwa setelah 10 tahun maka orang-orang seperti Mbak Nurul Arifin, Rieke, Binny Buchori, Tere, dan lain sebagainya tidak ada kadernya dalam parlemen. Keempat, amandemen untuk diskriminasi positif. Jadi, berbagai undang-undang yang kita anggap seolah-olah netral, tetapi tidak properempuan menjadi lahan kita untuk di-amandemen-kan.

Saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Ivan A. Hadar.

Tepuk tangan untuk Mas Boni. Ada hal-hal yang secara teoritis pun sulit untuk diungkapkan oleh laki-laki. Oleh karena itu, kita perlu mendengarkan paparan dari Mbak Dani. Silahkan.

Sri Budi Eko Wardani

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, assalamu'alaikum wr wb. Saya akan mencoba untuk mendiskusikan temuan-temuan awal, dan memang analisis yang kami lakukan masih sangat awal karena kami belum bisa, pada akhirnya, untuk mengatakan apa yang terjadi dalam pemilu 2009 ini karena data masih terus berproses.

Menyambung apa yang tadi dikatakan oleh Mas Boni, undang-undang pemilu No. 10 tahun 2008 sudah cukup maju dalam hal pencalonan perempuan dibandingkan dengan 2004 yang hanya satu pasal, dan itupun merupakan pasal karet. Sekarang ini, terdapat dua pasal yang secara khusus mengatur tentang afirmatif, yakni pasal 53 dan pasal 55. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya ada kepatuhan dari peserta pemilu dalam hal mencalonkan perempuan. Jika kita bandingkan pencalonan perempuan antara tahun 2004 dengan tahun 2009, maka terjadi peningkatan dalam hal jumlah. Ini berarti dapat di-



katakan bahwa menyangkut kesediaan perempuan untuk menjadi caleg maka kita tidak mendapati masalah. Jika kita lihat persentasi caleg perempuan sekarang ini, maka terdapat kurang lebih 3895 atau sekitar 34,7% dari sekitar 11.000 calon anggota DPR RI. Namun, persoalannya adalah angka-angka ini belum terepresentasikan dalam setiap dapil. Angka 34,7% ini merupakan rekapitulasi dari keseluruhan dapil yang ada. Kemudian, jika kita lihat perdapil (daerah pemilihan, red), maka akan kita temukan bahwa tidak semua partai politik patuh terhadap aturan itu. Bahkan, partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP tidak mampu memenuhi 77 dapil. Hanya 60% yang bisa memenuhi 30% di setiap dapil.

Menariknya, justru partai-partai yang sering kita sebut sebagai partai gurem yang memungkinkan mampu mencalonkan perempuan dalam jumlah lebih banyak. Setidaknya, ada delapan partai yang mencalonkan lebih dari 40% caleg perempuan, yakni Partai Pengusaha dan Pekerja yang mencalonkan caleg perempuan sebanyak 49,3%. PKPI, PNUI, PDK, PPD, PNB, PBR, bisa mencalonkan lebih dari 40%.

Untuk caleg DPD, jumlah caleg perempuan juga mengalami peningkatan. Sekarang ini, jumlah caleg perempuan sekitar 11,3% naik dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 8,8%, dan seba-



gian merupakan *incumbent*. Nah, inilah potret pencalonan perempuan. Oleh karena itu, dilihat dari sisi ini, relatif tidak ada masalah jika sekali lagi kita lihat tingkat kepatuhan partai politik terhadap undang-undang.

Selanjutnya, bagaimana dengan jumlah perempuan dalam parlemen? Dulu, kami pernah bercanda apakah mungkin jumlah perempuan di parlemen bisa mencapai angka 100? Kita melakukan utak-atik dengan menghitung kemungkinan-kemungkinan ke arah pencapaian angka ini. Untuk mencapai angka tersebut, kita mendatangi partai-partai politik, PPP, ataupun PDIP dengan bertemu secara langsung Puan Maharani untuk menanyakan dimana perempuan-perempuan bisa jadi. Dulu, kita menargetkan setidaknya 30 perempuan

Tabel 1
Perbandingan Caleg Perempuan untuk Partai-Partai Besar dan Tengah

Partai Politik	PEMILU 2004			PEMILU 2009		
	Kursi Partai	Kursi Perempuan	(%) Perempuan	Kursi Partai ¹⁾	Kursi Perempuan ²⁾	(%) Perempuan
Golkar	127	18	14,17	107	16	14,95
PDIP	109	12	11,01	95	21	22,10
PAN	53	7	13,20	43	5	11,62
PKB	52	7	13,46	27	7	25,92
Demokrat	56	6	10,71	150	34	22,66
PKS	45	3	6,67	57	3	5,26
PPP	58	4	6,89	37	5	13,51
Gerindra	-	-	-	26	5	19,23
Hanura	-	-	-	18	4	22,22

¹⁾ Data kursi partai Pemilu 2009 bersumber pada hasil KPU

²⁾ Data Kursi perempuan adalah sementara, diolah dari hasil rekapitulasi sementara KPU, dan Research CETRO.

bisa masuk ke PDIP. Kita juga datang ke PKS, dan dulu mereka pernah berjanji 15 perempuan untuk ditaruh di tempat-tempat yang memungkinkan mereka jadi. Dengan cara semacam itu, kami ingin merekayasa keterpilihan perempuan melalui semiterbuka. Jadi, tidak terbuka murni. Angka sekarang memang mencapai 17, 85%. Ada peningkatan yang cukup signifikan meskipun masih jauh dari angka 30%. Lonjakan ini, jika di Aceh ada tsunami politik, maka dalam hal caleg perempuan juga ada tsunaminya. Partai Demokrat yang membawa gerbong sangat banyak dalam hal caleg perempuan meskipun masih perlu dikaji lebih jauh apakah ini faktor popularitas Partai Demokrat yang memang menang secara signifikan ataukah memang caleg perempuan mendapatkan suara terbanyak. Dalam banyak kasus, Partai Demokrat memang menempatkan perempuan-perempuan di nomor urut satu yang memungkinkan mendapatkan suara terbanyak, seperti Maluku Utara ada Wuki Ratu istri Sultan Ternate, di NTT adalah Ibu Anita Gah, di Jawa Barat ada Ajeng

Suminar, dan sebagainya. Tampaknya, Partai Demokrat memang yang paling siap dengan suara terbanyak melalui penempatan orang-orang lokal. Maka, di Demokrat, ada sekitar 34 perempuan, dan ini merupakan lonjakan yang cukup luar biasa. Hanya tiga partai besar sebenarnya yang menyumbangkan caleg perempuan yang cukup sehingga peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen meningkat tajam. Selain Demokrat, Golkar menyumbang 16, dan PDIP 21 caleg perempuan. Jadi, ketiga partai ini menyumbang sekitar 70% keterwakilan perempuan di parlemen.

Namun, jika kita lihat partai tengah, maka tidak ada pergeseran yang cukup signifikan. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya keterwakilan caleg perempuan di partai politik sangat dipengaruhi oleh performa partai dalam mendapatkan kursi. Oleh karena itu, seandainya Partai Demokrat tidak menang maka apakah caleg perempuan akan mengalami lonjakan luar biasa? Ini sekedar menunjukkan bahwa suara terbanyak *an sich* tidak serta-merta menjadi faktor

pendukung. Di sisi lain, penempatan ternyata juga mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan terpilihnya caleg perempuan. Caleg-caleg yang berada di urutan teratas ternyata lebih banyak yang jadi dibandingkan dengan yang di tempatkan di nomor urut *bontot*. Sebagai contoh, caleg perempuan dari Partai Demokrat yang ditempatkan di nomor urut 1 hampir semuanya jadi. Demikian juga dengan Golkar. PDIP 2 orang dan dua-duanya jadi karena ditempatkan di nomor urut 1.

Jadi, memang ada faktor yang perlu dijelaskan apakah fenomena yang terjadi pada tahun 2009 ini akan terjadi juga pada tahun 2014 dalam pengertian memang ada partai yang mampu mengangkut caleg perempuan dalam jumlah besar. Inilah sebenarnya yang menjadi latar belakang mengapa partai-partai besar yang kami dekati. Dalam pemahaman kami, partai-partai besar inilah yang memang kemungkinan jauh lebih besar dalam meloloskan caleg perempuan ke parlemen meskipun hal ini tidak berarti mengecilkan partai-partai gurem. Jadi, ketika awal-

awal kami hanya melakukan intervensi terhadap tujuh partai besar karena alasan strategis. Jika kita memang menghendaki jumlah (*numbers*), maka mau tidak mau kita harus mendekati partai besar. Inilah yang mendorong kami untuk melakukan analisis lebih jauh apakah persoalannya pada nomor urut ataukah ada faktor yang lain karena ada beberapa caleg di nomor urut besar yang jadi?

Kemudian, jika kita bandingkan ketujuh partai politik, maka cukup menarik. Kita harus memberi apresiasi kepada PDIP bahwa kemampuan kinerja caleg perempuan cukup baik dalam mempertahankan jumlah. Jika dulu hanya 11% sekarang naik menjadi 22,10%. Jadi, mengalami kenaikan 2 kali lipat. Tentu saja, peningkatan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang karena yang terpilih ternyata cukup beragam, ada yang dari aktivis, *public figure*, dan ada juga yang berasal dari birokrasi (lihat tabel 1).

PDIP saya kira mempunyai kesempatan yang lebih besar pada masa datang. Jika partai ini mampu memperluas basis konstituennya, dan lebih banyak perempuan di nomor urut satu maka peluang caleg perempuan akan semakin besar.

Hanya Golkar sebenarnya yang stagnan, dan menurut kami kemampuan regenerasinya rendah. Mungkin ini disebabkan oleh senioritas mengingat orang-orang yang terpilih juga sudah cukup senior.

PKS kita beri angka merah karena jumlah kursinya naik, tetapi caleg perempuannya tidak. Oleh karena itu, mungkin kita harus memberikan peringatan kepada partai ini agar memberikan perhatian serius mengenai hal ini. Mereka harus menempatkan lebih banyak caleg perempuan di nomor urut 1.

Saat ini, terus terang refleksi akhir mengenai apa yang harus kami lakukan masih belum jelas. Apakah untuk

tahun 2014 kita tetap mengejar melalui perbaikan uu pemilu ataukah tidak perlu mengurus DPR, tetapi langsung ke eksekutif. Oleh karena itu, siapapun nanti yang terpilih maka kita harus mempunyai bargaining position. Siapun yang terpilih maka akan kita sodori apa yang menjadi keinginan kita. Ini karena bagaimanapun presiden tetap merupakan posisi strategis untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan *afirmatif*. Nah, barangkali, ada tiga wilayah afirmatif untuk ke depan. Pertama, kita masih berada di wilayah struktural, terutama di birokrasi. Kedua, dalam institusi politik, yang dalam hal ini adalah partai politik. Ketiga, pendidikan pemilihan. Untuk yang ketiga ini, memang belum strategis. Nah, ini semua harus ada kebijakan yang bersifat afirmatif.

Ivan A. Hadar

Terima kasih Mbak Dani atas *mapping*-nya. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi sekarang ini lebih pada jumlah atau sesuatu yang lebih bersifat minimal. Tadi, jika judulnya warna dan mewarnai, maka warnapun sebenarnya memerlukan minimal *common platform*. Barangkali, jika jumlahnya sudah mulai meningkat, maka perlu juga ada kesamaan visi minimal. Apakah lintas ideologi perlu dilakukan karena di negara-negara lain atau yang saya lama tinggal di Jerman maka kita bisa memilih antara konservatif, sosialis, sosial demokrasi, lingkungan, ataupun marxis. Nilai-nilai yang diperjuangkan juga berbeda. Misalnya, konservatif memperjuangkan, katakanlah, kembali ke keluarga ataupun hal-hal yang mempertahankan tradisi budaya, dan lain sebagainya. Itulah pilihan-pilihan yang ada. Dalam konteks Indonesia, partai-partai gurem jika kita pelajari maka ideologinya masih mirip. Nah, bidang ini tampaknya yang belum serius digarap. Oleh karena itu, menjadi penting tampaknya bagi

teman-teman aktivis dan juga dari universitas dan yang sudah duduk di parlemen untuk memikirkan tahap berikutnya sehingga tidak hanya berfokus pada jumlah. Ini penting karena tidak semua perempuan feminis. Margaret Thatcher barangkali dapat kita jadikan contoh.

Berikutnya adalah Mbak Nurul Arifin yang pada tahun 2004 suaranya paling tinggi, tetapi kalah karena nomor urut. Namun, sekarang berhasil, dan karenanya bisa diceritakan kepada kita apa yang disampaikan atau dibicarakan dengan konstituen sehingga menang dalam pemilu 2009 ini. Silahkan Mbak Nurul Arifin.

Nurul Arifin (Caleg Partai Golkar)

Terima kasih. Assalamu'alaikum wr..wb. Baiklah kawan-kawan. Saya percaya betul bahwa berbicara demokrasi tidak hanya mengenai prosedur dan substansinya, tetapi juga harus membahas aktor-aktornya. Jadi, jika disebut aktor-aktor demokrasi, maka tentu saja mewakili laki-laki dan perempuan. Nah, jika berbicara laki-laki dan perempuan, maka jumlahnya harus signifikan dalam keterwakilannya. Namun, hingga saat ini, kenyataannya kita belum bisa meraih jumlah yang signifikan dalam parlemen. Meskipun demikian, saya tetap merasa bersyukur karena pada awalnya kita cukup pesimis dengan model suara terbanyak, maka perempuan akan mengalami kesulitan untuk berkompetisi. Namun dalam kenyataannya, jumlah perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif mencapai kurang lebih 100 orang meskipun dalam catatan saya sebanyak 97 orang. Jadi, pertambahannya lebih kurang kurang mencapai 35 orang.

Selanjutnya, jika pertanyaan adalah bagaimana pengalaman saya sebagai orang yang pernah maju dalam pemilihan umum tahun 2004 dan tidak terpilih karena nomor urut

meskipun saya mendapatkan suara terbanyak di dapil tersebut, maka sekarang saya bersyukur karena konstituen saya tidak lari. Secara sadar dan atau tidak, ternyata saya berhasil membina konstituen saya tersebut untuk memberikan dukungannya kepada saya.

Nah, saya mempunyai beberapa catatan yang sebenarnya merupakan hasil dari tesis saya di Universitas Indonesia, tetapi menurut saya dapat digunakan kapanpun. Seseorang yang hendak berkompetisi di pemilihan umum maka harus mempunyai setidaknya tiga modal utama yang harus dimiliki sebagai perempuan—meskipun mungkin ini juga untuk laki-laki, yakni pertama adalah kepemimpinan di partai. Kita harus masuk ke dalam kepengurusan partai politik atau masuk ke dalam struktur untuk perempuan. Jadi, kita tidak hanya menjadi figuran dalam partai atau sekedar masuk ke dalam seksi kon-

sumsi atau kesekretariatan. Namun, harus masuk ke dalam kepengurusan partai politik karena dengan demikian kita akan mendapatkan nominasi di nomor urut. Selain itu, kita juga akan bisa menggunakan infrastruktur partai tersebut hingga ke tingkat dusun. Dalam partai politik saya, jika masuk ke dalam partai politik sebagai pengurus, kita akan mendapatkan poin-poin tertentu yang akan menentukan nominasi di nomor urut. Oleh karena itulah, kita harus masuk ke dalam struktur.

Kedua, modal sosial. Saya, Tere, Rieke, misalnya, mempunyai modal sosial dalam bentuk popularitas. Inilah modal sosial yang kami miliki yang sebenarnya memudahkan untuk berkampanye karena tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk dikenal masyarakat. Nah, menurut saya, inilah modal yang kami miliki. Meskipun demikian, popularitas kadang mengundang sinisme publik

yang membuat kami tidak nyaman. Padahal, jika saya ingin melakukan pembelaan terhadap teman-teman artis, maka sebagian besar teman-teman artis ini adalah lulusan S1. Oleh karena itu, mereka sebenarnya sudah mempunyai struktur berfikir tinggal menambal substansinya. Inilah yang membuat saya untuk seringkali mendorong teman-teman artis terlibat ke dalam diskusi-diskusi semacam ini. Dinasti politik, kader, ketokohan, aktivis, *networking*, dan sebagainya merupakan modal sosial yang cukup membantunya karena biasanya mereka mempunyai basis massa. Ketiga, modal ekonomi. Modal ekonomi ini digunakan untuk membeli atribut, biaya kampanye, saksi, dan lain sebagainya. Saksi sangat penting karena sangat mahal dan seringkali teman-teman *careless* ketika pemilihan umum sudah dilaksanakan. Padahal, justru pada tahap inilah pertarungan yang paling gawat. Kita tidak

Nurul Arifin

Nurul Qomaril Arifi atau lebih dikenal sebagai Nurul Arifin ini lahir di Bandung, 18 Juli 1966. Anak ke-10 dari 11 bersaudara ini menamatkan pendidikan pascasarjana FISIP di Universitas Indonesia. Artis yang telah membintangi banyak film ini, salah satunya Naga Bonar, juga merupakan aktivis HIV AIDS, Gender, dan juga narkoba. Di blognya, ia berujar, “Keinginan saya adalah ingin menjadi seseorang yang berarti bagi orang lain. Penderitaan korban Aids, Narkoba

ataupun kekerasan terhadap perempuan membuat saya tertarik untuk terlibat secara aktif menjadi sukarelawan.” Di parlemen, Nurul Arifin menginginkan masuk ke komisi II karena ia akan memperjuangkan otonomi daerah yang menurutnya sudah tidak sehat. Bagaimanakah Nurul akan memperjuangkan hal tersebut? Selain otonomi daerah, adakah hal lain yang ingin diperjuangkannya di parlemen?



boleh lengah, tidak boleh istirahat, dan tidak boleh ditinggalkan. Waktu yang dibutuhkan tidak hanya satu minggu, tetapi bisa dua, tiga, bahkan berbulan-bulan. Sebagai contoh, saya membayar saksi cukup mahal, dan yang paling lama penghitungan di Bekasi karena memakan waktu hingga tiga minggu. Saksi-saksi independen saya taruh di sana. Saya buat cetakan sendiri untuk saksi, relawan Nurul Arifin. Formulir C1 saya minta difoto kopi, dan tidak masalah jika harus mengeluarkan dana lebih besar. Namun, saya akan puas karena jika ada masalah maka saya mempunyai data. Saya mengatakan kepada teman-teman, "Saya tidak ingin mencuri suara orang lain, tetapi tolong suara saya tidak dicuri". Nah, ternyata mereka memang betul-betul pasang badan. Saya katakan kepada mereka, "hanya ada dua syarat menjadi saksi, yakni paham dan berani". Asal tahu saja, ternyata jatuhnya lebih banyak ke preman dibandingkan dengan aktivis biasa. Teman-teman relawan aktivis biasa, dan syaratnya belum menikah saya jadikan relawan selama tiga bulan. Jadi, mulai bulan Januari hingga April saya gaji mulai dari Koordinator Kabupaten hingga kecamatan, dan sampai kaki-kakinya di tingkat dusun. Berangkat dari pengalaman saya di tahun 2004, maka saya menjadi lebih galak di tahun 2009. Saya tidak ingin suara saya dicuri. Saya merasa sudah bekerja keras, saya mendedikasikan waktu selama kurang lebih sembilan bulan untuk berjuang dalam pemilihan umum. Saya banyak belajar dari FES, NDI, dan lain sebagainya yang kemudian saya aplikasikan di lapangan.

Kemudian, untuk modal ekonomi, saya beruntung, sekali lagi dan mengapa ini menjadi penting di dalam struktur karena dibantu oleh partai sehingga lebih mudah. Saya sendiri dibantu oleh ketua umum, ketua pemenangan pemilu, para simpatisan.

Bahkan, uang sendiri mungkin malah tidak ada. *Networking* menjadi penting karena saat tertentu kita membutuhkan baik dana, referensi dan lain sebagainya.

Saya mengklasifikasikan pemilihan menjadi tiga segmen, yakni pemula, perempuan dan umum. Pemilihan pemula saya garap pertama kali dengan membuat komitmen politik. Saya bersyukur karena mempunyai latar belakang sebagai aktivis peduli perempuan, narkoba, HIV/AIDS, reproduksi perempuan, dan seks bebas. Ini memudahkan saat masuk ke anak-anak kelas 3 SMA. Saya minta tim sukses masuk ke sekolah-sekolah dan dinas pendidikan untuk mengumpulkan siswa sekolah tanpa menyebutkan untuk kepentingan kampanye dengan menawarkan kemampuan saya dalam advokasi korban narkoba dll. Demikian juga untuk kalangan mahasiswa.

Segmen kedua adalah perempuan. Di sini, saya senang sekali karena bisa memberikan pendidikan politik. Saya merasa puas karena tidak menjual apa-apa. Mereka merasa kagum dan terkesan karena mendapatkan pendidikan politik, misalnya, di majelis taklim saya tidak bicara agama karena memang itu bukan bidang saya, tetapi memberikan pemahaman mengapa ibu-ibu perlu mendukung caleg perempuan. Ini membuat mereka tersentuh.

Segmen umum sangat cair dan tergantung kebutuhan di setiap kabupaten. Misalnya di Bekasi, isunya tentang industri, sedangkan di Karawang isunya tentang pertanian dan nelayan. Masalah buruh industri kebanyakan adalah *outsourcing*. Dalam kasus ini, saya melihat tidak hanya dari sisi buruh yang menginginkan *outsourcing* dihapuskan, tetapi juga dari sisi pengusaha. Untuk itu, saya akan mendorong pemda untuk membuat perda yang mengatur agar para buruh kontrak dapat diangkat men-

jadi pegawai tetap dengan, misalnya, masa kerja sekian tahun. Dalam hal ini, saya berusaha melihat persoalan tersebut dari perspektif lokal karena tidak semua perspektif nasional bisa diimplementasikan di tingkat lokal.

Untuk atribut, saya bersandarkan pada prinsip apa, kapan dan untuk siapa. Untuk pemilihan pemula, misalnya, saya memberikan notebook dan pulpen yang tertera tulisan website saya www.nurularifin.com. Untuk ibu-ibu, saya memberikan payung (ketika musim hujan, dan menjadi paling favorit bagi ibu-ibu dan juga paling mahal), jilbab (ada sekitar 15 rb) dengan tertera kenang-kenangan dari Nurul Arifin, dan sajadah. Untuk bapak-bapak, saya memberikan korek api. Untuk struktur partai, saya memberikan jaket dan rompi, sedangkan kaos saya berikan untuk umum.

Kampanye selama 9 bulan merupakan waktu yang lama. Buat saya yang belum menjadi anggota DPR bukan masalah, tetapi bagi teman-teman yang sudah ada di DPR, mereka harus sering meninggalkan tugas. Untuk dana dan tenaga, tidak menjadi masalah yang cukup serius, tetapi yang paling sulit adalah menjaga psikologi dan emosi konstituen karena sewaktu-waktu bisa berubah. Oleh karena itu, menurut saya, waktu kampanye 9 bulan terlalu lama, saya kira 3 bulan sudah cukup.

Pertanyaan berikutnya adalah setelah menjadi anggota DPR apa yang akan saya lakukan? Nah, untuk hal ini, saya memilih untuk meninggalkan komisi tradisional perempuan karena dengan jumlah 100 perempuan di parlemen pasti orientasinya sebagian besar pasti ke situ. Oleh karena itu, ketika partai menanyakan komisi apa yang akan saya pilih dengan mantap saya katakan komisi II. Ini tidak berarti bahwa komisi perempuan tidak penting, tetapi komisi II berkenaan dengan politik dalam negeri, otonomi daerah. Saya merasa



prihatin berkenaan dengan implementasi otonomi daerah sekarang ini. Di negara maju, semangatnya adalah merger, tetapi di sini pemekaran. Nah, saya tertarik terhadap persoalan ini dan karenanya saya akan memperjuangkannya di komisi II.

Binny Buchori (Caleg Partai GOLKAR)

Pertanyaan mas Ivan menarik, "Mengapa Mbak Binny tidak menang?" Tadi, Nurul Arifin memberikan 3 prasyarat untuk menang, yaitu modal sosial, modal politik dan modal ekonomi. Dari ketiga syarat tersebut, saya memiliki kurang dari 60%. Ini tentu saja berbeda dengan Nurul Arifin yang secara keseluruhan memiliki lebih dari 60%. Yang pertama, saya sepakat bahwa modal ekonomi itu penting tetapi bukan segala-galanya karena ada hal lain yang harus dipersiapkan, misalnya, modal sosial. Saya memiliki jaringan LSM, keluarga dan teman-teman lama, sebagai modal sosial. Namun, ternyata ini tidak cukup untuk memenangkan pemilu di Bantul, Yogyakarta yang DPT-nya 2,5 juta dengan BPP 250 ribu. Saya kira betul yang dikemukakan Nurul bahwa apabila bukan anggota struktur partai maka kita akan mendapatkan kesulitan untuk menggunakan seluruh mesin partai.

Yang kedua, seperti dikatakan

Dani, ketika ada gerakan perempuan yang secara sistematis merencanakan agar perempuan menjadi anggota DPR dengan mendorong para perempuan masuk partai politik, ternyata saya tidak termasuk ke dalam kelompok gerakan itu. Saya masuk partai bukan didorong oleh gerakan perempuan, tetapi oleh teman-teman yang bukan kelompok perempuan, seperti di Prakarsa, beberapa jaringan luar Jawa, di Jogja, dan juga Makasar. Mereka melobi Golkar, sedangkan Nurul melobi dari dalam sehingga saya mendapatkan dapil di Jogja dengan nomor bagus (2) setelah sebelumnya berpindah-pindah. Saya pikir kalau kondisinya berjalan normal maka dengan cara lama saya bisa masuk, tetapi ternyata tidak. Di sini, saya ingin memberikan masukan kepada kelompok perempuan bahwa ternyata kerjanya belum sistematis. Ketika 2004 membuat *list* daftar perempuan yang hendak dimasukkan ke partai politik saya merasa tidak ada *approach*, bahkan diundang untuk ikut diskusi pun saya tidak sehingga jangan heran jika *list* perempuan yang ada di DPR belum seperti yang kita inginkan. Dengan modal yang terbatas seperti ini, saya merasa kesulitan masuk menjadi anggota DPR. Sama seperti Nurul, modal ekonomi saya juga lebih banyak dari sumbangan-sumbangan. *Fund riser*

yang paling bagus adalah KOMPAS. Ketika saya diberitakan di halaman pertama bahwa saya telah jatuh melarat, maka banyak orang menyumbang. Modal ekonomi yang terbatas menimbulkan kesulitan dalam merancang model kampanye.

Saya juga telah membagi pemilih menjadi 3 bagian, yaitu *grass root*, kelas menengah ke atas dan perempuan. Ketika saya menggarap *voters*, saya hanya bisa menggarap di tingkat *grass root* karena biayanya paling murah. Saya mendapat bantuan dari struktur partai dari kabupaten sampai kecamatan sehingga bisa melakukan sosialisasi *door to door*. Kelemahan cara ini adalah semua caleg menggunakan cara yang sama. Selain itu, saya juga terlena tidak menggarap *swing voter* yang ada di kelas menengah ke atas, yang sebenarnya sudah diingatkan oleh Bang Amir dari awal bahwa saya cocok menggarap *voters* ini. Saya telah membuat diskusi dengan dibantu oleh Mas Arie Sujito dengan mengundang Gusti Hemas untuk menjadi *keynote speaker*. Namun, karena *timing*-nya tidak tepat maka diskusi tersebut lebih dianggap sebagai kampanye sehingga media hanya mengutip Mas Ari, sedangkan calegnya sama sekali tidak dikutip. Pada detik-detik akhir, saya mendapat bantuan dari mantan aktivis 98 yang sudah biasa bolak-balik Jakarta-Jogja dengan ide brilian, yaitu mencetak kembali wawancara saya di Kompas tahun 2004 sebanyak satu halaman dengan jumlah hanya 6 ribu (seharusnya 250 ribu) karena ketiadaan dana. Penyebarannya pun hanya dititipkan ke agen koran dan ternyata banyak yang nyasar, termasuk akhirnya dibaca oleh kawan-kawan lama saya. Akibatnya, saya mendapat tawaran untuk tampil di TV lokal Jogja dengan harga sangat diskon selama setengah jam. Akhirnya, kesalahan lainnya adalah saya tidak merancang kampanye secara

sistematis karena keterbatasan tenaga yang berpengalaman.

Faktor lainnya saya tidak mengenal faktor kompetisi antarcaleg dalam satu partai. Ternyata kompetisi internal tersebut berlangsung sangat keras. Bahkan, saya sempat putus asa karena sulitnya masuk dalam satu kecamatan. Saya beruntung mendapatkan bantuan jilbab dari Nurul dan ternyata betul-betul laris untuk Ibu-ibu. Saya juga beruntung mendapat bantuan dari FES untuk membuat tiga kali *training* tentang manajemen pemilu dan kerja sama dengan Jangkep Jogja, Prakarsa dan pers untuk mengadakan *training* tentang *voters education* yang isinya adalah bagaimana menjembatani *voters* seperti cara mencontreng, dan bagaimana seharusnya memilih seperti melihat apa program caleg, program partai dan kebijakan partai. Ternyata, ini mampu mendongkrak suara.

Strategi saya lebih banyak sosialisasi, *workshop*, dan beberapa kali *talkshow* di radio lokal. Seandainya saya merancang dengan baik dengan *primetime detail*, saya yakin perolehan suaranya akan jauh lebih baik dari perolehan sekarang. Suara saya 10 ribu (masih jauh dibanding perolehan Gandung 75 ribu) dengan persebaran yang baik bahkan ada yang berasal dari satu wilayah yang belum pernah saya masuki. Hasil yang mengecewakan justru di wilayah Kota Jogja. Padahal, kami fokus di wilayah ini selama 3 bulan. Ini dikarenakan terlalu banyaknya yang bermain di kota. Jadi, tampaknya saya salah dalam melakukan pemetaan karena hanya memfokuskan diri pada kantong-kantong Golkar saja, dan tidak mencoba daerah lain yang bukan kantong Golkar. Mesin-mesin politik saya tidak begitu rapi, misalnya, ketika detik-detik terakhir senior-senior Golkar merasa tidak diaruhke.

Mesin suara yang besar berasal dari jaringan Katholik karena saya

menggunakan posisi sebagai Ketua Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Dengan dibantu oleh pihak Gereja, suara di Gunung Kidul menjadi paling banyak. Mereka hanya meminta agar saya berjanji untuk menjadikan forum kerja sama umat beragama menjadi pluralis dengan meminta Golkar dan Yusuf Kalla memperjuangkannya melalui revisi SK Gubernur.

Terakhir, menjawab pertanyaan Ivan apakah caleg-caleg perempuan mempunyai program? Jawabannya saya jelas. *Platform* saya adalah sosial demokrat, *social policy*. Oleh karena itu, saya mengkampanyekan adanya undang-undang sistem jaminan sosial nasional yang telah diundangkan atas prakarsa PDIP dan Golkar pada tahun 2004. Di kalangan *grass root*, misalnya, saya hendak memperjuangkan jamkesmas. Akhirnya, bagi saya, perempuan berpolitik mempunyai tujuan, yang pertama membuat representasi dan yang kedua membuat perubahan. Oleh karena itu, tawaran saya adalah marilah perempuan membuat agenda bersama dengan membuat koalisi perempuan di parlemen. Kita mengajukan kebijakan sosial dengan target yang *achievable*, misalnya, bagaimana membuat kebijakan menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Satu kebijakan ini saja maka akan mempunyai implikasi yang luas, seperti memperbanyak rasio bidan desa, persalinan yang ditangani tenaga medis, nutrisi, posyandu dll.

Ivan A. Hadar

Mbak Rieke silahkan. Apakah selain populer ada faktor lain, hamil, misalnya.

Rieke Dyah Pitaloka (Caleg PDIP)

Merdeka!!! Saya senang sekali bisa hadir di sini malam ini. Rekam jejak pemilu 2004 di Dapil saya Jawa

Barat II, meliputi Kab Bandung dan Bandung Barat, satu Dapil dengan Tere, terdiri dari 43 kecamatan sebelum pemekaran menjadi 46 kecamatan. PDIP perolehan kursinya sama antara 2004 dan 2009, yaitu 2 kursi. Perolehan suara saya di Kab. Bandung 52.174. Total suara saya di Jabar II adalah 80.681 jauh di bawah Mbak Nurul Arifin.

Sebelumnya, saya berada di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketika itu, Dapil saya di Bogor, dan waktu itu saya mengalami masa tidak enak sebagaimana dialami Mbak Nurul. Dapil saya sebelumnya di Surabaya, tetapi kemudian dipindahkan, saya disuruh milih, Karawang atau Bogor. Dua-duanya bukan basis. Di Karawang, ada Mbak Nurul dan beliau sudah bekerja lama. Oleh karena itu, saya memilih Bogor dan tetap menerima tawaran tersebut. Saya mendapatkan nomor cukup keren, yakni No. Urut 1. Namun, sekali lagi, di sana, bukan merupakan basis partai. Nah, ini menjadi pelajaran untuk masa datang bahwa basis partai harus diperhitungkan tidak hanya sekedar memperoleh nomor urut yang bagus.

Di Jabar II, saya satu dapil dengan Dewan Pertimbangan Pusat DP PDIP. Nah, ketika sistem suara terbanyak, dan saya tahu ini konsekuensi yang harus saya alami dan ketika sistem didasarkan pada suara terbanyak maka mau tidak mau ada ikon-ikon partai yang harus "diselamatkan". Jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap partai. Oleh karena itu, akhirnya kita membuat kesepakatan untuk daerah basis sebagai ikon partai, tetapi seringkali hal ini tidak dipahami oleh struktur partai di tingkat bawah. Akibatnya, mereka melakukan intimidasi terhadap "ibu hamil" ini. Jadi, saya ternyata tidak diperbolehkan bergerak di daerah manapun tidak hanya di daerah basis. Atribut juga banyak yang rusak sehingga kadang saya

berfikir tidak perlu membuat baliho. Oleh karena itu, saya harus mempunyai strategi yang berbeda dengan Mbak Nurul karena bagaimanapun wilayah tersebut bukan merupakan dapil saya di tahun 2004 sehingga saya mengalami perjumpaan dengan masyarakat baru dan belum mengenal saya secara langsung. Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Jika saya menggunakan metode yang sama dengan yang dilakukan Mbak Nurul, terlebih saingan yang saya hadapi berat-berat, terlebih secara ekonomi juga tidak begitu besar. Selain satu dapil dengan Dewan Pertimbangan Pusat, saya juga harus bertarung dengan anaknya Agung Laksono, Gi nanjar, kemudian ada Ibu Ajeng yang merupakan bekas ketua DPD Jabar dari Demokrat dan juga dari PPP yang merupakan bekas seorang gubernur. Jadi, sudahlah istrinya tukang bajaj tidak akan sanggup bersaing dengan mereka. Namun, saya pikir tidak bisa menyerah seperti itu karena justru saya tertantang. Dalam hal ini, menurut saya, sebenarnya militansi itu merupakan modal utama ketika kita terjun ke dalam dunia politik. Kebetulan, saya juga menemukan tim sukses yang mempunyai pemikiran sama dengan saya. Lucunya lagi, tim sukses saya sebelumnya yang di Bogor pada tahun 2004 orang PDIP dan pada waktu bersamaan menjadi caleg di propinsi. Nah, karena saya mencalonkan lagi maka ia menjadi tim sukses saya dan dia bilang, "Sekarang harus berhasil karena saya malu jika dua kali menjadi tim sukses gagal". Oleh karena itu, ia meninggalkan daerah pemilihannya semata untuk membantu saya sebagai tim sukses.

Akhirnya, kita membuat tim sukses, melakukan perencanaan, membuat jaringan relawan, saksi, dan lain sebagainya sama dengan yang lain. Namun yang jelas, kita tidak menggunakan struktur partai. Kita juga

tidak menggunakan tokoh masyarakat. Jadi, kami menyadari betul bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana mengunjungi secara langsung konstituen. Ada perjumpaan persuasif dengan konstituen, *person by person*. Ada orang bilang, "Lo.. enak, artis". Meskipun sebenarnya tidak juga seperti itu. Meskipun artis, tetapi jika kita tidak turun langsung ke masyarakat maka hasilnya juga akan sangat beda. Ini dapat kita lihat dari tempat-tempat yang tidak kita datangi maka hasil suaranya jelek atau bahkan hancur.

Jadi, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan semua orang yang menjadi tim sukses kita. Setiap waktu adalah saat yang tepat untuk melakukan kampanye, baik siang maupun malam, hujan maupun panas. Pokoknya setiap saat merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye. Setiap Moment adalah Politis, dan Setiap Orang adalah Target Suara.

Saya tinggal di Kota Bandung karena sedang hamil sehingga jika terjadi sesuatu dengan kandungan saya maka akan lebih dekat ke rumah sakit. Saya beruntung karena di kompleks tersebut selalu lewat pedagang-pedagang seperti tukang susu, tukang bubur, tukang gas, dan

sebagainya. Setiap pedagang yang lewat tersebut selalu kita tanya dimana dan dari mana asalnya. Dengan cara demikian, maka saya mendapatkan suara 80 ribu tanpa melakukan *money politics*.

Pemilu merupakan pasar uang. Artinya, di sini, ada pragmatisme pasar. Ada banyak orang bilang, "Setidaknya ngasih kerudung atuh. Masak kerudung aja nggak ngasih?". Ada banyak caleg yang memberikan kaos, mie instant, dan sebagainya. Kemudian, saya bilang, "Jika ada ca-

Setiap waktu adalah saat yang tepat untuk melakukan kampanye, baik siang maupun malam, hujan maupun panas. Pokoknya setiap saat merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye. Setiap moment adalah politis, dan setiap orang adalah target suara.



leg yang datang dengan membawa mie instan maka sebenarnya ia bukan ingin menjadi anggota dewan karena bukan tugas dewan, tetapi mau menjadi tukang bakso". Oleh karena itu, saya bilang lagi ke mereka, "Jangan dipilih ya Bu!". "Oh, iya bener", jawab mereka.

Bagi sebagian politisi, dukungan harus dibeli. Sementara bagi masyarakat, untuk mendapatkan dukungan, kita juga harus membeli. Jadi, klop sebetulnya. Namun, saya pernah bilang dan pernah juga dimuat di Kompas, "Ada yang namanya politisi busuk, yang melakukan korupsi, skandal seks, dan lain sebagainya. Namun, ada juga pemilih busuk". Nah, kepada Ibu-Ibu, saya bilang, "Mau ndak Ibu-Ibu dibilang sebagai pemilih busuk?". Mereka jawab, "Tidak!". Oleh karena itu, "pilih saya", dan akhirnya mereka memilih saya juga.

Cara lainnya, karena setiap moment adalah politis, maka setiap ada acara kawinan saya datang. Mereka senang karena ada artis dan saya menyanyikan satu lagu tanpa harus

membayar. Kemudian, saya bilang kepada mereka pada acara tersebut, "Ini bukan masa kampanye lho. Jangan bilang-bilang saya caleg ya. Jangan bilang saya caleg nomor 2 dari PDIP untuk pusat ya". Dengan cara demikian, Panwas yang tadinya mungkin mau menangkap saya jadi mengurungkan niatnya karena saya bilang terus-terang seperti itu. Selain orang kawinan, saya juga mendatangi orang yang meninggal, dan keluarganya yang sedang berduka cita. Saya melayat. Pokoknya semua orang adalah target suara, dan ternyata sekarang terbukti karena orang yang meninggal pun mempunyai hak pilih.

Metode dasar dalam kampanye sebenarnya ada dua menurut pandangan kami, yakni politik uang dan membangun opini publik yang positif. Politik uang jelas kita tolak. Nah, yang kita lakukan adalah membangun opini publik yang positif meskipun hal ini sulit. Namun, kita harus melakukan dengan cara menyampaikan pandangan-pandangan kita atau program-program kita me-

lalui, tentu saja, bahasa mereka.

Sebagai contoh, jika dilihat dari basis massanya, maka sebenarnya wilayah tersebut merupakan basis Golkar. Saya datang rumah-rumah, kampung-kampung, dan dalam satu hari bisa mencapai 9 titik yang kita datangi. Maksimal dua kecamatan karena jaraknya yang jauh. Di wilayah-wilayah tersebut, saya menyampaikan dampak buruk jika kita salah memilih orang. Saya tidak mengkampanyekan diri saya secara langsung terlebih dahulu. Namun, pertama kali yang saya sampaikan adalah keadaan kita sekarang ini dimana banyak korupsi, dewan bekerja dengan tidak benar, sebenarnya

Rieke Dyah Pitaloka

Rieke Dyah Pitaloka atau lebih dikenal sebagai Oneng karena perannya dalam sitkom komedi Bajaj Bajuri lahir di Garut, 9 Januari 1974. Ia menamatkan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Filsafat Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Tesisnya kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku dengan judul *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*. Selain artis, ia juga seorang aktivis. Bahkan, ia pernah dipanggil polisi karena kegiatannya sebagai aktivis tersebut. Setelah masuk ke dalam dunia politik dan lolos dalam pemilihan legislatif 2009, Rieke Dyah Pitaloka sangat ingin sekali masuk ke komisi IX. Apa sebenarnya motivasi terbesarnya hingga sangat menginginkan masuk ke komisi IX? "Hidup adalah komitmen", itu menurutnya. Jika ternyata tidak jadi ke komisi IX, maka apa komitmen berikutnya?



terjadi karena kesalahan kita dalam memilih caleg. Alhamdulillah, mereka mengerti. Saya juga menyampaikan bahaya politik uang. Saya mengatakan kepada mereka, "Jika caleg mengeluarkan modal terlalu banyak, maka siapa tahu jika uangnya berasal dari utang. Oleh karena itu, jika ia menjadi anggota dewan, maka ia tidak akan melaksanakan fungsinya sebagai anggota dewan, tetapi pertama yang ia lakukan adalah membayar utang". Kemudian, melalui dialog semacam itu saya masukkan juga apakah sebenarnya tugas anggota dewan, yakni melakukan legislasi, *controlling*, *budgeting*, dan lain sebagainya. Dari sini, saya mengambil pelajaran bahwa selama ini ternyata kita salah persepsi bahwa masyarakat tidak cukup melek politik. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang kritis. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Persoalannya memang selama ini terjadi pembiasaan-pembiasaan negatif di masyarakat.

Terakhir, mengenai persoalan ekonomi. Kita mendengarkan apa yang mereka keluhkan seperti minyak naik, beras naik, dan lain sebagainya. Jadi, mereka kita biarkan curhat sehingga akan merasa senang bertemu dengan kita. Selain itu, tentu saja, yang tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama dengan caleg lokal. Ini penting karena pengetahuan kita tentang daerah tersebut tidak akan sedetil mereka. Dari 7 orang *partner* saya, 5 diantaranya menjadi lolos sebagai anggota dewan. Saya katakan kepada mereka bahwa koalisi atau kerja sama ini berjangka panjang.

Akhirnya, saya ingin mengatakan sebagaimana sering ditanyakan banyak orang bahwa artis, popularitas adalah penting ketika kita hendak masuk ke dalam dunia politik karena jika tidak, maka tidak mungkin orang capek-capek membuat baliho dengan baju superman. Namun, saya ingin mengatakan bahwa popularitas

bukanlah satu-satunya. Saya teringat pada apa yang pernah dikatakan oleh Pierre Bourdeau bahwa pemilu merupakan arena sosial. Ada empat faktor yang menentukan keberhasilan seseorang yang hendak masuk ke dalam arena tersebut, yakni kapital sosial, kapital budaya, kapital ekonomi, dan kapital simbolik. Jika dikatakan bahwa kami yang berasal dari kalangan artis ini yang mungkin tidak seperti Mbak Nurul yang berproses dalam partai politik, tetapi jangan dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai modal tersebut. Kami mempunyai modal sosial dan kapital budaya. Bagi seorang politisi, ini juga merupakan modal yang cara memperolehnya tidaklah mudah. Kurang lebih 15 tahun saya berada dalam proses orang mengenal saya, Mbak Nurul mungkin lebih lama lagi, dan juga Tere. Menurut saya, itu merupakan sebuah pencapaian yang patut dihargai. Jika kami boleh meminta, maka agar perolehan suara artis tidak dipersoalkan lagi. Sebaliknya, yang paling penting menurut kami adalah bagaimana kawan-kawan bisa membantu kami untuk mempersiapkan diri agar bisa bekerja secara maksimal di dewan. Saya kira itu saja, terima kasih.

Ivan A. Hadar

Berikutnya Mbak Lilis, silahkan.

Lilis (Caleg PKS)

Assalamu'alaikum wr..wb. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan meskipun nasib saya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Mbak Binny, yakni belum menang. Jadi, *sharing* pengalaman yang belum menang. Saya berangkat menjadi caleg bukan dari struktur atau kader partai (PKS). Namun, dari Serikat Pekerja Nasional (SPN). Saya caleg dari Dapil Banten II daerah pemilihan Cilegon, Serang Kota dan Kabupaten. Kompetitor saya dari internal partai sendiri adalah seorang calon guber-

nur Banten, sedangkan kompetitor yang lain adalah keluarga besar Gubernur Banten. Seperti tadi dikemukakan Mbak Binny, saya berangkat menjadi caleg tanpa modal uang, sedangkan modal sosial barangkali saya mempunyai walaupun tidak banyak. Anggota SPN yang di sana sekitar 55 ribu orang, yang tadinya jumlah yang cukup besar ini kita andalkan sebagai voters. Saya juga mempunyai jaringan keluarga karena kebetulan saya juga orang Banten asli, Pandeglang dan dulu sekolah di Serang. Oleh karena itu, teman-teman saya di Serang cukup banyak dan rata-rata sudah menjadi pejabat di Banten.

Strategi yang digunakan saya kira tidak berbeda jauh dengan yang tadi sudah disampaikan di awal. Oleh karena ketiadaan finansial yang kurang memadai, maka kita harus bekerja keras siang dan malam. Bahkan, karena yang ingin kita jangkau adalah pemilih maka kita bekerja malam hari, mulai pukul 17.00-malam. Kita pernah juga pulang hingga pukul 3 pagi.

Kesulitan yang kita hadapi adalah karena sebagian besar konstituen kurang mempunyai pemahaman politik. Jadi, kita melakukan pendidikan politik mengenai, misalnya, pentingnya mereka mempunyai wakil di DPR kepada para buruh. Kemudian, saya juga mengajukan pertanyaan, "Selama ini, siapa yang Anda dukung? Apakah dari kader Partai?" Selama menjadi buruh, siapakah yang memperjuangkan hak-hak Anda? Maka, saya sarankan agar pilihlah orang yang berasal dari serikat buruh, dan saya adalah calegnya.

Di sana, kita juga diminta untuk melakukan kontrak politik dengan buruh. Mereka meminta agar, jika saya jadi, didirikan lembaga advokasi gratis di Serang, dan saya menyanggupi. Mereka juga menuntut adanya lembaga pendidikan yang tidak hanya untuk buruh, tetapi juga masyara-

kat. Mereka mengatakan, "Sebagai masyarakat kami tidak neko-nekok Bu, kami hanya menginginkan diberi kail". Saya bertemu dengan sekelompok masyarakat di Ciomas yang terdiri dari anak-anak muda yang mendirikan SMK, tetapi tidak seperti SMK menurut versi pemerintah. SMK yang didirikan berorientasi menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka sudah meluluskan tiga angkatan, dan dari ketiga angkatan tersebut lima orang diterima di Perguruan Tinggi terkenal, termasuk diantaranya diterima di UGM. Nah, saya tertarik dengan program mereka. Hanya saja, mereka juga meminta kepada saya untuk melakukan kontrak politik agar membantu dalam pengembangan pendidikan yang telah mereka rintis seperti penyediaan tenaga pendidikan, kurikulum, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan.

Kesulitan lain yang kita hadapi adalah karena bukan berasal dari struktur partai maka struktur partai yang ada tidak berpihak kepada kita. Hanya saja, saya diberi nasehat oleh orang tua saya di Pandeglang agar tidak usah cemas atau kuatir karena kita ingin menang. Sebaliknya, yang kuatir adalah orang-orang yang takut kalah. Jadi, saya jalan terus dengan modal yang saya punya.

Meskipun saya tidak menang, tetapi keikutsertaan saya di Pemilu Legislatif 2009 memberikan banyak pelajaran. Saya mempunyai pemetaan mengenai masyarakat pemilih, termasuk pemetaan di masyarakat buruh.

Ada satu hal yang membuat saya agak prihatin atau sedih, terutama dalam komunitas kita sendiri, yakni kaum buruh. Mungkin karena kehidupan mereka masih agak susah sehingga membuatnya lebih pragmatis. Selama tiga bulan saya menjelaskan banyak, tetapi suara mereka dapat berubah pada detik-detik terakhir. Suara mereka dapat berubah

dengan cepat karena serangan wajar. Padahal, saya sudah menjelaskan perbandingan upah minimum di Serang dari 2008/2009 bisa naik Rp. 100.000,00 dan saya terlibat dalam memperjuangkan hal tersebut, tetapi prestasi semacam itu bisa lewat begitu saja oleh uang Rp. 10.000. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi sangat penting diberikan kepada konstituen jika kawan-kawan buruh ingin mempunyai wakil di lembaga legislatif maka kerjanya tidak boleh hanya menjelang pemilu. Namun, lima tahun harus memberikan pendidikan politik secara terus-menerus, terutama kepada masyarakat atau buruh tentang pentingnya mereka berpolitik.

Demikian *sharing* saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Suara yang saya dapatkan kurang lebih 10.000, dan sebagai orang yang baru belajar saya kira itu cukup.

Ivan A. Hadar

Terima kasih Mbak Lilis. Sekarang, kita dengar pengalaman yang juga menang dalam pemilihan umum legislatif kemarin, Mbak Tere. Silahkan!

Tere (Caleg Partai Demokrat)

Assalamu'laikum, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, ijin saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nurul Arifin yang telah mengajak saya untuk datang ke diskusi ini. Mudah-mudahan, ke depan, saya akan terus mendapatkan ilmu-ilmu dari rekan-rekan sekalian, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk orang-orang yang sudah menitipkan aspirasinya melalui saya.

Mengenai pengalaman saya selama kampanye, termasuk strategi yang saya gunakan, sebenarnya dapat dibilang saya tidak pernah berkampanye karena saya lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh kabi-

net selama ini. Langkah ini saya lakukan karena posisi Partai Demokrat yang mendukung kebijakan pemerintah. Inilah yang saya komunikasikan kepada konstituen, dan itupun tidak seluruh titik.

Idealismelah sebenarnya mendorong saya untuk masuk ke partai politik. Idealisme, yang menurut saya, belum tersalurkan melalui medium berkesenian. Selain itu, niatan saya untuk masuk partai adalah untuk menguji apakah demokrasi di Indonesia masih merupakan demokrasi transaksional? Saya masuk kampus tahun 1998 sehingga masih memendam semangat idealisme untuk masa depan Indonesia yang hingga saat ini belum tersalurkan.

Inti cerita, pada saat sosialisasi berlangsung, saya hanya mengandalkan modal sosial yang saya miliki sebagai seorang musisi, dan memanfaatkan network keluarga karena kebetulan suami saya berasal dari Bandung. Meskipun saya dari Garut, tetapi keluarga banyak yang tersebar di Bandung dan sekitarnya. Selebihnya, saya menggunakan pendekatan personal, sekali lagi memanfaatkan modal sosial yang saya miliki sebagai seorang musisi dengan bekerja sama dengan media-media yang, menurut saya, bisa menciptakan opini publik yang positif kepada saya.

Keberadaan saya di Demokrat sebenarnya berasal dari kegiatan non-struktural, Forum Seniman Perempuan yang digagas oleh Ingrid Tansil, Vena Melinda, dan dr Sonia Wibisono dan lain sebagainya. Forum ini digagas April 2008, dan tidak lama kemudian ada penjangkaran untuk caleg perempuan sebagai usaha optimasi 30% sehingga semuanya dihimbau untuk masuk sebagai caleg perempuan dari Partai Demokrat.

Untuk support dari Partai Politik sendiri, mungkin lebih besar dari value Pak SBY yang sangat powerful. Nah, saya merasa kultus selebritis

masih sangat besar di masyarakat. Bahkan, Pak SBY juga demikian. Jika saya ke daerah dan melakukan sosialisasi dengan atribut partai warna biru dengan membawa nama SBY, maka sebagian besar masyarakat akan sangat *welcome* ke kita. Menurut saya, ini sudah menjadi titik yang baik buat saya untuk masuk ke konstituen meskipun titik yang kita sasar terbatas hanya sebanyak 21 titik untuk berdiskusi langsung dengan konstituen. Meskipun dalam diskusi tersebut, sekali lagi, saya hanya menjelaskan program-program pro-rakyat yang sudah kami dukung sebagai partai pendukung pemerintah. Selain itu, saya juga menyampaikan fungsi-fungsi lembaga-lembaga tinggi negara serta bagaimana seharusnya kita menggunakan hak pilih. Bagaimanapun surat suara yang sangat besar tersebut cukup menyulitkan bagi masyarakat yang kurang terdidik karena untuk membukanya saja setengah mati susah. Apalagi jumlahnya sebanyak 4 buah.

Saya percaya apa yang sudah terjadi ini merupakan skenario dari yang di atas karena sebenarnya saya tidak mempunyai ekspektasi apapun kecuali untuk menguji demokrasi di Indonesia, diri saya sendiri, dan konstituen. Dengan modal kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,-, dengan mengandalkan *networking* keluarga, teman-teman musisi dan fans saya, dan kurang lebih 6000 atribut parpol berupa kaos dan 10.000 kalender bergambar SBY ternyata hasilnya cukup signifikan. Perolehan suara terakhir yang saya tahu, dan itupun dari relawan karena saya tidak menyediakan saksi sama sekali ada sekitar 21 ribu. Sekali lagi, saya yakin bahwa keberadaan saya di sini merupakan bagian dari skenario yang di atas. Oleh karena itu, saya ingin sekali bisa benar-benar bersinergi secara positif untuk apapun yang akan terjadi pada masa datang. Saya kira itu, dan terima kasih.

Ivan A. Hadar

Terima kasih Mbak Tere. Nah, tadi kita sudah mendengar banyak pengalaman dari partai nasional. Sekarang, bagaimana jika kita mendengar dari partai lokal, Aceh. Silahkan Mbak Reihan.

Raihana (Partai Rakyat Aceh)

Terima kasih. Selamat malam, Assalamu'alaikum wr.wb. Saya mengucapkan terima kasih kepada FES karena telah mengundang saya walaupun saya berasal dari caleg gagal dan partai yang mungkin gagal pula. Menarik sekali diskusinya. Sudah banyak hal yang tadi telah disampaikan oleh para caleg. Oleh karena itu, saya malah bingung dengan apa yang kami alami. Beberapa yang telah disampaikan oleh para caleg tadi agar terpilih sudah kami lakukan di Aceh. Namun kenyataannya, tetap tidak terpilih juga sehingga ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai apa yang sebenarnya terjadi?;



T E R E

Theresia Ebenna Ezeria Pardede atau yang lebih dikenal sebagai tERE lahir di Jakarta, 2 September 1979. Selalu menekankan bahwa ia seniman, bukan selebritas. Mengawali karir di dunia musik sebagai penyanyi latar, dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu dengan lirik yang berkarakter, yang hingga kini tetap konsisten di jalur musik.

Kepada Tempo, ia pernah berujar, "saya pekerja seni, bagi saya seni itu politik dan politik itu seni." Menurutnya, seni dan politik lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia, sehingga keduanya saling berkai-

tan dan diperlukan. Dengan demikian seharusnya wajar jika artis atau para pekerja seni terjun ke dunia politik dan tidak perlu muncul pandangan diskriminatif terhadap kemampuan politik mereka.

Musisi dengan empat album ini akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik dengan membawa sejumlah idealisme. Yang utama adalah memperjuangkan pendidikan karakter generasi muda, terutama anak dan perempuan, sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa ini. Nah, seperti apakah idealisme itu ia wujudkan nantinya? Dan, kelak apa yang akan dilakukannya di parlemen?

dan tampaknya pertanyaan ini tidak akan terjawab. Barangkali, untuk menggambarkan hal ini, ungkapan yang paling pas adalah jika dulu ada tsunami di Aceh, maka sekarang ada tsunami politik di Aceh.

Dari apa yang telah dipaparkan tadi, saya setuju bahwa perempuan harus lebih melakukan intervensi kebijakan-kebijakan dan berada di dalam struktur partai, dan saya berada dalam posisi tersebut. Saya telah terlibat semenjak dari pendirian Partai Rakyat Aceh (partai lokal pertama di Aceh, kongres pembentukan pengurus partai, bahkan saya berada dalam posisi cukup strategis di Dewan Pimpinan Pusat). Bila dilihat dari daerah pemilihannya, saya pikir saya memilih dapil yang cukup strategis, yaitu dapil Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, yang struktur sosial masyarakatnya heterogen dan sudah lebih rasional sehingga untuk partai baru yang mengedepankan kampanye program, bukan hal-hal lain, seharusnya tepat. Kami yakin sekali di dapil tersebut akan mendapatkan banyak suara. Ini karena, misalnya, kalau menggunakan money politics, maka masyarakat di daerah perkotaan berpandangan untuk mengambil uangnya, tetapi tidak memilih orangnya. Kemudian, jika ada caleg yang hanya memberikan janji-janji saja, maka janji-janji tersebut akan didengarkan, tetapi tidak akan dipilih.

Dilihat dari nomor urut, memang, saya berada di nomor urut 2, sedangkan yang di nomor urut 1 bukan berasal dari struktur partai, tetapi dalam pandangan partai itu bukan masalah. Dilihat dari strategi, kami sudah melakukan baik strategi atas maupun bawah. Strategi atas seperti pemasangan baliho, media, on air radio, dll sudah kami lakukan. Saya juga hampir selalu mewakili partai setiap mengadakan kegiatan di dapil, baik on air TV, radio, maupun koran. Itu bisa saya lakukan karena berada di

dalam struktur partai sehingga bisa mempengaruhi kebijakan partai. Dengan demikian, untuk masyarakat pemilih rasional, kampanye seperti itu seharusnya lebih menggigit. Kampanye bawah, seperti yang disampaikan Rieke, dengan berkolaborasi dengan caleg lokal di tingkat DPRK, saya juga lakukan. Strategi ini ternyata juga dapat menekan biaya karena dilihat dari aspek modal ekonomi saya masih kurang dibandingkan dengan caleg-caleg incumbent.

Kami juga melakukan sosialisasi dengan melibatkan struktur partai. Sosialisasi bersama caleg-caleg di DPRK sangat intensif kita lakukan sehingga tidak ada alasan untuk tidak terpilih. Mas Ari, barangkali, nanti bisa menjelaskannya. Bahkan, kami mempunyai terobosan menarik yang tidak dilakukan oleh partai lain, yaitu melakukan kontrak politik. Partai Rakyat Aceh melakukan kontrak politik dengan menandatangani tiga tuntutan rakyat Aceh, yaitu lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan yang gratis dan berkualitas, dan berdaulat atas sumber daya alamnya, yang dijelaskan dengan investasi yang saling menguntungkan. Kontrak politik itu ditandatangani oleh ketua dan sekjen partai lalu disebar. Bahkan, dalam kontrak politik tersebut, dicantumkan kalau setelah kami terpilih dan menguasai mayoritas parlemen kontrak tersebut tidak kami lakukan dalam rentang waktu tiga tahun maka kami akan mundur. Disamping itu, partai juga membuka peluang kontrak politik langsung antara caleg dengan satu kelompok masyarakat tertentu. Bagi saya, kontrak politik ini merupakan sesuatu yang sangat menggigit di masyarakat karena hal itu tidak dilakukan oleh partai lain.

Menariknya lagi, partai kami adalah partai lokal yang tidak lolos electoral threshold meskipun electoral threshold lokal besarnya hanya 5%. Perolehan partai kami hanya

1,98% atau sekitar 37 ribu pemilih. Dari 6 partai lokal, hanya partai Aceh yang lolos electoral threshold. Gubernur Aceh berasal dari Partai Aceh, sedangkan wakil gubernurnya justru dari partai SIRA. Seharusnya, seperti halnya Partai Demokrat yang menang karena faktor presiden SBY, tetapi di Aceh hal tersebut tidak berlaku. Di Kota Sabang, misalnya, walikota dan wakilnya dari SIRA, biasanya apabila suatu daerah pemimpinnya ada afiliasi dengan partai tertentu, maka partai tersebut pasti dapat kursi meskipun hanya satu. Namun, di Kota Sabang, Partai SIRA tidak mendapatkan kursi meski hanya satu, justru Demokrat mendapat 7 kursi DPR RI, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil pemilu legislatif di Aceh adalah sebagai berikut. Peraih suara terbanyak adalah Partai Aceh dengan 33%, peringkat kedua Partai Demokrat, sedangkan Golkar berada di bawahnya. Padahal, sebagaimana kita tahu, JK mempunyai peran penting dalam perdamaian di Aceh.

Selanjutnya, dari hasil pemilu caleg tersebut, jika kita lihat caleg perempuannya, maka dari 69 kursi DPRA hanya 4 perempuan, yaitu 3 dari Golkar dan 1 dari PAN. Mereka berada pada nomor urut satu pada pileg kemarin, sedangkan DPRK belum ada data yang pasti. Di Partai Aceh, memang tidak ada caleg perempuan yang berada di nomor urut satu, mereka biasanya berada di nomor urut sepatu seperti nomor 5, 7 dan tidak memenuhi kuota 30%. Biasanya, nomor urut 1-3 ditempati panglima wilayah, yang memang berjasa dalam perjuangan. Perjuangan perempuan seperti yang disampaikan Mbak Dani tadi, menurut kami, di Aceh memang masih banyak yang perlu diperbaiki lagi, dan saya senang berada di dalamnya. Kalau kami jujur, untuk memenuhi kuota



30% perempuan, perempuan di Aceh belum siap. Padahal seharusnya, perempuan mempunyai kesempatan luas untuk mengambil dan mengintervensi ruang tersebut dalam partai lokal melalui proses pendirian partai, pencalegan dll. Saya ingat database yang dibuat oleh UI bahwa ada banyak potensi perempuan untuk menjadi caleg, tetapi setelah ditawarkan ternyata aktivis perempuannya tidak ada yang mau. PRA bahkan menawarkan nomor urut jadi. Saya telah janjikan hal itu, tetapi tidak ada yang mau. Saya pikir ada masalah pada wacana partisan-nonpartisan yang masih menjadi mindset para aktivis perempuan.

Anda bisa membayangkan bahwa pascatsunami ada milyaran bantuan untuk pendampingan pemberdayaan perempuan, yang seharusnya bisa diarahkan untuk memilih para aktivis perempuan yang telah terbukti terlibat dalam program tersebut. Memang ada training-training yang dilakukan oleh aktivis perempuan, tetapi ini bukan bagian dari skenario bersama. Sebaliknya, ia hanya sebatas program funding sehingga tidak mampu memperkuat peran perempuan di parlemen.

Penguatan peran perempuan lainnya, misalnya, lembaga perempuan yang seharusnya bisa mem-

bantu para caleg perempuan dalam menyusun materi kampanye atau menjadi tim sukses juga tidak ada meskipun mereka seringkali berasal dari kelompok dampingan lembaga tersebut. Situasinya menjadi lebih sulit ketika kita mengharapkan peran lebih lagi, misalnya, menginstruksikan untuk memilih caleg tertentu.

Itu yang bisa saya sampaikan lebih dulu. Kondisi di Aceh mungkin memang membutuhkan diskusi yang lebih panjang. Kemenangan PA dan Demokrat memang luar biasa, Mas Ari dan yang lainnya yang pernah ke Aceh pasti tahu hal itu. Doakan saja saya masih bisa ikut pemilu tahun 2014. Jika tidak, maka mungkin tawaran Mbak Nurul akan saya pertimbangkan.

YULIA (PBR)

Mestinya, tadi Nurul dan Rieke dipisah, Nurul di awal, sedangkan Rieke penutupnya. Sekarang ini, penutupnya yang gagal semua.

Saya maju dari dapil Lampung 1. Seperti pada semua partai, pada saat penggodogan pencalegan berlangsung sengit, sebanyak 375 dari kami masuk ke PBR untuk bertarung menjadi anggota legislatif. Dita Sari bertarung di dapil Jawa Tengah 5, saya di Lampung 1, dan beberapa teman lainnya. Semua itu bisa kita

lewati dengan mendapatkan nomor urut yang bagus. Bahkan di Jawa, PBR memberikan nomor urut 1 pada kita, termasuk di Lampung, yang notabene PBR bagus. Saya mendapat nomor urut 3, sedangkan beberapa teman di DPRD dapat nomor urut 1 dan 2. Metode yang sudah kami lakukan sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman tadi. Hanya saja, ada satu persoalan yang dihadapi semua aktivis, yaitu ekonomi. Kalau masalah advokasi atau pendampingan, PRD pernah melakukannya.

Hampir setiap hari, kami melakukan advokasi orang sakit. Semua caleg DPRD di sana pekerjaannya mengantarkan orang sakit ke rumah sakit secara gratis. Memang, biaya berobatnya gratis melalui programnya SBY. Makanya, saya senang dengan Ibu Fadilah Supari yang membuat program Jamkesmas. Kita menghadapi keterbatasan finansial. Oleh karena itu, kita harus kreatif seperti yang disampaikan Rieke tadi.

Pekerjaan kita adalah mengantar orang sakit dengan tingkat penyakit yang berat-berat, seperti kanker, katarak dll. Ini kami lakukan dengan membuka posko. Kami juga melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten. Saya suka sosialisasi di kabupaten karena lebih bisa diterima. Saya ma-



sih muda sehingga lebih mudah diterima dibandingkan caleg DPR RI lainnya. Memang, kami tidak memang baliho yang besar-besar, tetapi ketua umum telah membantu dengan kartu nama dan stiker. Saya juga bekerja sama dengan puluhan caleg DPRD sehingga rasanya optimis sekali. Dari satu kecamatan, kira-kira ada 10 orang sakit yang kami bantu. Harapan kami setidaknya-tidaknya dari 10 orang yang kita bantu, dia punya 2-3 saudara. Namun, setelah pemilihan, dari 10 orang yang telah kita bantu ternyata hanya 6-7 orang yang memberikan suaranya pada kami. Bahkan, ada satu orang yang dalam proses penyembuhan justru menjadi saksi partainya Rieke. Itu nylekit (menyakitkan, red.) banget.

Setelah penghitungan suara DPR, kami shock mendapatkan jumlah suara yang begitu kecil. Bayangkan, ada dapil-dapil yang caleg Demokrat tidak masuk sama sekali karena basisnya Golkar dan PDIP, tetapi menang luar biasa. Suara calegnya sedikit, tetapi suara partainya besar sekali. Sebenarnya, seperti yang disampaikan Reihan tadi, kami sudah melakukan semua metode, bahkan metode yang tidak dilakukan oleh parlai besar dan caleg yang kuat finansialnya

dengan naik turun gunung. Dalam sehari, kami bisa naik turun gunung sampai 8 kali di 2 kecamatan dengan naik motor. Hasilnya, memang mengherankan. Sebelumnya, PBR bersama Papernas mempunyai beberapa kursi di DPRD propinsi dan kabupaten bahkan bisa membuat satu fraksi, tetapi setelah kami bergabung malah tidak mendapatkan kursi DPRD propinsi sama sekali.

Untuk biaya, paling banyak untuk transportasi karena harus sewa motor, sedangkan konsumsi biasanya hanya snack ringan. Meskipun demikian, pengalaman berharga saya adalah terkadang dibantu oleh orang di sana karena melihat saya masih muda, tetapi mau berjuang di politik dengan cara yang berbeda dari yang lain. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya, saya juga masih bingung teori apa yang bisa kita gunakan untuk menganalisis kegagalan tersebut. Selain itu, sesuatu yang, menurut saya, di luar prediksi adalah, dari yang saya dengar, aktivis yang masuk hanya Budiman Sujatmiko, Rieke dan Mbak Nurul, sedangkan aktivis lainnya gagal. Lebih-lebih, aktivis perempuannya. Demikian juga dengan aktivis serikat buruh. Nah, kenyataan ini benar-benar amazing/

luar biasa dan benar-benar membuat saya bingung meskipun tidak sampai gila. Terima kasih teman-teman.

Ivan A. Hadar

Sebelum dialog, ada tidak tebersit pikiran, misalnya, seperti salah milih partai?

Yulia

Sebenarnya, kalau dilihat dari perolehan suara partai, memang suara perolehan partai sedikit, suaranya lebih banyak disumbang oleh caleg. Di Palu, misalnya, seharusnya calegnya lolos, tetapi karena partai tidak lolos 2,5% sehingga calegnya tidak lolos juga. Barangkali, Partai Islam juga bisa menjadi salah satu sebab karena isu Islam sudah lewat.

Ivan A. Hadar

Pertanyaan saya sebenarnya menjebak karena dengan demikian partai tidak terlalu penting dan ideologi juga demikian. Barangkali, program juga tidak terlalu penting sehingga kita sebenarnya masih berkutat di seputar urusan kuantitas atau jumlah, menang-kalah. Jika tadi Partai Rakyat Aceh sudah menawarkan begitu banyak program, tetapi rakyat tidak percaya. Oleh karena itu, tidak mungkin menjadi partai pemenang.

Raihana

Masalahnya hampir sebagian besar polling baik yang dilakukan oleh Uni Eropa maupun survei manapun hasilnya hampir selalu mengatakan bahwa akan didominasi oleh PA, sedangkan PRA hampir senantiasa menduduki peringkat kedua atau ketiga dari aspek popularitas. Nah, komposisinya jika tidak PA, PRA, dan kemudian SiRA, atau PA, SIRA dan PRA. Anehnya, kita tidak mendapatkan satupun kursi di DPRD.

Ivan A. Hadar

Baik! Silahkan jika teman-teman

masih ada yang mau berbicara. Dari pihak perempuan, barangkali, jika ada yang ditawarkan menjadi caleg, tetapi tidak bersedia?

Desy (PBR)

Assalamu'alaikum. Saya berasal dari Serikat Pekerja, sama dengan Mbak Lilis dan satu partai dengan Mbak Yulia, satu Dapil dengan Mbak Dita. Kebetulan juga saya caleg nomor 2.

Ada hal yang sangat menyedihkan sebenarnya, menurut saya, dari Serikat Pekerja, tidak ada satupun caleg yang lolos dalam pemilu kemarin. Ketua Umum SPN juga tidak lolos, dan menurut saya itu sangat tragis. Mohammad Iqbal yang juga sangat kita harapkan ternyata juga tidak lolos. Dita Sari, awalnya, kita sangat optimis. Namun, dalam perkembangannya, ternyata ia juga tidak lolos. Pada H-3, Dita masuk ke peringkat ketiga berada di bawah Hidayat Nur Wahid. H-1 Dita masuk ke peringkat keenam menurut polling Solo Pos. Saya dengan Dita telah melakukan empat kali kontrak politik. Diantara kontrak politik yang telah kami lakukan adalah kontrak pelanggaran dengan pelanggaran HAM, Kontrak Politik dengan Wanita Katholik Solo, bahkan kami juga melakukan kontrak politik dengan teman-teman Serikat Pekerja DPC Boyolali, Sragen, dan Klaten. Dengan usaha-usaha semacam itu, kami sangat optimis. Hitung-hitungan di atas kertas kami yakin akan mendapatkan setidaknya satu kursi. Namun, kenyataannya, dari laporan para relawan, Dita hanya mendapatkan suara sekitar 20 ribuan jika ditabulasi 8 ribuan. Jika tadi Reihan bingung dengan hasil yang mereka capai, maka demikian juga dengan kami. Hingga saat ini, kami belum mengetahui dimanakah letak kesalahannya. Bahkan, banyak kawan-kawan dan saya juga terjun langsung melakukan advokasi pada

teman-teman buruh yang terkena PHK. Kita juga bekerja sama dengan pengusahanya. Sosialisasi di perusahaan kami lakukan. Kemudian, jika tadi kata Mbak Yulia kita melakukan advokasi ke para petani, itu juga kami lakukan karena kebetulan di Dapil V mengalami kelangkaan pupuk, yakni di daerah Sukoharjo. Itu langsung kami lakukan dengan kawan-kawan petani. Sementara itu, di Solo, kami melakukan advokasi dengan kaum miskin kota dengan memperjuangkan kesehatan gratisnya. Biasanya, orang-orang ini dipersulit dan kita melakukan advokasi untuk itu.

Nah, jika tadi teman-teman shock mendapati hasil-hasil yang tidak terduga, maka kami juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Kebingungan kami adalah apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat kita? Kita menjanjikan revisi undang-undang untuk penghapusan outsourcing, tetapi kog tidak mau? Nah, mungkin, evaluasi kita adalah pada pendidikan politik yang mungkin kurang. Itu barangkali pengalaman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan diskusi kali ini.

Ivan A. Hadar

Silahkan Mas Jito sebagai analisis politik.

Arie Sujito

Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat, baik yang menang ataupun belum. Perlu dicatat bahwa saya mengikuti pencontrengan dalam pemilu kemarin, dan ketiga-tiganya saya memilih caleg perempuan meskipun yang menang hanya satu. Saya kira ini merupakan cerita yang menarik, dan sekaligus menjadi pengalaman yang berharga. Dalam hal ini, saya akan memberikan komentar beberapa hal saja. Pertama, sebagian besar orang yakin bahwa pemilu legislatif kemarin membuat banyak orang sulit un-

tuk melakukan prediksi karena sebagian besar strategi yang digunakan aktivis ataupun para politisi termasuk perempuan tidak berbasis pada realitas apakah pemilih sudah mengalami perubahan karakter ataukah belum? Kondisi ini sama persis yang diceritakan oleh Reihan tadi bahwa strategi yang sama belum tentu efektif untuk daerah yang berbeda. Nah, ini menjadi bahan yang berharga karena jika tantangannya seperti ini lantas apa yang harus kita kerjakan? Oleh karena itu, dalam pemahaman saya, bagi aktivis perempuan, untuk mempersiapkan diri sejak awal. Ini karena, menurut saya, politisi kita selayaknya seorang pelari sprinter. Mereka akan lari kencang 100 m, dan kemudian istirahat. Saya yakin bahwa setelah pemilu para politisi akan istirahat semua. Padahal idealnya, berpolitik seperti seorang pelari marathon.

Jadi, idealnya kita harus menjadi pelari marathon. Namun, bagi perempuan, ini harus dilihat sebagai sebuah tantangan awal, dan bukannya sesuatu yang harus menurunkan semangat mereka. Apalagi jika hal ini dilihat dalam konteks Aceh karena, menurut saya, wacana perempuan untuk terlibat ke dalam politik tantangannya lebih berat dibandingkan dengan di daerah lain. Nah, sebetulnya, yang tidak diduga adalah di Aceh tidak ada partai yang mendapatkan kursi selain partai lokal Aceh. Namun, jika perempuan di Aceh mendapatkan sedikit kursi, maka menurut saya bebannya masih sangat berat. Ini terjadi, menurut analisis saya, trauma konflik yang terjadi di sana masih sangat besar. Oleh karena itu, resistensinya masih sangat tinggi. Di Aceh, partainya barangkali lokal, tetapi presidennya memilih SBY.

Nah, saya ingin melanjutkan ke aspek yang kedua. Jika, misalnya, pemetaan dari struktur masyarakat tidak tepat, maka strategi yang digunakan akan sangat mungkin juga

tidak akan tepat. Nah, ini terjadi karena ketika para aktivis masuk ke dalam arena pertandingan, maka akan muncul kecenderungan dia mengabsorpsi model-model yang selama ini sudah berkembang. Faktanya, banyak orang mengatakan bahwa pemilu 2009 diliputi oleh kesalahan analisis yang dilakukan oleh kelas menengah apakah dalam pemilu 2009 karakter masyarakat sudah mengalami perubahan ataukah belum. Oleh karena itu, jika kita hendak mengatakan apakah masyarakat rasional ataukah tidak, maka ukurannya tidak semata-mata itu. Ini karena pertanyaannya kemudian adalah rasional dalam hal apa? Demikian juga pemilih tradisional, pertanyaannya tradisional dalam hal apa?

Sebagai contoh penting, ini sekedar cerita. Sebelum pemilu, di tempat kami ada rapat RT. Kemudian, karena mereka tahu saya sering komentar di tv, koran, dan lain sebagainya, maka pertanyaan yang muncul adalah: "Mas saya besok kira-kira milih apa?". Menurut saya, itu merupakan sesuatu yang ironis karena kampanye sudah dilakukan selama 9 bulan, dan mereka tidak tersentuh sama sekali. Dengan demikian, jika teman-teman aktivis tetap mengikuti model kontestasi melalui baliho dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh cara-cara kelas atas, padahal instrumen tersebut sebenarnya hanya efektif untuk kelompok-kelompok atas, sedangkan grassroot tidak tersentuh maka besar kemungkinan akan mengalami kegagalan. Kasus Mbak Binny adalah salah satu contoh dimana sebenarnya saya sudah membantu habis-habisan, tetapi tidak berhasil. Menurut saya, ini terjadi karena teman-teman melakukan persiapan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, singkatnya saja, saya mengusulkan agar teman-teman aktivis perempuan harus segera menyiapkan diri pascapilpres ini untuk pemilihan umum berikutnya. Tentu

saja, tetap harus menganalisis karakter pemilih atau masyarakat, dan jangan menggunakan teori-teori yang berasal dari atas karena kondisinya akan sangat berbeda-beda. Apa yang dilakukan oleh Mbak Rieke maupun Mbak Nurul sangat dipengaruhi oleh realitas yang terjadi di tingkat masyarakat. Nah, akibatnya, apa yang sudah dilakukan Mbak Rieke belum tentu cocok untuk diterapkan di tempat Mbak Nurul. Satu hal lagi yang perlu dicatat bahwa sekarang ini ikatan antara caleg dengan partai politik rendah karena sebagian besar struktur partai tidak membantu caleg. Jika ini tidak dibenahi, maka caleg perempuan juga akan kalang kabut. Dalam kasus Yogyakarta, secara kultural, masyarakatnya adalah kolektivitas, dan individualisme sebenarnya merupakan imajinasi kelas menengah menyangkut konsep rasionalitas tadi. Oleh karena itu, kita harus menarik ulang dengan cara mengembangkan kembali kolektivitas, dan kemudian mengisinya dengan pendidikan politik. Dengan demikian, menurut saya, sosdem akan hidup subur jika kolektivitas juga hidup subur di Indonesia. Dalam pilpres nanti, orang-orang yang memilih PDIP, misalnya, belum tentu akan memilih Megawati karena loyalitas antar caleg dengan capres sangat berbeda. Nah, gejala ini yang juga harus kita perhatikan dengan baik. Untuk itu, mari kita buat roadmap jika perempuan ingin tampil ke depan dengan optimisme. Peta perubahan dan arena-arena mana saja yang bisa dikerjakan oleh perempuan. Sekali lagi, selamat buang yang menang dan yang belum menang, dan masih banyak peluang untuk itu. Kemarin, saya memberikan training untuk PRA dan partai-partai lain, dan saya heran betul karena ternyata partai yang menang yang PA. Namun, saya tidak akan menggunakan teori konspirasi karena, menurut saya, tidak menarik. Sebaliknya, saya per-

nah mengkritik PRA agar melakukan check terhadap alat politiknya seperti mahasiswa, petani, dan lain sebagainya. Terima kasih.

Amir Effendi Siregar (Jurnal Sosdem)

Ini merupakan masukan menarik, dan saya ingin memberikan beberapa masukan saja, termasuk untuk Aceh. Angka golput masih sangat tinggi, sekitar 30-40%. Suatu sikap politik yang belum menentukan sikap politik tertentu karena berbagai alasan. Nah, jika kita perhatikan, maka orang-orang yang terlibat dalam pemilu pada umumnya masih merupakan bentukan-bentukan lama. Artinya, partai-partai lama yang secara tradisional yang mempunyai suara. Bahkan, partainya Laksma Sukardi belum mampu berbicara banyak. Demikian juga dengan partai pecahannya PAN juga tidak mampu berbuat banyak. Oleh karena itu, tidak perlu diratapi. Nah, yang perlu kita sadari adalah mengapa, misalnya, PAN bisa muncul pada waktu itu karenanya sebetulnya ia mempunyai momentum. Termasuk di dalamnya, PKS. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah mencari terobosan-terobosan baru atau mendekati partai-partai besar.

Dalam pemahaman saya, strategi-strategi yang bersifat teoritis sebagaimana telah dikemukakan tadi tidaklah cukup. Dalam kaitan ini, diperlukan terobosan-terobosan baru. Betul dikatakan oleh Ari tadi bahwa karakter pemilih ataupun mindset pemilih harus tetap menjadi perhatian karena mereka masih berada dalam pola-pola lama meskipun kita tahu bahwa 40% yang belum memilih atau golput tetap harus menjadi lahan garapan.

Sementara itu, untuk Aceh, polarisasi "Partai GAM" dan "Partai Pemerintah" masih terjadi karena partai lokal juga masih baru. Oleh



karena itu, usulan saya adalah langkah konvensional tidaklah cukup, tetapi harus ada terobosan-terobosan, menciptakan momentum, dan tampak bahwa uang ternyata bukan segala-galanya. Demokrat, misalnya, yang tidak tampil hingga ke level bawah bisa meraih suara yang cukup signifikan. Ini berarti bahwa ada efek pengaruh SBY sebagai pembina demokrat yang juga lahir karena momentum juga. Saya kira itu tambahan saja. Terima kasih.

Rita Olivia Tambunan (TURC)

Mungkin pertanyaan kritis saya adalah mengenai, yang tadi sering disebut-sebut, modal sosial. Beberapa teman yang masuk dan berhasil sering menyebutkan mengenai modal sosial yang mereka miliki.

Namun, menurut saya, perlu ada pertanyaan kritis apa sebenarnya yang dimaksud dengan modal sosial itu? Ini karena, menurut saya, apa yang mereka miliki sebenarnya bukan modal sosial, tetapi lebih pada modal popularitas. Menurut saya, ini lebih pas atau jelas. Dalam konteks ini, jika kita hendak membahas modal sosial dari individu itu sendiri karena, Tere, misalnya, mengatakan

bahwa modal sosial lebih dari, saya kira, ikatan-ikatan patron dari partai yang memang menguntungkan.

Nah, di sisi lain, sebagaimana dikatakan oleh Ibu Yulia, modal ekonomi barangkali menjadi faktor kegagalan yang berusaha masuk melalui LSM dan aktivis. Dengan demikian, apakah kita bisa mengatakan modal sosial sedemikian menentukan? Barangkali, dalam situasi sekarang, lebih penting adalah membahas kontrol sosial dibandingkan dengan modal sosial. Jadi, kontrol sosial apa yang dimiliki oleh teman-teman, mereka mengatakan dirinya mengandalkan modal sosial bisa memastikan konstituen tetap bisa percaya kepada teman-teman, dimana saya agak meragukan mengenai hal ini.

Dalam diskusi di FES, saya pernah mengatakan bahwa jika harus memilih, maka saya akan memilih Ormas karena lebih terlatih untuk melawan kontrol dan oligarkhi dari organisasinya sendiri meskipun tetap ada egosime diri dan oligarkhi, tetapi tetap lebih terlatih dalam melakukan kontrol. Dalam situasi semacam ini, menurut saya, yang perlu diomongin dan lebih mendapatkan perhatian dari teman-teman aktivis perempuan

di parlemen adalah soal kontrol sosial, yakni seberapa kuat teman-teman di parlemen mampu memelihara hubungan dengan konstituen. Nah, mohon maaf saya sedikit meragukan hal ini karena sebagaimana tadi disampaikan Mbak Nurul bahwa waktu 9 bulan itu waktu yang cukup lama. Idealnya, menurut dia, 3 bulan sudah cukup. Dari sini, lantas, muncul pertanyaan apa yang kemudian kira-kira akan dikerjakan? Kedua, bagaimana teman-teman mampu mengelaborasi isu-isu yang begitu besar seperti representasi perempuan dengan bahasa lebih faktual dalam isu yang lebih elaboratif. Misalnya, tadi yang dikemukakan Mbak Binny dalam hal penurunan angka kematian ibu saya kira lebih masuk akal dibandingkan dengan membahas affirmative action yang 30% tadi. Jadi, ada dua pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan, yakni mengenai kontrol sosial, dan bagaimana mengelaborasi isu dan membumikan discourse ke dalam sesuatu yang konkret.

Irene H Gayatri (Peneliti LIPI)

Terima kasih kepada Mbak Mian, teman-teman FES, dan para caleg. Sebuah kehormatan bagi saya bisa bertatap muka secara langsung dengan caleg-caleg perempuan, baik yang sukses maupun belum. Saya ingin memperhatikan sesuatu yang tampaknya lepas dari diskusi mengenai strategi logistik dan opinion making dari para caleg.

Menurut saya, ada pertanyaan mendasar mengapa seseorang matimatian masuk ke dalam partai politik dan mempertemukan dirinya dengan massa? Jika kita berbicara politik pemilu di Indonesia, maka sebenarnya ada mass educated dengan swinging voters atau swinging mass. Nah, persoalannya kemudian ada caleg dari middle class educated yang terlatih berbicara di depan forum dan mempunyai pendidikan tinggi. Se-

mentara di sisi lain, ada caleg yang tidak mempunyai kualitas pendidikan tinggi, tetapi memang mempunyai militansi, idealisme, dan mengetahui apa yang seharusnya disampaikan kepada publik.

Sistem politik di Indonesia tidak mengizinkan orang untuk mempunyai strata knowledge, membangun kapasitas pengetahuan dan juga logistik yang sama besarnya sehingga mempunyai equal opportunity to be elected. Bahkan, untuk memilih pun baru sekitar 49 juta oleh karena berbagai faktor. Oleh karena itu, menurut saya, caleg perlu memperhatikan selain dua persoalan tadi, yakni mass educated dan swinging voters maka caleg perlu memperhatikan apa yang tadi disampaikan oleh teman saya yang dari kalangan buruh, yakni berkenaan dengan kontrak politik. Ini karena, menurut saya, modal sosial tidak cukup karena popularitas kita sebagai, misalnya, seorang artis tentu mempunyai batasan waktu. Demikian juga seberapa lama kita akan populer menjadi politisi kawakan? Namun, orang awam akan menanti janji kita ketika kita sudah berada di kursi dewan. Oleh karena itu, dalam konteks filosofi demokrasi, maka keberadaan seseorang tidak ditentukan oleh seks. Sebagai contoh, Swedia, misalnya, pada tahun 1993, sudah 50% untuk party list. Beberapa tahun kemudian, dengan green party, socialist party, dan sebagainya mereka sudah bergerak ke arah isu-isu yang tidak hanya sekedar primordial, melainkan isu-isu sektoral. Menurut saya, ini perlu diagendakan oleh caleg-caleg perempuan dari partai manapun untuk menjadi pegangan ketika mereka duduk dalam kursi dewan sebab isu perempuan mestinya dijadikan isu publik juga.

Barangkali, perjuangan jangka pendek untuk sekarang ini adalah adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan

prinsip utama demokrasi. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana caleg-caleg perempuan yang sudah duduk dalam lembaga legislatif mulai mensikronkan isu-isu yang tadinya milik perempuan menjadi milik warga negara (citizen). Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Puji Rianto (Jurnal Sosdem)

Baik terima kasih. Sekarang ini, dalam literatur-literatur komunikasi politik, muncul apa yang sering disebut sebagai politik televisual. Persoalan yang muncul dalam model politik semacam ini adalah citra menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan substansi demokrasi sehingga kritik yang muncul dalam kaitan ini adalah adanya pendangkalan demokrasi. Kemudian, dalam model politik televisual semacam itu, peran media massa terutama televisi menjadi sangat besar. Ini karena media televisial yang mempunyai kemampuan paling besar untuk membangun citra seorang kandidat. Kondisi inilah, barangkali, yang bisa menjelaskan mengapa Tere bisa menang jauh lebih mudah dengan mengandalkan Demokrat dan popularitas dan tentu saja citra SBY. Saya sendiri tidak membayangkan bahwa Demokrat akan menang sebesar itu mengingat kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nota bene didukung penuh oleh Demokrat ini tidak begitu ramah dengan rakyat. Kenaikan BBM menjadi salah satu contohnya. Partai Demokrat, saya kira juga menjadi salah satu partai yang paling mampu menggunakan media untuk mendongkrak popularitas dan citra.

Kemudian, oleh karena citra menjadi penting maka modal yang dikeluarkan juga menjadi lebih besar. Partai-partai politik dan juga caleg harus mengeluarkan uang milyaran rupiah untuk beriklan di tv dan menjaga agar

senantiasa mendapatkan exposure di media. Dalam situasi semacam ini, maka menjadi sulit bagi para aktivis perempuan yang tidak mempunyai cukup modal untuk bertarung dalam kancah politik sebagaimana tadi telah dikemukakan di awal.

Nah, lantas, apa yang harus kita lakukan dalam situasi semacam ini? Jelas bagi aktivis yang mempunyai modal kurang tidak mungkin mengekspose dirinya melalui media secara besar-besaran untuk mendongkrak citra karena memerlukan dana yang relatif besar pula. Oleh karena itu, mengembangkan media-media alternatif barangkali bisa menjadi jawaban untuk menutup kekurangan modal. Media-media alternatif ini harus dikembangkan sebagai media komunikasi antara caleg dengan konstituennya, melalui yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arie Sujito, yakni adanya perencanaan jangka panjang. Dengan demikian, ada kontinuitas hubungan pesan antara caleg dengan konstituen sehingga proses pendidikan politik dan penanaman kesadaran akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak seperti yang tadi juga telah dibilang oleh Mas Ari seperti pelari sprinter.

Mengenai modal sosial, tampaknya, saya sepakat dengan kritik yang tadi diajukan oleh Mbak Rita. Jika kita merujuk pada Francis Fukuyama, maka inti modal sosial adalah trust atau kepercayaan karena melalui hal inilah masyarakat bisa berjalan. Pertanyaan dasarnya kemudian apakah artis yang dipilih oleh konstituen tadi memang lebih dipercaya dibandingkan dengan caleg lain ataukah lebih karena popularitasnya. Saya kira ini memerlukan diskusi lebih jauh. Dengan kata lain, ada sebuah pertanyaan mendasar, dan menurut saya ini merupakan tantangan caleg-caleg yang berasal dari artis, yakni kepercayaan atau popularitaskah yang membuat mereka dipilih oleh kon-

stituen? Meskipun demikian, jika caleg yang berasal dari artis ini mampu menunjukkan kinerja yang bagus, maka tidak menutup kemungkinan modal popularitas tadi akan menjadi modal sosial. Mudah-mudahan saja. Terima kasih.

Lely Zailani (Partai Perserikatan Rakyat)

Terima kasih. Nah, saya hendak bercerita mengenai buku yang dibagikan kepada bapak/ibu sekalian. Di halaman 50, buku tersebut bercerita tentang salah seorang kader dari Partai Perserikatan Rakyat yang mengikuti proses pencalegan. Namun, karena bukunya terbit Desember sehingga prosesnya belum selesai. Lantas, jika diajukan pertanyaan bagaimana akhir ceritanya, maka jawabannya ya tidak lolos atau dengan kata lain tidak mendapatkan kursi di legislatif.

Kemarin, PPR mengikuti seleksi untuk mengikuti pendaftaran menjadi partai politik, tetapi tidak lolos verifikasi. Berkenaan dengan hal ini, maka pertanyaan apa yang akan dilakukan oleh PPR setelah tidak lolos verifikasi?

Dalam diskusi ini, saya menemukan suatu kesimpulan bahwa ketika topiknya adalah gerakan politik perempuan, maka saya hendak mengatakan bahwa gerakan perempuan memang belum masuk ke dalam gerakan politik. Meskipun sudah masuk ke dalam berbagai ragam gerakan, tetapi belum masuk secara sadar dan sistematis membangun gerakan politik perempuan. Sebaliknya, yang terjadi, menurut saya, baru sekedar gerak-gerik politik. Namun, sekali lagi, belum menjadi sebuah gerakan politik. Itu catatan saya yang pertama. Catatan yang kedua, saya ingin merekam perjalanan kami. Pada bulan Juni 2008, di Jakarta, kami mengadakan pendidikan kepemimpinan perempuan dan kami membahas



apakah kita akan terus ataukah berhenti setelah PPR tidak lolos verifikasi? Keputusannya adalah terus. Nah, persoalannya kemudian bagaimana harus meneruskan perjuangan tersebut dimana kami harus bersimbah air mata karena untuk melanjutkan perjuangan tersebut kami harus menjadi caleg dari partai lain. Ini karena teman-teman yang ketika memutuskan untuk menjadi partai politik pun harus menghadapi tantangan dari teman-teman sendiri dalam gerakan perempuan. Setelah memutuskan untuk menjadi caleg, lantas partai

mana yang akan kita tuju? Kami sudah mendengar desas-desus bahwa untuk menjadi caleg nomor urut 1, misalnya, sekian juta, sedangkan kita tidak menginginkan nomor urut sepatu.

Catatan ketiga, setelah kami memutuskan untuk menjadi caleg maka diantara teman-teman lantas muncul resistensi, "Tapi jangan aku yaa. Tolong jangan aku". Ini karena selama bertahun-tahun kita berjuang untuk mendirikan partai politik tidak rela untuk menjadi caleg dari partai lain. Kemudian, setelah ditentukan

si A yang maju menjadi caleg, maka saratnya tidak dikeluarkan dari PPR. Permintaan tersebut kami sepakati karena ini hanyalah sebuah taktik karena politik bukankah juga sebuah taktik menang-kalah.

Pada bulan Juli, kami melakukan pemetaan sederhana terhadap bagaimana pandangan politik perempuan yang berada di desa karena PPR berada di kampung-kampung. Hasilnya, menunjukkan bahwa, secara umum, perempuan siap berpolitik. Alasannya, sudah ada gender di kampung-kampung tersebut meskipun ketika kami ajukan pertanyaan kepada mereka, "Apakah itu gender?", maka jawabannya, "Tidak tahu Bu. Pokoknya jika ada istri camat datang ke sini maka di bilang gender." Mereka juga mengetahui jika ada kuota. Oleh karena itu, mereka mengatakan harus ikut dalam politik, yakni terlibat dalam pemilihan umum.

Jadi, mereka pada dasarnya cukup melek politik. Lantas, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan dicalonkan mengingat basis kita perempuan? Mereka mengusulkan calon yang berasal dari kita sendiri, dan pada bulan Juli terdaftar kurang lebih 313 jumlah anggota. Kemudian, kita check di DPT dan tercatat sebanyak enam ribu pemilih yang harus kita cari dengan modal yang hanya sebanyak 313 orang.

Pada bulan Agustus-September-Oktober, dari 315 orang anggota, kami berhasil merekrut 30 orang kader yang sudah dididik menjadi tim pemenang dari 2 kecamatan, 16 desa, dan 20 kelompok. Namun, bulan November dari 30 kader perempuan yang ada melorot menjadi hanya 14 orang karena tidak sanggup menjadi tim pemenang caleg. Mereka bilang bahwa ketika mereka sudah mendapatkan konstituen dan belum pernah didatangi caleg, maka mereka telpon, "Bu, ini ada konstituen dan belum pernah didatangi caleg, tapi

aku ngomongnya macam mana?". Inilah problem yang saya hadapi, yakni kelemahan sumber daya manusia. Mereka mengetahui dan sadar politik, tetapi persoalannya adalah bagaimana mengajak orang atau konstituen untuk mendukung caleg yang kita bawa. Kondisinya sangat berbeda dengan kaum laki-laki yang jauh lebih mampu untuk mengajak konstituen.

Pada bulan Januari, kami menghitung dari dua kecamatan (ini satu dapil), 16 desa dengan 20 kelompok maka pada bulan tersebut jumlah anggota menjadi kurang lebih 1000 anggota kelompok. Jumlah ini berasal dari kelompok dimana setiap kelompok memiliki 13 pengurus dan 20 anggota sehingga totalnya adalah 1320 orang. Padahal, jumlah yang harus kita kumpulkan 6 ribu maka pada bulan tersebut kami mengadakan rapat internal dan kesimpulannya adalah kita kalah. Tentu saja, kami tidak mungkin mengatakan kita kalah kepada 14 orang tersebut.

Pada bulan April 2009, kita mendapatkan suara sah sebanyak kurang lebih 800 dan yang tidak memilih sebanyak kurang lebih 400 yang tidak tercatat di DPT. 10 orang batal, dan 21 pindah ke lain hati. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ternyata mereka bisa dipercaya, bisa diajari dengan begitu rumitnya sistem pemilihan atau pencontrengan, dan hanya 10 suara yang batal atau salah dan hanya 21 orang yang pindah ke lain hati.

Kemudian, jika dilihat dari nomor urut partai, maka bisa jadi kami salah pilih partai. Ini karena dari 800 suara yang kita dapatkan hanya berasal dari caleg, sedangkan partainya tidak satupun yang memilih. Partai yang kami pilih kebetulan Partai Demokrasi Kebangsaan. Barangkali, kami juga lalai di DPT karena kami baru mengetahui dari 400 orang yang tidak mendapatkan DPT tersebut dua hari

sebelum pencontrengan. Kelalaian kami berikutnya adalah kami lupa menjelaskan bahwa yang termasuk suara terbanyak adalah partai dan bukan orang. Akibatnya, meskipun kami mempunyai suara caleg terbesar, tetapi yang lolos caleg lain. Oleh karena itu, ada banyak suara diantara kami jika demikian maka mengapa kita tidak memilih Golkar saja karena meskipun calegnya tidur sekalipun maka mendapatkan 6000 ribu suara. Jadi, memang, tampaknya kita salah memilih partai.

Nah, kelemahan kita ketika berbicara mengenai gerakan perempuan, maka kita jarang membicarakan persebaran wilayah. Akibatnya, ketika kita mempunyai 315 anggota maka hanya tersebar di 2 kecamatan tadi.

Pada bulan Mei ketika kita melakukan evaluasi, dari 889 orang, 600 diantaranya mendaftar menjadi anggota serikat petani dan nelayan. Kita akan melakukan kongres pada bulan Oktober nanti dan jumlah kami akan menjadi kurang lebih 1000 orang. Kesimpulan kami seandainya setiap tahun ada pemilu maka kita akan mampu merekrut anggota begitu mudah. Tahun 2004 dengan anggota 315, ketika kami mengajak perempuan berorganisasi akan dibidang PKI, Gerwani, dan lain sebagainya. Namun, ketika pemilu 2009, mereka begitu mudahnya diajak berorganisasi dan bertambah sebanyak 600 orang. Jadi, kita menang satu kali meskipun seharusnya bisa menang dua kali. Jumlah bertambah, dan mempunyai wakil yang duduk di senayan. Mungkin Tuhan belum mengizinkan kita untuk menang dua kali agar kita tidak menjadi "Congok" atau rakus. Nah, 2014 kita akan menang dua kali. Terima kasih.

Ivan A. Hadar

Sangat menarik. Tadi, yang terpilih kebanyakan selebritas dan seperti



tadi dibilang teman-teman, budaya sekarang lebih banyak visual, dan itu sangat penting. Namun, selebritas yang juga mempunyai wawasan dan sensitivitas gender dan lain sebagainya menjadi penting dan bisa menjadi ikon yang layak dijual. Saya melihat Mbak Nurul, misalnya, mempunyai kebiasaan atau kemampuan lintas partai. Tampaknya, kita sepakat bahwa partai tidak penting karena yang lebih penting adalah masuk dulu ke parlemen sehingga pada masa yang akan datang, FES bisa membantu menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk mencari minimal common platform menyangkut gerakan perempuan di parlemen, terutama bagaimana interaksinya nanti. Modal sosial yang tadi dikritik bisa saja menguntungkan dalam konteks membangun jaringan karena menjadi lebih mudah. Saya kira itu bisa saja dimanfaatkan. Nah, apakah itu kemudian menjadi kontrol menurut saya bagian dari sebuah proses. Untuk selanjutnya, saya kira dari hasil diskusi malam ini kita bisa optimis karena ada selebritas yang bisa dijual dan mereka mempunyai idealisme yang bisa dimanfaatkan. Barangkali, kita perlu bertemu beberapa kali, dan teman-teman dari Aceh perlu juga kita ajak untuk sharing dalam membangun common platform tadi.



Selain itu, ada juga pekerja lapangan yang berhasil dalam membangun jaringan meskipun dalam segi jumlah masih perlu kerja keras. Meskipun demikian, tetap perlu disadari bahwa membangun jaringan lintas partai antaraktivis perempuan tidaklah mudah karena masing-masing terikat partainya. Namun, pasti masih ada ruang untuk bersama guna mendiskusikan isu-isu konkret sebagaimana tadi disampaikan Mbak Binny Buchori seperti isu kematian ibu yang

masih sangat tinggi di Indonesia. Jika dilihat dari capain MDG's, maka yang merupakan tertinggi di Asia.

Nah, saya kira kita perlu memberikan applause kepada kita semua karena belum pernah terjadi dalam diskusi jurnal diikuti oleh orang sebanyak dan seentusias sekarang. Terima kasih.



RESUME DISKUSI

REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN:

SEKADAR WARNA TURUT MEWARNA

Gagasan representasi perempuan dalam politik hadir karena setidaknya empat alasan sebagaimana dikemukakan Nur Iman Subono. Pertama, berkenaan dengan keadilan dan kesetaraan yang dengan jelas telah dicantumkan dalam konstitusi ataupun Konferensi Beijing. Sementara itu, jika dilihat dari komposisi jumlah, maka sebenarnya antara laki-laki dan perempuan berimbang sehingga tidaklah adil jika perempuan tidak direpresentasi dalam pembuatan legislasi. Di parlemen, perempuan hanya berjumlah sekitar 11,6% saja. Kedua, *woman interest*. Menurut Nur Iman Subono, kaum laki-laki harus menyadari bahwa tidak semua kepentingan dapat diwakili. Banyak sekali isu-isu yang sifatnya spesifik dan karenanya hanya bisa direpresentasikan oleh perempuan. Ketiga, perempuan membuat perbedaan. Dalam kaitan ini, penting disadari bahwa

yang terpenting bukan hanya perempuan mempunyai wakil di parlemen, tetapi bagaimana perempuan membuat perbedaan-perbedaan dalam pengambilan keputusan politik. Dengan kata lain, perlu memikirkan apa yang sering disebut sebagai *gender democracy*. Dalam kaitan ini, Nur Iman Subono mengemukakan bahwa ada premis yang mengatakan perubahan politik mempunyai dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, dan dalam banyak kasus gaya politik perempuan dan laki-laki berbeda. Lebih lanjut, Nur Iman Subono mengatakan, "Politik maskulinitas di parlemen hampir selalu dalam konteks "kami" dan "mereka". Politik sebagai sebuah pertempuran. Oleh karena itu, kehadiran perempuan di parlemen diharapkan dapat mengubah gaya politik maskulin semacam itu". Keempat, pentingnya perempuan untuk dijadikan panutan.

Ada banyak aktivis perempuan yang masuk ke parlemen layak dijadikan sebagai panutan dalam politik.

Menurut Nur Iman Subono, dalam konteks demokrasi, persoalan yang sekarang dihadapi oleh Bangsa Indonesia bahwa demokrasi berjalan dalam situasi yang sedikit paradoks. Pada satu sisi, golput mengalami peningkatan terlepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya angka golput tersebut. Dalam kaitan ini, menurut Nur Iman Subono, golput bisa karena persoalan-persoalan politik, tetapi juga karena faktor administratif. Golput juga dapat bersifat alamiah, tetapi juga tidak. Beberapa kalangan dengan jelas berusaha mengkampanyekan golput sebagai suatu pilihan politik. Di sisi lain, banyaknya jumlah partai politik barangkali juga memberikan andil bagi meningkatnya angka golput. Dalam situasi semacam ini,

A ATAU JAI?

lantas banyak orang mulai bertanya-tanya bagaimanakah masa depan demokrasi Indonesia apakah masih dalam *on the right track* atau justru semakin jauh dari harapan yang dulu pernah ditanamkan pada masa reformasi.

Temuan riset yang dilakukan Demos sebagaimana dipaparkan Nur Iman Subono menemukan empat hal penting, dan ini relevan untuk dibahas, terutama jika dikaitkan dengan representasi perempuan. Pertama, pokok perdebatan bukan pada tataran apakah demokrasi kita gagal ataukah masih *on the right track*, tetapi lebih pada apa yang sering disebut sebagai “defisit demokrasi”. Ini karena, menurut Nur Iman Subono, jika kita membandingkan demokrasi yang sekarang berlaku dengan masa Orde Baru, maka kebebasan sipil dan politik jauh lebih baik. Kita dapat mendirikan partai politik, be-

bas mengeluarkan pendapat, bebas berdemonstrasi, dan seterusnya. Namun, jika kita melihat dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan juga budaya maka kita harus mengakui bahwa masih ada ketimpangan. Kedua, secara prosedural, Indonesia tetap bisa dikategorikan sebagai negara demokrasi karena mempunyai partai politik, parlemen, dan pemilu yang relatif cukup bebas. Oleh karena itu, secara prosedural, kita bisa dimasukkan ke dalam negara demokrasi. Bahkan, menjadi salah satu negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat dan India. Namun, jika kita berbicara dalam konteks perwakilan, maka pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup terwakili? Oleh karena itu, menjadi lebih pas jika demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini disebut sebagai representasi semu (*pseudo representation*). Ketiga, orang-orang yang

duduk di parlemen, dalam banyak kasus, adalah orang-orang lama. Suasana dinasti politik ini cukup kuat mewarnai proses demokrasi di Indonesia. Di banyak daerah, akan dapat ditemukan aktor-aktor politik yang berkuasa baik di pemerintahan maupun parlemen merupakan bagian dari suatu dinasti politik. Keempat, persoalan terakhir dalam proses demokrasi di Indonesia adalah basis kontituennya yang belum jelas. Ini terjadi karena para aktivis demokrasi yang berada dalam kelompok masyarakat sipil baru pada tahap kelompok dampingan. Padahal, seperti dikemukakan Nur Iman Subono, “Perubahan kelompok dampingan menjadi *voters* merupakan dua hal yang berbeda”.

Representasi Perempuan di Parlemen

Jika dibandingkan dengan pemi-

lu sebelumnya, maka jumlah perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif mengalami peningkatan. Sebagaimana dipaparkan oleh Sri Budi Eko Wardani, jika dilihat dari persentasi caleg perempuan sekarang ini, maka terdapat kurang lebih 3895 atau sekitar 34,7% dari sekitar 11.000 calon anggota DPR RI. Dengan demikian, menurut Sri Budi Eko, dalam hal kesediaan, caleg perempuan tidak mengalami persoalan. Meskipun hal ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Reihan (Partai Rakyat Aceh) maupun Lely dari PPR. Menurut kedua aktivis perempuan ini, perempuan masih banyak yang enggan untuk terjun menjadi caleg. Di Aceh, menurut Reihan, meskipun sudah dijanjikan menjadi caleg dengan nomor urut jadi, tetapi tidak banyak perempuan yang bersedia menjadi caleg. Lebih lanjut, Reihan mengemukakan, "Saya ingat database yang dibuat oleh UI bahwa ada banyak potensi perempuan untuk menjadi caleg, tetapi setelah ditawarkan ternyata aktivis perempuannya tidak ada yang mau." Sementara itu, dalam kasus PPR, ketika perjuangan perempuan disepakati untuk dilanjutkan dengan mendorong caleg perempuan dari PPR, maka ungkapan yang sering muncul adalah, "Jangan saya".

Kuota 30% berdasarkan UU Pemilu yang baru meskipun dibatalkan oleh MA, tampaknya juga memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi peningkatan caleg perempuan di parlemen. Ini terjadi karena selama prosesnya partai-partai politik mempunyai ketaatan yang cukup tinggi dalam memenuhi kuota tersebut meskipun tetap harus diberi catatan bahwa kuota tersebut tidak merata di seluruh Dapil. Hanya sekitar 60% Dapil yang mampu memenuhi hingga 30% caleg perempuan. Kenaikan ini juga berlaku untuk DPD. Menurut Budi Eko, jumlah caleg perempuan

sekitar 11,6% naik dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 8,8%, dan sebagian merupakan incumbent. Data ini menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja perempuan telah cukup baik.

Kemudian, dari hasil data yang dipaparkan oleh Sri Budi Eko, selain dalam hal pencalegan, caleg perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif meskipun dengan menggunakan suara terbanyak ternyata juga mengalami peningkatan. Sekarang ini, caleg perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif sebanyak 17,85%, naik dibandingkan pemilu 2004 yang hanya 11,6%. Di sini, tampak bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan meskipun masih jauh dari angka 30%. Angka 30% ini, sebagaimana dikemukakan oleh Nur Iman Subono, berdasarkan penelitian PBB-UNDP yang merupakan angka kritis (*critical number*) suara dimana aspirasi perempuan baru bisa diwakili dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, meskipun terjadi kenaikan, tetapi angkanya masih jauh dari 30%.

Kenaikan yang cukup signifikan caleg perempuan yang menjadi anggota legislatif banyak disumbangkan oleh partai-partai besar seperti PDIP, Partai Golkar, dan juga Demokrat. Partai-partai tengah (PAN, PPP, PKS, Gerindra, dan Hanura) belum memberikan kontribusi yang signifikan. Ini tentu saja tidak terlepas dari strategi yang dikembangkan oleh para aktivis perempuan dalam melobi partai-partai besar, termasuk di dalamnya dengan mendekati Puan Maharani. Meskipun demikian, Sri Budi Eko tetap memberikan catatan bahwa kenaikan jumlah caleg perempuan di parlemen sebagaimana terjadi sekarang belum tentu terjadi pada tahun 2014. Alasannya, kenaikan jumlah caleg perempuan tersebut masih menimbulkan pertanyaan apakah karena memang perempuan mempunyai

tingkat elektabilitas yang baik sebagaimana disinggung oleh Nur Iman Subono bahwa dengan suara terbanyak ternyata perempuan mampu membuktikan diri ataukah disebabkan oleh adanya Partai Demokrat yang dapat dikatakan sebagai pembawa gerbong terbesar caleg perempuan. Nah, fenomena Demokrat ini tentu saja belum tentu terjadi pada pemilu berikutnya.

Beberapa persoalan

Dilihat dari segi kuantitas, caleg perempuan yang masuk ke dalam parlemen mencapai sekitar 17%, naik secara signifikan. Meskipun demikian, sebagaimana telah disinggung di awal, jumlah ini belum cukup representatif karena masih berada jauh di bawah ambang batas *critical numbers* yang disarankan.

Suatu pemilihan umum yang relatif kompetitif pasti akan memunculkan caleg perempuan yang berhasil, tetapi juga tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Ini terjadi karena berhasil tidaknya suatu caleg lolos menjadi anggota dewan akan sangat ditentukan oleh banyak faktor. Dalam kaitan ini, Nurul Arifin mengemukakan bahwa seseorang yang hendak berkompetisi di pemilihan umum maka harus mempunyai setidaknya tiga modal utama yang harus dimiliki Pertama, kepengurusan di partai. Menurut Nurul Arifin, "Kita harus masuk ke dalam kepengurusan partai politik atau masuk ke dalam struktur partai". Oleh karena itu, bagi aktivis perempuan tidaklah cukup jika hanya menjadi figuran dalam partai atau sekedar masuk ke dalam seksi konsumsi atau kesekretariatan.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh seseorang yang masuk ke dalam kepengurusan partai. Pertama, ia bisa mendapatkan nomor urut yang baik. Kedua, ia juga bisa menggunakan mesin partai untuk memobilisasi dukungan di tingkat



bawah. Dalam konteks ini, Bini Buchori dan juga Rieke membuktikan betapa tantangan yang dihadapi sangatlah berat ketika mereka bukan merupakan pengurus partai. Terlebih, jika dalam satu Dapil mereka harus bersaing dengan pengurus atau dewan pembina partai. Tantangannya akan menjadi semakin berat. Di sisi lain, caleg seperti Nurul Arifin maupun Reihan dari Partai Rakyat Aceh karena berada dalam struktur partai, maka menjadikannya lebih mudah baik untuk menggerakkan struktur partai maupun untuk mendapatkan nomor urut yang bagus. Oleh karena itu, menurut Nurul Arifin, keberadaan aktivis perempuan dalam kepemimpinan partai politik sangatlah penting.

Faktor berikutnya yang turut mempengaruhi keberhasilan caleg adalah modal sosial. Artis, sebagaimana dikemukakan Nurul Arifin, mempunyai modal sosial yang penting, yakni popularitas. Modal sosial dalam bentuk popularitas ini memudahkan artis untuk berkampanye karena tidak perlu mengeluarkan ongkos yang besar agar mereka dikenal masyarakat. Modal sosial dalam bentuk popularitas ini menjadi semakin penting ketika politik cenderung mengarah ke dalam bentuk politik televisual. Dalam kaitan ini, Puji Rianto mengemukakan bahwa dalam literatur-literatur komunikasi politik, muncul apa yang sering disebut sebagai politik televisual. Dalam model politik semacam ini, citra menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan substansi. Akibatnya, terjadi pendangkalan demokrasi. Kemudian, dalam model politik televisual semacam itu, menurut Puji Rianto, peran media massa terutama televisi menjadi sangat besar. Ini karena media televisilah yang mempunyai kemampuan paling besar untuk membangun citra seorang kandidat. Akibatnya, artis-artis yang mempunyai modal sosial dalam bentuk popularitas menjadi

semakin mudah melakukan kampanye dibandingkan dengan caleg yang tidak memiliki modal sosial tadi. Dalam politik televisual, lebih jauh, Puji Rianto mengatakan bahwa caleg memerlukan modal ekonomi yang lebih besar guna membangun citra positif. Di sini, partai-partai politik dan juga caleg harus mengeluarkan uang milyaran rupiah untuk beriklan di tv dan menjaga agar senantiasa mendapatkan *exposure* di media.

Faktor Ketiga yang turut berpengaruh terhadap keberhasilan caleg adalah modal ekonomi. Modal ekonomi ini digunakan untuk membeli atribut, biaya kampanye, saksi, dan lain sebagainya. Menurut Nurul Arifin, saksi sangat penting karena sangat mahal dan seringkali para aktivis *careless* ketika pemilihan umum sudah dilaksanakan. "Padahal", seperti ditegaskan Nurul Arifin, "justru pada tahap inilah pertarungan yang paling gawat terjadi. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh istirahat, dan tidak boleh ditinggalkan".

Diantara ketiga faktor tersebut, modal ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam menentukan keberhasilan caleg. Sebagaimana dipaparkan oleh peserta diskusi, terutama yang berasal dari aktivis bahwa modal ekonomi yang cekak membatasi mereka dari usaha merencanakan bentuk-bentuk kampanye yang baik. Meskipun demikian, modal ekonomi bukan merupakan satu-satunya persoalan yang menghambat caleg perempuan untuk lolos menjadi anggota legislatif. Ada banyak cerita dimana dengan modal ekonomi yang pas-pas seorang caleg bisa juga lolos masuk menjadi anggota parlemen.

Di luar modal ekonomi, kesalahan analisis dalam struktur masyarakat juga berpengaruh dalam menentukan berhasil tidaknya strategi yang digunakan kandidat. Seperti dikemukakan Ari Sujito, "Perlu dis-

adari bahwa strategi pemenangan pemilu tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakatnya. Jika, misalnya, pemetaan struktur masyarakat tidak tepat, maka strategi yang digunakan akan sangat mungkin juga tidak akan tepat". Kecenderungan yang muncul ketika aktivis masuk ke dalam gelanggang pemilu maka akan mengabsorpsi model-model yang sudah lama berkembang. Padahal, model tersebut tidak seluruhnya dapat diterapkan dalam struktur masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, menurut Ari Sujito, strategi yang digunakan oleh Rieke Diah Pitaloka, misalnya, belum tentu cocok untuk masyarakat lain dimana Rieke lebih menggunakan strategi pendidikan politik dan tatap muka untuk menggalang dukungan.

Di luar beberapa persoalan tadi, gerakan politik perempuan sendiri masih menyisakan banyak persoalan. Setidaknya, ada empat persoalan yang dihadapi oleh gerakan politik perempuan atau gerakan perempuan dalam arti luas. Pertama, sebagaimana halnya gerakan sosial lainnya, gerakan perempuan juga cukup terfragmentasi. Kedua, gerakan perempuan tidak bersifat homogen, tetapi heterogen. Ketiga, kurangnya basis konstituen. Keempat, kurangnya minimum platform. Menurut Moderator, Ivan A. Hadar, minimum platform penting karena jika hendak mewarnai, maka tidak hanya hadir begitu saja di parlemen, tetapi perlu adanya *common platform*.

Sementara itu, menurut Bini Buchori, kerja perempuan belum sistematis. Dalam banyak kasus, ketika membicarakan representasi perempuan dalam parlemen, maka banyak aktivis perempuan yang tidak diajak diskusi. Sementara itu, Lely dari PPR mengemukakan bahwa gerakan perempuan memang belum masuk ke dalam gerakan politik. Meskipun sudah masuk ke dalam berbagai ra-

gam gerakan, tetapi belum masuk secara sadar dan sistematis membangun gerakan politik perempuan. Sebaliknya, yang terjadi, baru sekedar gerak-gerik politik. Namun, belum menjadi sebuah gerakan politik.

Agenda ke depan

Tingkat representativitas perempuan dalam parlemen, jika dilihat dari segi kuantitas, jelas mengalami kenaikan. Meskipun keberhasilan tersebut masih menyisakan beberapa persoalan. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu dilakukan bagi aktivis perempuan, baik yang berada di parlemen maupun yang di luar parlemen. Sri Budi Eko Wardani menawarkan tiga wilayah afirmatif guna memperbaiki representasi perempuan dalam politik. Ketiga arena afirmatif tersebut adalah Pertama, kita masih berada di wilayah struktural, terutama di birokrasi. Kedua, dalam institusi politik, yang dalam hal ini adalah partai politik. Ketiga, pendidikan pemilih. Untuk yang ketiga ini, memang belum strategis. Nah, ini semua harus ada kebijakan yang bersifat afirmatif.

Sementara itu, Nur Iman Subono menyarankan tiga hal pokok untuk memperbaiki kualitas perempuan. Pertama, gerakan perempuan harus mampu meningkatkan kepedulian melalui kampanye di media. Kedua, perlunya meningkatkan kemitraan dengan laki-laki. Menurut Nur Iman Subono, ini penting dilakukan karena ketika orang berbicara tentang ketidaksetaraan atau keadilan kita harus sadar adanya empat premis yang harus kita yakini, yakni: (1) ini bukan perang laki-laki dan perempuan; (2) persoalan ini bukan menyangkut persoalan anti laki-laki; (3) dalam banyak kasus, laki-laki adalah korban meskipun perempuan menderita korban lebih banyak; (4) jika situasinya demikian, maka kemitraan laki-laki dan perempuan di parlemen menjadi

penting. Ketiga, memperluas calon kelompok politik perempuan atau *go politics*, yang artinya tidak alergi terhadap politik. Ini penting dilakukan karena setelah 10 tahun gerakan perempuan maka akan masih mempunyai kader. Keempat, amandemen untuk diskriminasi positif. Menurut Nur Iman Subono, undang-undang yang seolah-olah netral, tetapi tidak properempuan menjadi lahan untuk dilakukan amandemen.

Bagi caleg yang mengalami kegagalan dalam pemilu kemarin, Ari Sujito memberikan saran agar gerakan perempuan segera menyiapkan diri pascapilpres guna pemilihan umum berikutnya dengan tetap berpijak pada analisis struktur masyarakat. Di sini, Ari Sujito mengusulkan perlunya dibuat roadmap. Menurut Ari Sujito, roadmap ini penting jika perempuan ingin tampil ke depan dengan optimisme. Peta perubahan dan arena-arena mana saja yang bisa dikerjakan oleh perempuan harus dipetakan dengan baik. Menurut Ari Sujito, "Politisi kita selayaknya seorang pelari sprinter. Mereka akan lari kencang 100 m, dan kemudian istirahat. Saya yakin bahwa setelah pemilu para politisi akan istirahat semua. Padahal idealnya, berpolitik seperti seorang pelari marathon". Kemudian, dalam rangka mengembangkan komunikasi politik yang berkesinambungan, Puji Rianto merekomendasikan pentingnya pengembangan media alternatif. Seperti ia kemukakan, "Bagi aktivis yang mempunyai modal kurang tidak mungkin mengekspose dirinya melalui media secara besar-besaran untuk mendongkrak citra karena memerlukan dana yang relatif besar pula. Oleh karena itu, mengembangkan media-media alternatif barangkali bisa menjadi jawaban untuk menutup kekurangan modal. Media-media alternatif ini harus dikembangkan sebagai media komunikasi antara caleg dengan konstituennya".

Di sini, perlu adanya perencanaan jangka panjang atau menurut bahasa Ari Sujito sebagai pelari marathon. Dengan demikian, ada kontinuitas hubungan pesan antara caleg dengan konstituen sehingga proses pendidikan politik dan penanaman kesadaran akan berlangsung secara berkesinambungan.

Terobosan-terobosan baru juga perlu dilakukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Amir Effendi Siregar, "Strategi-strategi yang bersifat teoritis sebagaimana telah dikemukakan tadi tidaklah cukup. Dalam kaitan ini, diperlukan terobosan-terobosan baru." Golput yang mencapai angka 30-40%, menurut Amir Effendi Siregar, juga perlu menjadi lahan garapan. Dengan begitu, dukungan terhadap caleg perempuan akan semakin besar.

Catatan penutup

Kegagalan sebagian caleg perempuan dalam pemilu legislatif kemarin tentu saja tidak perlu diratapi. Bahkan, harus menjadi awal perjuangan dan dianggap sebagai sebuah tantangan. Berbagai agenda sebagaimana telah dikemukakan di awal dapat segera dilaksanakan. Bagi aktivis perempuan yang berada di parlemen, adalah penting untuk segera menyusun *common platform*. Seperti dikemukakan oleh moderator, Ivan A. Hadar, pertemuan-pertemuan untuk mencari minimal common platform menyangkut gerakan perempuan di parlemen perlu diselenggarakan, terutama menyangkut bagaimana mereka berinteraksi. Kemudian, gerakan perempuan perlu membuat isu-isu konkret. Sebagaimana ditegaskan Rita bahwa salah satu pekerjaan gerakan perempuan adalah bagaimana membumikan *discourse* ke dalam sesuatu yang konkret. Semoga!



- Struktur patriarki masyarakat Indonesia menjadi kendala utama bagi partisipasi perempuan dalam politik.
- Pendekatan-pendekatan secara positif menghasilkan ratifikasi terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Ini terwujud dalam Undang-Undang Partai Politik yang baru dengan 30% kuota perempuan dan penyediaan 5% dari anggaran nasional dan lokal bagi upaya-upaya pengarusutamaan jender (*Gender Mainstreaming*).
- Hasil Pemilu 2009 menunjukkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen dari 11% pada tahun 2005 menjadi 18%. Para pengamat politik mengarahkan hal tersebut lebih pada “*celebrity factor*” (calon-calon legislatif dari artis-artis film, putri politisi terkenal dan lain-lain) daripada “tindakan khusus sementara” (*affirmative action*) dan suatu perubahan sikap dalam arti “perempuan pilih calon perempuan”.

Melanie Mörmel,
Erwin Schweishelm,
FES Indonesia,
Juni 2009

Meningkatnya Ke

Kesem

Baik ba

Hasil Pemi

Ke(tidak)adilan Gender di Indonesia

Berhadapan dengan latar belakang pemilu di Indonesia kali ini, pertanyaan mengenai persamaan hak antar gender dalam politik semakin nyata dan semakin relevan. Meskipun demokrasi di Indonesia semakin berkembang dan semakin kuat, namun keterwakilan perempuan secara politis tidak dapat dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di negara barat. Sejak konferensi perempuan dunia di Beijing tahun 1995 dan kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) penguatan hak-hak perempuan ditetapkan

eterwakilan Perempuan dalam Politik:

Partisipasi yang Lebih Ragi Kesetaraan?

Perwakilan Perempuan di Legislatif di Indonesia



Edisi 6 Tahun 2 Juni - Agustus 2009

sebagai tujuan utama politik internasional. Indonesia dalam hal ini masih harus mengejar ketertinggalan yang lumayan jauh.

Dalam *Global Gender Gap Index* 2008 Indonesia berada pada peringkat ke-93 dari 130 negara (Jerman berada di peringkat ke-11), berarti penurunan sebanyak 12 peringkat dibandingkan tahun 2007. Indeks mengkombinasikan empat substansi, yaitu kesehatan, pendidikan, kesempatan dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi, maupun keterlibatan dalam politik. Perempuan di Indonesia merupakan penduduk terbanyak, namun dalam Indeks mereka

tergambar sebagai kelompok masyarakat marjinal. Hasil-hasil dalam empat dimensi tersebut menggambarkan bahwa perempuan Indonesia dibandingkan dengan laki-laki masih terpinggirkan dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi dan politik. Alasannya tidak hanya terletak pada status negara berkembang (dan juga tidak hanya pada aspek-aspek struktural seperti halnya tingginya angka kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan sebagainya), seperti halnya yang ditunjukkan Ruanda sebagai contoh positif yang sering disebut dalam konteks persamaan hak antar gender dalam bidang politik. Lebih jauh lagi

ketertinggalan perempuan, menurut *Women Research Institut*, berakar pada kompleksitas budaya Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, dapat ditunjukkan, bahwa marjinalisasi perempuan tidak hanya mengarah pada agama Islam. Bali yang merupakan bagian dari Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Hindu membuktikan hal tersebut. Indonesia bukanlah negara Islam, namun didalamnya, seperti halnya negara Asia lainnya, terdapat sistem patriarki yang kuat yang merupakan alasan sesungguhnya terjadinya ketidakadilan gender. Agama seringkali digunakan hanya sebagai suatu tangan dan "cara mencapai tujuan" bagi usaha menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Hambatan-hambatan bagi partisipasi perempuan dalam politik

Setelah berakhirnya masa penjajahan tahun 1945 yang telah diperjuangkan baik oleh para lelaki dan perempuan, tampak bahwa keterlibatan perempuan dalam politik menguat. Pada masa setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak perempuan yang terlibat aktif dalam proses-proses politik. Awal yang banyak menjanjikan di bawah pemerintahan Sukarno berakhir pada 1965 dengan peran gender yang secara resmi ditetapkan oleh negara. Di bawah pemerintahan Suharto gerakan-gerakan emansipatoris perempuan diredam, sebagai gantinya perempuan dilibatkan dalam organisasi-organisasi massa yang terbagi secara kaku agar dapat dikendalikan secara ideologis. Itu berarti perempuan harus belajar menerima peran sebagai subordinat laki-laki dan mengorbankan diri secara keseluruhan pada kepentingan keluarga.

Diskriminasi secara politis dan sistematis tersebut berlaku sejalan dengan proses marjinalisasi perempuan dalam bidang pekerjaan tradisional (di sawah, pasar, dan usaha keluarga). Perempuan adalah pihak yang kalah dari suatu proses pembangunan (yang sesungguhnya berhasil) yang berjalan di bawah pemerintahan Suharto. Gambaran tersebut berhenti hingga hari ini. Melalui pemahaman peran secara klasik dalam masyarakat Indonesia, perempuan harus bertanggung jawab bagi pendidikan dan urusan keluarga. Perempuan bekerja hanya diterima bila mereka dapat memperluas wilayah pertanggungjawabannya.

Gambaran stereotip ini berdampak negatif terhadap partisipasi di bidang politik: para perempuan yang aktif dalam politik, dipandang sebagai "sesuatu yang tidak tepat" karenanya perannya tidak diperhitungkan. Karena itulah proses masuknya perempuan dalam partai-partai tampak problematis. Pemilihan wakil-wakil perempuan dan laki-laki ditetapkan oleh kelompok-kelompok kecil para pemimpin partai yang kebanyakan laki-laki dan menjatuhkan pilihannya menurut jenis kelaminnya sendiri. Selain itu tingkat pendidikan perempuan Indonesia lebih rendah dari laki-laki, sehingga perempuan kurang memenuhi persyaratan kompetensi secara politis untuk dapat bersaing dengan laki-laki. Pada tahun 2003 dalam Undang-undang Pemilu secara khusus disebutkan bahwa untuk menjadi calon legislatif harus berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas. Dari situ tampak bahwa pencalonan legislatif terkait banyaknya waktu dan terutama terkait dengan uang, karena keputusan untuk menetapkan calon di jatuhkan secara personal dan tidak tergantung pada partai politik. Banyak perempuan yang tidak memiliki sejumlah dana yang dibutuhkan

kan untuk dapat mencalonkan diri. Struktur patriarkis inilah yang membuat perempuan sulit untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Sejak awal proses demokratisasi tahun 1998 pada tataran perundang-undangan tidak banyak yang diperbuat untuk perempuan. Meskipun Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) telah diratifikasi sejak 1984 (dengan tekanan luar negeri), namun pelaksanaannya belum maksimal. Banyak undang-undang dan peraturan-peraturan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang mendiskriminasi perempuan. Sehingga seringkali perempuan sebagai warga negara Indonesia menurut peraturan-peraturan daerah tidak di pandang penuh sebagai individu; keputusan-keputusan penting masih mengacu pada keputusan suami.

Hambatan-hambatan selanjutnya dalam hal keadilan gender adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi pada akhir 2008 tentang daftar pemilu. Hingga waktu tersebut tiga calon pertama dari daftar partai minimal satu orang perempuan (terdapat 10 calon dari satu partai dalam suatu daerah pemilihan). Urutan pada daftar menentukan jalan ke parlemen. Mahkamah Konstitusi bahkan menentukan bahwa calon legislatif yang terpilih adalah dengan suara terbanyak, otomatis daftar urutan tidak berarti. Khalayak umum menilai keputusan tersebut sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih demokratis, namun ternyata membatasi kesempatan perempuan untuk duduk di parlemen. Demikian pula dengan mayoritas anggota parlemen perempuan saat ini (62 orang atau sekitar 11%) tidak sepakat dengan ketetapan tersebut. Isu kesetaraan gender banyak didengungkan dan dijanjikan hanya pada masa kampanye pemilu, alih-alih dimasukkan se-



bagai agenda politik. Oleh karena itu kementerian pemberdayaan perempuan memperoleh kritik.

Perempuan menuju kemajuan

Meskipun masih terdapat masalah-masalah seperti yang digambarkan sebelumnya, namun terdapat pula suatu gerakan perempuan yang aktif dan emansipatif yang mencapai keberhasilan-keberhasilan. Sejak tahun 2000 disepakati bahwa pemerintah pusat dan daerah mengimplementasikan pengarusutamaan jender dalam program-program pembangunan. Beberapa kemajuan telah terca-

pai, yaitu dengan ditetapkannya 30% kuota perempuan dalam Undang-undang Partai Politik yang baru (UU No. 10/2008; artikel 1) dan dukungan untuk tercapainya kesetaraan jender ditetapkan anggaran 5% dari anggaran nasional dan daerah (*Gender Budgeting*). Dalam kurun waktu 10 tahun setelah jatuhnya pemerintahan Suharto masih terdapat resistensi terhadap kepemimpinan seorang presiden perempuan. Megawati Sukarnoputri, putri proklamator Sukarno memimpin dari tahun 2001 hingga 2004. Pada kenyataannya ia tidak terpilih, melainkan diangkat sebagai presiden menggantikan pres-

iden sebelumnya, Gus Dur. Hingga saat ini posisi menteri pemberdayaan perempuan, menteri kesehatan dan menteri ekonomi ditempati oleh perempuan.

Jumlah organisasi-organisasi yang memperjuangkan kesetaraan jender semakin meningkat. Organisasi-organisasi tersebut telah mencapai keberhasilan diantaranya dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan isu-isu pendidikan untuk perempuan. Hal tersebut juga disebabkan kebanyakan organisasi tersebut tidak secara langsung melibatkan diri pada isu partisipasi politik perempuan,

mereka berharap bahwa isu kesetaraan dapat memperoleh tempat dalam masyarakat. Pada akhirnya hal ini dapat membawa perubahan terhadap citra peranan perempuan dan dengan itu tercapai perubahan peta politik Indonesia.

***Alia iacta sunt* – Indonesia telah memilih**

Sejak Pemilu legislatif yang pertama tahun 1955 (yang hingga tahun 1999 terakhir digunakan atribut pemilu yang „bebas“) dimana keterwakilan perempuan dalam parlemen saat itu hanya mencapai 6,5%, perjuangan perempuan untuk mendapat kursi di parlemen menyerupai jalan yang berliku dan mendaki. Puncaknya terjadi pada tahun 1987 yang mencapai angka keterwakilan 13%, namun kemudian angka itu menurun. Pemilu pertama yang diselenggarakan setelah reformasi 1988 menunjukkan angka keterwakilan perempuan sebanyak 8,8% dan pada tahun 2004 dengan angka sedikit lebih tinggi yaitu 11,3%. Secara statistik Pemilu tahun 2004 ini setidaknya menunjukkan angka teratas.

Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono memperoleh angka kemenangan (sementara) sebanyak 20,85%, diikuti oleh Golkar (14,45%) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P, 14,03%). Pada Pemilu 2004 turut serta 7.756 calon legislatif perempuan (32,3% perempuan), sedangkan pada Pemilu 2009 ini diikuti oleh 11.219 peserta perempuan (35,25% perempuan). Dari 38 partai nasional sekitar 5 partai (artinya 13%) yang tidak memenuhi persyaratan kuota perempuan dan harus menjalankan proses untuk menempatkan anggota perempuan dalam partainya. Lebih dari setengah (54,7%) dari sekitar 171

juta pemilih adalah perempuan.

Slogan kampanye pemilu „perempuan pilih calon perempuan“ tampaknya kurang terbuka dan tidak benar-benar sampai pada pemilihan perempuan. Meskipun demikian secara kuantitatif menunjukkan hasil yang mengejutkan: baru pertama kali Pemilu menghasilkan 18% calon legislatif perempuan yang terpilih dalam parlemen. Hal tersebut menunjukkan klimaks baru setelah 1987. Berdasarkan angka aktual yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 102 kursi dari 560 kursi ditempati oleh wakil legislatif perempuan. Perempuan terbanyak (37) diwakili oleh Partai Demokrat, diikuti oleh PDI-P dengan 20 suara, dan Partai Golkar dengan 17 wakil perempuan. Ditengarai pula bahwa partai Islam PKS menempati posisi terendah dengan 3 perempuan dari 57 wakil legislatif. Termasuk dalam calon-calon legislatif perempuan yang berhasil sebagai contoh adalah putri mantan presiden Megawati, artis-artis terkenal, dan aktor komedi perempuan, dan mantan Miss Indonesia. Calon-calon perempuan tersebut kemungkinan terpilih masuk parlemen tidak berdasarkan „kemampuan politik mereka“, namun lebih banyak atas dasar tingkat ketenaran atau hubungan dekat mereka dengan elit politik Indonesia. Para pengamat menggambarkan fenomena ini sebagai „celebrity factor“. Kegembiraan atas kenaikan angka kursi parlemen secara signifikan dikaburkan juga oleh adanya kenyataan tentang adanya perempuan-perempuan muda dengan pengalaman politik yang minim di parlemen. Bahwa hal ini dimungkinkan akan membebani kualitas dari tugas-tugas di parlemen bukanlah masalah khusus perempuan. Para pengamat politik mengkhawatirkan bahwa atas dasar „Money Factor“ yang dominan dalam kampanye banyak wakil rakyat yang baru tidak memiliki kompetensi sosi-

al dan politik yang memadai dan hal tersebut mengacu juga pada kaum laki-laki.

Kesetaraan Perempuan adalah Hak Asasi

Partisipasi politik membentuk sebuah basis untuk dapat terwakili dalam Demokrasi, di mana laki-laki dan perempuan bersama-sama menetapkan keputusan-keputusan politik dengan mempertimbangkan bahwa perspektif perempuan juga terwakili secara adil.

Selain itu ada suatu jaminan bahwa negara-negara yang secara politis mendukung adanya kesetaraan jender dapat mencapai kemajuan-kemajuan ekonomi yang lebih baik. Khususnya bagi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemiskinan (*Pro-Poor Growth*) yang menitikberatkan pada keikutsertaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik. Usaha-usaha penguatan peran perempuan dalam politik memang sudah ditetapkan, namun hal tersebut masih terhambat dalam pelaksanaannya. Melalui peraturan-peraturan yang menetapkan kuota 30% dimungkinkan angka wakil perempuan dapat ditingkatkan menjadi 18%, suatu lompatan keberhasilan yang mengarah secara benar. Namun demikian tidak hanya bidang politik yang masih perlu diperbaiki. Di samping kemajuan-kemajuan yang telah berhasil dicapai oleh perempuan, dominasi laki-laki dalam keseharian dan terhadap perempuan merugikan perempuan baik secara politis dan sosial.

Satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian adalah bahwa di seluruh dunia hanya di 14 negara dari 174 negara perempuan terwakili sejumlah 30% atau lebih dalam parlemen nasional. Diluar itu keterwakilan perempuan di seluruh dunia baru mencapai 10% dari jumlah anggota

parlemen (angka tertinggi 2007: 17%). Indonesia berada tidak hanya pada golongan “masyarakat yang baik”, melainkan berada di atas rata-rata.

Kesetaraan gender dan usaha memperkuat peran perempuan dalam politik di Indonesia tertera dalam agenda pembangunan. Untuk itu organisasi-organisasi perempuan, kementerian pemberdayaan perempuan dan juga masing-masing partai mendukung hal-hal di bawah ini:

- Usaha peningkatan pendidikan untuk perempuan,
- Mempermudah akses informasi bagi perempuan,
- Meningkatkan pendidikan dalam bidang politik,

- Mempermudah akses terhadap media sebagai instrumen kampanye,
- Memperkuat jejaring antar politisi perempuan,
- Secara intensif menyampaikan tema Pengarusutamaan Jender dalam bidang politik
- Menyediakan lebih banyak pengalokasian dana bagi kepentingan perempuan (*Gender Budgeting*).

Selain itu dibutuhkan pula sebuah strategi multidimensi di mana meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen harus dibarengi pula oleh meningkat dan

menguatnya kapasitas dan kompetensi perempuan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dapat menunjukkan, bahwa bukan hanya Islam dan Demokrasi tetapi juga Islam dan kesetaraan jender dapat berjalan beriringan. Seperti yang pernah diutarakan seorang perempuan muslim saat bertemu dengan Paul Wolfowitz, presiden bank dunia terdahulu: “Pembangunan berfungsi bagai sebuah gerobak dengan dua roda. Satu roda laki-laki dan roda satunya perempuan. Jika roda yang satu tidak bergerak, maka gerobak tersebut tidak dapat melaju.” (*KfW: Förderung der Entwicklungsländer*, 2006).





Perempuan dalam Pemilu 2009: refleksi kritis

Arie Sujito

Pemilu legislatif yang digelar 9 April 2009 lalu, mencuatkan isu soal representasi perempuan dalam arena politik. Sebagian besar pihak menilai, kondisi budaya masyarakat dan kekuasaan yang masih patriarkhi mengharuskan agenda kesetaraan gender menjadi prioritas dalam penegakan demokrasi Indonesia. Faktanya, tuntutan perhatian pada aspirasi dan hak-hak perempuan dalam dunia politik kian membuahkan hasil, meskipun dalam rentang yang belum optimal. Kesepakatan politik yang berisi prasyarat bagi parpol untuk memasukkan keterwakilan perempuan sebesar 30% atas calon anggota legislatif (caleg) yang diajukan, menunjukkan terobosan menarik. Desakan semacam ini, meskipun belum sepenuhnya ditaati oleh parpol secara keseluruhan, hendaknya dipahami sebagai bagian dari fase perjalanan advokasi atas kesetaraan gender dalam rute demokratisasi Indonesia.

Soal Afirmasi

Mari kita nilai secara positif terlebih dahulu, perubahan era reformasi. Di beberapa hal, kemajuan memang tengah berlangsung. Skema



liberalisasi politik mengintrodusir kesempatan secara struktural melalui kebijakan *afirmatif action*, perempuan mendapat jatah minimal 30% duduk di parlemen dan parpol. Sepak terjang para aktivis NGO yang berfokus pada pembelaan nasib perempuan juga makin "garang", yang umumnya mereka memperjuangkan agar terwujud keadilan gender. Kesadaran itu secara cepat merembes ke bawah, makin marak pertumbuhan inisiasi pembentukan asosiasi-asosiasi sipil di aras *grassroot*, berorientasi upaya mendongkrak partisipasi

perempuan.

Perkembangan mutakhir, umumnya perempuan mulai berusaha merapat ke arena decision making. Aktor-aktor perempuan secara terbuka bergerak memasuki lintasan kekuasaan, tanpa terbebani oleh konstruksi budaya maupun struktur yang menghambatnya. Jebolnya patriarkhi pada aras wacana makin masuk pada arena praksis. Misalnya, perempuan banyak yang masuk parpol dan ikut berkontestasi dalam pemilu, menjadi calon legislator (caleg). Tentu ini langkah maju. Bahkan,

aktivis NGO yang selama ini yakin perubahan hanya bisa dilakukan secara jernih dengan “di luar ring”, mulai dikoreksi. Mereka yakin, masuk ke tengah dengan skema *go politics* memberi peluang dan derajat lebih besar perubahan. Pergerakan politik di lintasan luar demokrasi coba dibenahi dengan memasuki arena baru, memanfaatkan peluang untuk berkuasa.

Pelibatan perempuan dalam politik praktis yang demikian, jika dikaitkan dengan kecenderungan problema demokrasi yang sifatnya masih transisional di Indonesia, menjadi beralasan. Mengapa? Studi evaluasi perkembangan satu dekade demokratisasi Indonesia menunjukkan, neraca politik sedang mengalami defisit, antara capaian perubahan formal dengan substansi dalam berdemokrasi. Termasuk didalamnya menyangkut isu-isu perempuan dan keadilan gender.

Melalui keterlibatan perempuan dalam politik secara praksis, paling tidak perjuangan dan advokasi untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian skema demokrasi dan reformasi sangat berpengaruh positif. Fakta-fakta tersebut tentu

harus disyukuri buah reformasi, dibandingkan jaman orde baru. Sekadar catatan, dulu orde baru telah mengkerangkeng perempuan dalam model korporatisme negara (Mohtar Mas’oed, 1989), diperdalam oleh kultur patriarkhi. Meski secara formal kekuasaan orba runtuh, dijamin reformasi kini tak bisa dilakukan ternyata masih saja menyisakan banyak masalah yang kandungannya eksploitasi, diskriminasi dan ketidakadilan gender.

Beberapa problem

Mari kita mengupas kaitan perempuan dengan soal pemilu 2009 lalu. Mengapa perempuan perlu mendapat perhatian serius dalam pemilu 2009? Jika dikalkulasi secara demografis, perempuan berjumlah lebih dari 55% dari populasi jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, dari segi jumlah pemilih yang berhak dalam pemilu, perempuan juga lebih besar dibandingkan laki-laki. Artinya, perempuan merupakan basis suara yang begitu besar, dan terlalu sayang jika tidak menjadi sasaran strategis untuk meraih dukungan. Hanya saja, kondisi saat ini memang masih ironis. Betapapun basis perempuan dalam

pemilu demikian besar, nyatanya derajat keterwakilan perempuan secara formal dalam parpol sangat kecil dan terbatas. Berdasarkan informasi komisi pemilihan umum (pusat maupun daerah), bahwa parpol-parpol peserta pemilu sebagian besar tidak mentaati keharusan memenuhi kuota perempuan.

Alasan umum yang dilontarkan pengurus parpol adalah, sulitnya mencari kader-kader perempuan untuk duduk menjadi caleg. Padahal, jika struktur parpol lebih dibuka dan dikelola secara demokratis, partisipasi perempuan dalam legislatif semakin besar dan meningkat. Sedikitnya ada 5 soal yang menjadi penyebab mengapa masalah keterwakilan perempuan terbatas dalam caleg; pertama, model kepengurusan parpol yang masih dikelola secara oligarkhis, dimana mereka yang berposisi strategis cenderung memblokir kelompok-kelompok potensial (termasuk perempuan) dalam jalur mobilitas vertikal; kedua, sistem kaderisasi yang buruk di tubuh parpol, dimana proyeksi kepemimpinan tidak memperlihatkan sistem yang terstruktur; ketiga, makin pragmatisme manajemen parpol diperlihatkan

kan dalam bentuk kecenderungan mengambil keputusan politik berorganisasi hanya berdasarkan kemampuan uang (ekonomisasi politik), dengan akibat terpinggirkannya komitmen dalam rangka membesarkan parpol dan ideologi; keempat, kultur yang masih bersemayam gaya politik patriarki, dimana hal itu mempersulit kaum perempuan memasuki area publik; kelima, masih terbatasnya daya dukung gerakan perempuan yang secara solid menjadikan perjuangan politik sebagai prioritas.

Gap sistem pemilu

Semenjak Indonesia memasuki babak liberalisasi politik, seruan radikal untuk membenahi sistem pemilu makin menggema. Produk nyata dari itu adalah, aturan dan sistem pemilu diubah drastis, dari proporsional tertutup menjadi proporsional daftar terbuka. Jika tahun 1999 memilih parpol dengan tersedia sebanyak 48, lalu tahun 2004 memilih orang (ada gambar caleg) dengan parpol sebanyak 24, kemudian tahun 2009 ini rencananya langsung memilih nama caleg dengan ketentuan pertimbangan caleg terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak dengan parpol sebanyak 38 (ditambah 6 parpol lokal Aceh). Perubahan sistem pemilu dengan hal-hal semacam itu saya anggap cukup radikal. Jika sistem pemilu cukup radikal, bagaimana perkembangan parpol dan pemilih?

Tentang keadaan parpol. Dari segi jumlah dan kehendak masyarakat berasosiasi dalam parpol untuk mengikuti pemilu memang meningkat. Politisasi di babak awal reformasi telah mendorong minat warga dalam arena politik. Namun, harapan dan imajinasi itu makin pudar, saat parpol sebagai mesin politik dalam pembentukan struktur kekuasaan gagal didorong untuk terjadi pembaharuan (*reform*). Manajemen parpol masih buruk dan dalam bayang-bay-

ang konservatisme. Masalah yang menyeleimuti mulai dari oligarkhi, feodalisme, *money politic*, konflik dan perpecahan, sampai sederet citra pragmatis. Kemerosotan kepercayaan masyarakat terjadi karena harapan perubahan justru ditukar oleh sekadar hasrat berkuasa.

Keadaan masyarakat pemilih, jika pada episode awal reformasi begitu bergairah agar bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial melalui strategi politik, lama-kelamaan kian menyusut. Bahkan, cara-cara pragmatisme politik para politisi menular pada pemilih. Situasi makin parah, saat pemilu pada akhirnya merupakan arena pertemuan cara-cara yang justru melanggar demokrasi. Pemilu sebagai bagian instrumen demokrasi, seringkali diwarnai tindakan-tindakan yang justru anti demokrasi. Misalnya, saling intimidasi dan teror antar parpol, bahkan sampai kekerasan, membeli suara pakai uang, manipulasi suara, dan seterusnya.

Situasi semacam ini menunjukkan bukti ada gap antara radikalisasi sistem pemilu disatu sisi dengan pragmatisme parpol disisi lain, yang merembes pada pemilih. Dampak itu semua adalah kualitas demokrasi makin merosot tajam. Wajar saja, jika kalkulasi pemilu diwarnai sejumlah kekhawatiran mengenai menurunnya partisipasi pemilih, atau meningkatnya golput. Jika gap ini terus dibiarkan berlarut-larut, maka capaian pemilu kemungkinan tidak sesuai yang diharapkan. Dalam pengertian substansi demokrasi, pemilu seharusnya berlangsung fair, kompetitif, muncul caleg yang kredibel, parlemen memiliki basis legitimasi politik yang kuat, sehingga perubahan ke arah perbaikan bisa terjadi pasca pemilu.

Sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penetapan suara terbanyak dalam pemilu, beberapa pihak menyambut antusias. Diantaranya politisi, akademisi, juga

aktivis. Menurut mereka, suara terbanyak dianggap sebagai pengejawantahan hak dan kedaulatan pemilih. Tentu masing-masing punya cara menafsir atas fakta politik baru itu. Saya sedikit memberi pemikiran sebagai pembanding, mungkin agak berbeda pandangan dari mereka. Sebenarnya penentuan kursi berdasar suara terbanyak untuk pemilu 2009 lalu, justru menjadi beban baru bagi perempuan. Apalagi, para pemilih juga banyak mengalami pragmatisme. Perempuan yang tidak memiliki modal (uang) besar banyak diserobot oleh para politisi yang memanfaatkan pragmatisme masyarakat. Mesin politik bernama parpol, hingga kini belum membenahi diri agar melakukan pendidikan politik pada pemilih secara baik. Mengatasi pragmatisme pemilih menjadi agenda penting.

Saya berpandangan, jika parpol tidak membenahi diri atas masalah yang melingkupi itu, serta pendidikan kritis pemilih tidak berlangsung dengan optimal, maka perubahan sistem pemilu yang lebih rumit saat ini, ditambah keputusan MK yang menyetujui suara terbanyak kemungkinan tidak akan membawa manfaat signifikan meningkatnya kualitas demokrasi. Bahkan, jika kita periksa secara cermat, akibat keputusan itu muncul beberapa hal. Pertama; persaingan antar caleg dalam satu parpol makin keras apalagi kultur bersaing yang tidak sehat makin nyata, karena parpol tidak mampu menjadi institusi pemersatu diantara mereka; kedua, dalam situasi parpol hanya membiarkan kepada caleg berjuang masing-masing, banyak hal dan berbagai cara kemungkinan ditempuh meskipun melanggar prinsip demokrasi, yang penting menang; ketiga, terjadi "disersi politik". Muncul sejumlah kecenderungan koalisi antar caleg beda parpol. Saat kampanye, antar caleg meskipun berbeda par-

pol bekerjasama di berbagai tingkatan dalam suatu dapil. Misalnya para caleg saat berkampanye bareng mengajak pemilih agar dalam pemilu nanti untuk kartu DPR memilih caleg A (parpol A), DPR propinsi memilih caleg B (parpol B), dan DPR kabupaten/kota memilih caleg C (parpol C). Hal semacam ini memperlihatkan betapa partai sesungguhnya tidak berperan sebagai institusi konsolidasi ideologi, platform dan program yang dibawa caleg.

Setiap kebijakan baru, sebagaimana MK putuskan itu, semestinya perlu mempertimbangkan apakah bisa bermakna atau tidak didalam meningkatkan kualitas proses demokratisasi dan output yang dihasilkan. Saya menilai, keputusan MK mengenai penentuan suara terbanyak dalam penentuan kursi internal parpol dalam situasi dan konteks politik yang masih pragmatis saat ini justru melahirkan problem serius, karena secara bertahap akan mengkerdikan peran parpol.

Sesungguhnya yang menjadi prioritas saat ini adalah membenahi internal parpol (demokratisasi manajemen parpol) dan melakukan pendidikan politik pemilih supaya cerdas dan berdaya, dibandingkan terus-menerus meradikalisasi sistem pemilu dengan diubah-ubah tak menentu. Pada akhirnya, dengan harapan positif supaya model politik kita tidak "njeglek" (gap, atau senjang), sehingga kita bisa mewujudkan demokrasi makin bermakna.

Isu strategis perempuan

Beban mendasar yang dihadapi perempuan saat ini adalah, tekanan struktural yang begitu membelit dihadapi kaum perempuan, terutama erat kaitannya dengan: lapangan kerja dan jaminan ekonomi; layanan kesehatan dasar; hak-hak berpendidikan; serta kebebasan dalam artikulasi. Sejauh ini prob-

lem-problem semacam itu, jarang mendapatkan perhatian dalam bentuk kebijakan sosial yang konkrit. Oleh karena itu, agenda ke depan hendaknya perlu mengangkat isu-isu strategis keterkaitannya dengan rangkaian problem struktural yang dialami perempuan, dengan diarahkan pada pentingnya diperjuangkan kebijakan sosial. Kemerossotan kualitas dan kuantitas kepercayaan masyarakat (pemilih) pada partai politik adalah peluang, bagi perempuan untuk mengambil inisiatif isu tersebut, dengan cara membuat terobosan baru. Tampilnya kaum perempuan dalam politik, seperti menjadi caleg, perlu memperhatikan isu-isu kebijakan sosial, karena berkaitan dengan yang dialami perempuan diharapkan akan menyedot suara dan dukungan perempuan. Dalam perjuangan yang lebih luas, tentu para caleg laki-laki pun juga memiliki dan kompetensi untuk memperjuangkan isu (kebijakan sosial) tersebut, sebagai bagian dari kebutuhan warga saat ini.

Jika dilihat secara faktual, perempuan memang telah bangkit, tetapi kali ini memang masih fragmented dalam orientasi dan strateginya untuk membangun keadilan dan perlindungan terhadap dirinya. Pertama, kini terus harus dilanjutkan langkah-langkah strategis mendorong dan menuntut secara negosiatif agar negara bertindak memenuhi hak-hak perempuan melalui basis gerakan sosial. Itulah merupakan salah satu alternatif penting, dibandingkan menunggu proses demokrasi yang berlangsung penuh kesemuan. Kita perlu memastikan bahwa, kewajiban negara melindungi perempuan mensyaratkan perlunya membangun struktur negara yang demokratis.

Kedua, akses perempuan dalam arena politik harus dimanfaatkan, yang dintrodusir oleh afirmatif action agar perempuan makin bisa mempengaruhi kebijakan secara

langsung, dengan orientasi memberdayakan kaum perempuan secara lebih nyata. Anggaplah kuota 30% bagi perempuan dalam elektoral sebagai pintu masuk harus dimanfaatkan sebaiknya. Caranya, disain strategis ini hendaknya diikuti pula sesegara mungkin perempuan berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam berbagai hal agar ideologi, komitmen, pengetahuan dan ketampilannya makin kuat dan bangkit menunjukkan perannya secara optimal. Jika pembuktian berhasil, jelas akan mematahkan "kecongkakan politik" garis patriarkhi dalam elektoral dan kekuasaan. Menghadapi kecenderungan praktik demokrasi yang masih dianggap semu dalam satu dekade, perempuan hendaknya mengambil peran lebih aktif agar kualitas demokrasi tidak merosot. Karenanya, perempuan bisa menjadi agen strategis pembaharuan untuk memperbaiki kualitas demokrasi agar kian bermakna.

Ketiga, tampilnya perempuan dalam politik sebagai konsekuensi pilihan bernegosiasi kekuasaan yakni masuk garis kepartaian maupun parlementaris, harus tetap memperkuat basis gerakan sosial berbasis masyarakat sipil. Mengapa kerja bersama dan perajutan jalur parlementer dan ekstraparlemen ini penting, harapannya agar kesulitan-kesulitan ancaman struktural yang dialami perempuan dalam kerja politik parlementer didukung oleh gerakan sosial. Mengingat kondisi parpol yang belum terjamah reformasi secara mendasar, bayang-bayang sulitnya mendobrak konservatisme partai tetap akan dihadapi politisi perempuan. Dengan cara kerja merajut kekuatan politik perempuan berbasis gerakan sosial, maka dukungan para pemilih atau solidaritas massa diharapkan akan terus terawat.[adj]



Menuju Representasi Politik Perempuan yang lebih Bermakna

Nur Iman Subono

Sangat berbeda dengan rekan-rekannya politisi laki-laki yang tampak asyik dengan “narasi-narasi besar politik” seperti bahaya neo-liberalisme, perlunya sikap tegas dalam pergaulan regional maupun internasional, hingga debat tak berkesudahan soal Soeharto, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten dalam pilihan politiknya yakni perjuangan kuota 30% untuk representasi politik perempuan. Mereka tidak terlalu terpengaruh hiruk pikuknya “politik” yang memang sangat kentara warna maskulinnya. Buat mereka, parlemen dan par-



tai politik dalam sistem demokrasi, selain sistem pemilu, adalah tempat representasi politik perempuan dipertaruhkan. Karenanya, tidak mengherankan juga seluruh energi aktivis perempuan, baik dari kalangan politisi, aktivis LSM dan ormas, akademisi, maupun jurnalis perempuan, tercurah ke sana dalam mengupayakan representasi politik perempuan yang lebih adil dan setara. Menjelang pergantian tahun, tepatnya 6 Desember 2007, kalangan perempuan menerima hadiah Tahun Baru dengan disahkan UU Partai Politik yang memberi jaminan keterlibatan

perempuan 30% dalam proses politik (Eko, Kompas, 14/1/08). Namun dalam perkembangannya, atas dasar kepentingan-kepentingan politik sesaat dari sekelompok politisi senior dari beberapa parpol, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pasal 214 UU no. 10/2008, yang mengatur tentang 30% BPP dan nomor urut tersebut dianulir, dan kemudian diberlakukan suara terbanyak sebagai alternatifnya.

Mengapa perlu representasi politik perempuan?

Meski isu kuota 30% bukan lagi isu pinggiran, tapi tetap saja sampai saat ini masih banyak pihak yang melihat dan memahaminya secara salah. Tidak kurang mantan presiden yang notabene perempuan dan wakil presiden yang *incumbent*, dan bahkan juga beberapa tokoh perempuan senior, pernah berkomentar agar perempuan tidak minta-minta jatah kursi. Padahal kita tahu bahwa kuota 30% adalah hak perempuan karena untuk waktu yang lama perempuan pada umumnya termarginalkan secara ekonomi dan tersubordinasikan secara sosial-politik. Laki-laki perlu membayar utang peradaban, demikian jika kita mengutip Rocky Gerung, dosen filsafat UI.

Jika demikian mengapa perempuan perlu terwakili secara politik (representasi politik perempuan)? Ada beberapa alasan utama di balik itu (Fuchs dan Hoecker, 2004). Pertama, keadilan (*justice*) dan kesetaraan (*equality*). Dari sudut keadilan, demokrasi pada dasarnya melibatkan Hak (*rights*), dan sebagai konsekuensinya harus ada kesempatan untuk semua kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan yang relevan. Sementara itu, kesetaraan dalam partisipasi politik adalah kriteria penting dalam memberikan penilaian terhadap kualitas demokrasi. Ini artinya, bu-

ruknya keterwakilan yang sistematis (*systematic under-representation*) terhadap kelompok-kelompok tertentu harus dilihat sebagai suatu masalah besar. Singkatnya, jika merujuk pada persoalan keadilan dan kesetaraan gender, maka laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan politik yang outputnya sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Karenanya sangat tidak adil kalau selama ini hanya laki-laki yang lebih mendominasi (*over-representation*) proses tersebut dibandingkan perempuan (*under-representation*). Apalagi, jika kita merujuk konstitusi kita yang memberikan kesempatan politik yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan kemudian CEDAW dan Konferensi Perempuan Dunia ke IV di Beijing, yang mengamanatkan perlunya tindakan afirmasi (*affirmative action*) dengan tujuan suara atau perwakilan perempuan ada di dalam ranah politik, khususnya dalam proses pembuatan kebijakan. Demikian juga dengan jumlah populasi Indonesia yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kedua, 'kepentingan perempuan' (*women's interest*). Mengingat perempuan memiliki 'kepentingan' yang berbeda dengan laki-laki maka perempuan harus dilibatkan dalam proses pembuatan

kebijakan politik untuk memperbaiki kualitas hidup mereka yang tidak bisa diwakilkan begitu saja kepada laki-laki untuk memperjuangkannya. Ketiga, emansipasi (*emancipation*) dan perubahan (*change*) dalam proses politik (*political process*). Karena masyarakat patriarkal melahirkan ketidakseimbangan kekuasaan yang tajam antara laki-laki dan perempuan, maka struktur tersebut harus dibongkar melalui tindakan-tindakan politik dalam rangka mempromosikan masyarakat yang lebih setara dan adil, dan juga mandiri. Keempat, argumen 'difference'. Maksudnya perempuan memiliki pengalaman dan kualitas tertentu (moral, etika, dan gaya politik baru) yang perlu diintegrasikan dalam politik untuk mengubah kebijakan dan kelembagaan yang sangat 'male-centered'. Terakhir, argumen 'role model'. Keberadaan perempuan dalam lembaga representatif akan mendorong perempuan lainnya untuk ikut terlibat dalam politik (Squires, 1999). Untuk lebih ringkasnya, kita bisa melihat dalam tabel I.

Representasi Politik Perempuan dalam Teori

Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu bertanya apa sebenarnya yang dimaksud dengan representasi politik tersebut? Apa kompo-

Tabel I

Alasan	Argumentasi
Keadilan (<i>justice</i>) dan kesetaraan (<i>equality</i>)	Konstitusi, Cedaw, Konferensi Beijing, populasi
Kepentingan perempuan (<i>woman interest</i>)	Perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dengan laki-laki
Emansipasi (<i>emancipation</i>) dan perubahan (<i>change</i>)	Membongkar sistem patriarkal dalam negara
Perempuan membuat "perbedaan" (<i>difference</i>)	Tidak hanya "add" terhadap demokrasi, tetapi "engender" demokrasi
Perempuan menjadi "panutan" (<i>role model</i>)	Perempuan menjadi inspirasi dan pemberi semangat perempuan lainnya

Sumber: modifikasi Fuch dan Hoecker, 2004

nen utama dalam representasi politik tersebut? Apa juga yang sebenarnya direpresentasikan perempuan, dan bagaimana perempuan direpresentasikan? Adalah Hanna Pitkin, dalam buku klasiknya, *The Concept of Representation*, mengartikan representasi politik sebagai berikut:

"to represent" adalah aktivitas yang membuat perspektif, opini, dan suara warganegara 'hadir' (*present*) dalam proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik bisa terjadi apabila aktor-aktor politik bicara, mengadvokasi, menandakan, dan bertindak atas nama yang lain (*others*)." (Pitkin, 1967)

Suzanne Dovi, dalam salah satu kesempatan, melengkapi definisi Pitkin, mengajukan beberapa komponen utama dalam representasi politik perempuan sebagai berikut; (a) Beberapa pihak yang mewakili (anggota DPR, organisasi, gerakan, atau badan negara); (b) Beberapa pihak yang diwakilinya (konstituen, klien); (c) Sesuatu yang direpresentasikan (opini, perspektif, dan kepentingan), dan; (d) Setting di mana aktivitas representasi terjadi (konteks politik) (Dovi, 2006).

Sementara itu ketika kita bicara apa yang sebetulnya direpresentasikan, maka kita sedang mendiskusikan apa yang kita sebut sebagai 'representasi ideologis' (*ideological representations*). Ini kita artikan sebagai representasi ide-ide, nilai-nilai dan keyakinan kolektif yang menyangkut isu dan persoalan perempuan melalui partai dan organisasi politik. Kalangan perempuan harus selalu memonitor dan kritis terhadap apa yang direpresentasikan ini, dan sebaliknya mereka yang duduk dalam partai dan organisasi politik harus selalu bertanggung jawab dan transparan terhadap konstituennya atas ideologi yang mereka promosikan. Lain daripada itu, kita bicara

mengenai 'representasi fungsional' (*functional representation*). Ini adalah representasi dari kepentingan-kepentingan. Artinya, mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan di berbagai tingkatan, bertindak menjadi juru bicara untuk kelompok-kelompok kepentingan, khususnya kelompok perempuan (*substantive representation*). Ini memperlihatkan bahwa 'kepentingan perempuan' sendiri tidak tunggal atau homogen. Karenanya, kalangan aktivis perempuan harus selalu menyadari heterogenitas kepentingan diantara mereka yang tidak selalu harus diseragamkan, apalagi dipaksakan untuk seragam. Di sini dibutuhkan toleransi, solidaritas, dan kesadaran diantara mereka sendiri untuk bisa memilih kapan, di mana dan dalam isu dan kepentingan apa mereka bergerak bersama-sama atau sebaliknya, mereka bergerak sendiri-sendiri. Yang terakhir, kita bicara mengenai 'representasi sosial' (*social representation*) yang merupakan representasi identitas. Mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan harus merupakan 'cermin' (*mirror*) dari komposisi sosial elektoral dalam arti 'kehadiran' (*descriptive representation*). Mereka harus bicara dan bertindak atas nama kelompok-kelompok perempuan yang menjadi bagian dari mereka, dan juga mereka berbagi nilai-nilai dan pengalaman yang sama dengan kalangan perempuan pada umumnya (Squires, 1999).

Sementara itu pembicaraan bagaimana perempuan direpresentasikan, berhubungan dengan dua konsep utama. Pertama, konsep mikrokosmos (*microcosm*) yang merujuk bahwa perempuan berbagi ide, nilai, dan keyakinan sebagai perempuan dengan perempuan lainnya di dalam kelompok-kelompok dalam masyarakat. Mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan "*standing for*" kelompok-kelompok elektoral, khususnya perempuan. Kedua, konsep agen-

prinsip. Mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan harus bertindak atas nama yang diwakilinya. Mereka bertindak sebagai agen yang bertindak atas nama prinsip-prinsip yang dipromosikan mewakili kepentingan-kepentingan yang ada, khususnya perempuan.

Jika kita mengabungkan keduanya (antara 'apa' dan 'bagaimana'), maka kita bisa membagi dua representasi politik perempuan sebagai berikut. Pertama, representasi identitas sebagai representasi deskriptif atau kuantitatif perempuan. Mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan "*standing for*" perempuan. Sementara itu yang kedua, representasi kepentingan sebagai representasi substansif perempuan. Mereka yang berada dalam struktur kekuasaan "*acting for*" perempuan.

Ada apa dengan Gerakan Politik Perempuan?

Dalam proses transisi ke demokrasi, idealnya semua kalangan bebas terlibat secara politik dalam ruang-ruang publik yang semakin terbuka lebar. Tapi ironisnya, tidak hanya terjadi di Indonesia saja, justru dalam suasana transisi demokrasi, gerakan politik perempuan mengalami kegamangan, atau bahkan peran dan posisi yang tidak menguntungkan secara politik. Ada semacam dilema pilihan politik dari gerakan politik perempuan yakni antara politik formal atau masyarakat sipil. Persisnya, di satu sisi, tetap di luar (*civil society*) dan akibatnya cenderung menjadi eksklusif pada isu dan kepentingan perempuan --- *voiceless* dalam proses pembuatan kebijakan publik, atau di sisi yang lain, masuk dalam ranah politik formal (*political society*), dan ada kemungkinan besar seluruh isu dan kepentingan perempuan terkooptasi, ter subordinasi, dan bahkan masuk dalam daftar kebijakan yang bukan prioritas.

Akar masalah dari kegamangan politik gerakan politik perempuan ini bersumber dari beberapa persoalan mendasar yang dihadapi oleh gerakan itu sendiri. Persoalan-persoalan tersebut antara lain, (a) masih terfragmentasi dan tidak teroganisirnya antar unsur "pro-demokrasi" dalam gerakan politik perempuan; (b) masih kuatnya pengaruh atau trauma masa lalu dari politik "massa mengambang" terhadap gerakan sosial secara umum; (c) masih belum terbentuknya "minimum platform" yang disepakati oleh unsur-unsur gerakan politik perempuan, baik atas dasar isu maupun kepentingan bersama; (d) kurangnya perluasan basis dukungan dari gerakan; (e) tidak adanya kepemimpinan yang cukup kuat dalam gerakan politik perempuan; dan (f) adanya orientasi elitis masih sangat kuat dalam gerakan politik perempuan.

Karenanya tidak mengherankan juga, dalam suasana terbukanya ruang-ruang publik, gerakan politik perempuan justru tidak bisa berbuat banyak dalam mengisi dan mewarnai ruang-ruang publik tersebut. Meskipun demikian, sebagai catatan yang perlu ditekankan di sini, persoalan yang hampir serupa juga dihadapi umumnya gerakan pro-demokrasi yang lebih luas, baik itu yang diwakili oleh organisasi LSM maupun organisasi rakyat. Demokrasi yang sedang bergulir ini ternyata tidak disertai dengan representasi politik yang memadai. Sebagai konsekuensinya, proses konsolidasi demokrasi pun masih sangat jauh untuk bisa terlaksana. Dengan kata lain, sebagai prosedural, proses demokratisasi yang berjalan dilihat sebagai kegiatan yang teratur dari pemilihan umum yang jujur dan adil, serta pengenalan norma-norma dasar (misalnya, tidak adanya intimidasi, adanya persaingan minimal dari dua partai politik, dan adanya hak pilih yang inklusif) yang membuat

pemilihan umum yang bebas menjadi mungkin. Definisi ini merujuk kepada tuntutan akan pengenalan hak-hak individual liberal (mis: kebebasan beragama, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan pers, dan lainnya). Ini yang kemudian dipahami sebagai demokrasi prosedural atau formal. (Grugel, 2002). Ada tahap lain yang harus dicapai untuk lebih meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia yakni pengenalan dan perluasan hak-hak warga negara dan pendirian sebuah negara demokratis (demokrasi substansial). Ini artinya, demokrasi bukan hanya sekedar apakah hak-hak individu ada pada peraturan atau undang-undang (*on paper*) sebagaimana terjadi demokrasi prosedural atau formal, tapi apakah hak-hak tersebut memiliki makna yang nyata bagi masyarakat (*real meaning for people*) sebagaimana yang dipahami dalam demokrasi substansial. Yang belakangan ini pada dasarnya berkaitan dengan masalah redistribusi kekuasaan (*redistribution of power*) (Grugel, 2002)

Representasi Politik Perempuan: Ada Kenaikan, Masih Rendah!

Terlepas dari perdebatan yang muncul antara apakah suara terbanyak atau adanya tindakan afirmatif, representasi politik perempuan dalam pemilu legislatif 2009 mengalami kenaikan. Memang untuk sebagian ini merupakan kinerja politik dari gerakan perempuan yang mengesankan. Tapi nanti dulu, apakah memang benar demikian? Sedikitnya ada dua hal yang bisa kita ungkapkan. Pertama, kenaikan presentase menjadi 11,09% ini ternyata masih jauh dari "critical mass" (30%) untuk bisa memberi warna dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan dengan "keluaran" (*output*) yang ramah perempuan (*women friendly*). Kedua, apakah peran dan posisi perempuan dalam struktur kekuasaan selalu merepresentasikan kepentingan perempuan (*descriptive representation*). Memang tidak selalu, dan ini sangat berkaitan dengan profil anggota parlemen perempuan

Tabel II
Representasi Politik Perempuan dalam Parlemen

Periode	Perempuan	Laki-laki
1955-1960	17 (6.3 %)	272 (93.7 %)
Konstituante 1956-59	25 (5.1 %)	488 (94.9 %)
1971-1977	36 (7.8 %)	460 (92.2 %)
1977-1982	29 (6.3 %)	460 (93.7 %)
1982-1987	39 (8.5 %)	460 (91.5 %)
1987-1992	65 (13 %)	500 (87 %)
1992-1997	62 (12.5 %)	500 (87.5 %)
1997-1999	54 (10.8 %)	500 (89.2 %)
1999-2004	46 (9 %)	500 (91 %)
2004-2009	61 (11.09 %)	489 (88.9 %)

Sumber: dari berbagai data

yang hadir sebagai hasil pemilu legislatif yang baru lalu. Puskapol FISIP UI, mencatat adanya keberagaman latar belakang caleg perempuan yang terpilih, dan sekurang-kurangnya ini bisa dibagi dalam 4 kategori sebagai berikut; (a) figur populer di mana basis rekrutmennya merujuk pada aspek popularitas calon (finansial, jaringan massa pengikut, selebritas); (b) dinasti politik di mana basis rekrutmen merujuk pada aspek ikatan kekeluargaan dalam hubungan politik; (c) kader partai politik di mana basis rekrutmennya berdasarkan pada keterlibatannya dalam aktivitas partai; dan (d) aktivis LSM di mana basis rekrutmennya mereka yang bergerak di dunia LSM. Ternyata dari 4 kategori ini, dinasti politik menempati presentase yang besar (42%), kemudian kader partai (30%), figur populer (25%) dan terakhir aktivis LSM (3%) (Puskapol FISIP UI, 2009). Dari sana kita bisa meraba-raba bagaimana anggota parlemen perempuan merepresentasikan kepentingan dan aspirasi perempuan. Memang tidak adil karena mereka baru masuk tahap awal dari kehadiran mereka yakni terpilih sebagai anggota parlemen. Selanjutnya, kita baru bisa melihatnya dalam kinerja, tingkah laku dan keputusan politik yang muncul nanti, apakah ramah terhadap perempuan atau tetap sama saja dalam nafas patriarkal?

Untuk melihat adanya kenaikan presentase anggota parlemen perempuan selama ini, ada baiknya kita melihat tabel II ini.

Apa perempuan membuat "perbedaan" dalam Politik?

Pertanyaan ini hampir selalu muncul kepermukaan pada saat banyak pihak (baca: laki-laki) mempertanyakan soal sumbangan dan kapasitas yang dimiliki ketika kalangan perempuan memutuskan untuk terlibat dalam ranah publik, khususnya dalam proses pengambilan kebijakan. Me-

ngan tidak ada jawaban yang pasti di sini, apalagi anggota parlemen perempuan yang terpilih baru aktif setelah pelantikannya pada bulan Oktober nanti. Tapi minimal ada 2 dimensi yang bisa diajukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, berkaitan dengan kinerja dan gaya dalam peranan politik mereka. Merujuk pada kajian perbandingan, meski jauh dari sistematis, ada banyak bukti yang memperlihatkan bahwa perempuan memiliki gaya politik yang berbeda (lebih *compassionate, caring dan collaborative*) dibandingkan laki-laki (Norris 1996). Sementara itu yang kedua, berkaitan dengan prioritas kebijakan yang diambil ketika mereka terpilih sebagai anggota parlemen perempuan. Ada banyak bukti, berdasarkan kajian komparatif hubungan antara gender dan kebijakan di negara-negara demokrasi Barat, yang menunjukkan adanya sudut pandang yang berbeda, meski tidak selalu sangat tajam, antara laki-laki dan perempuan dalam memprioritaskan kebijakan yang dipilih.

Untuk kasus Amerika Serikat misalnya, anggota parlemen perempuannya ternyata lebih menampilkan karakternya yang lebih 'liberal' dalam sikap dan tingkah laku politiknya, dan membuat 'perbedaan' dalam kebijakan publik yang ada (Thomas, 1994). Anggota parlemen perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar, dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki, dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan, dan perempuan (Thomas dan Welch, 1991). Ternyata pilihan ini tidak jauh berbeda dengan anggota parlemen perempuan di negara-negara Skandinavia. Mereka dalam aktivitas politiknya menaruh perhatian pada isu-isu reproduksi seperti kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, keluarga dan kebijakan-kebi-

jakan konsumen (Skard dan Haavio-Mannila, 1985).

Tentu tidak terlalu tepat untuk menggeneralisasi kecenderungan seperti ini akan terjadi di semua negara yang memiliki anggota parlemen perempuan, termasuk untuk kasus Indonesia. Meskipun demikian, ada baiknya kita mengajukan 3 asumsi jika kita bicara mengenai perempuan dan politik. Pertama, setiap dampak politik akan selalu berbeda akibatnya terhadap laki-laki dan perempuan. Kedua, setiap dampak politik akan selalu mengubah hubungan gender antara laki-laki dan perempuan, dan ketiga, perempuan dan laki-laki sebagai subyek politik akan menampilkan gaya dan kinerja yang berbeda. Atas dasar asumsi tersebut, kita berharap bahwa prioritas kebijakan yang lebih ramah perempuan akan lebih menjadi lahan perjuangan perempuan yang duduk sebagai anggota parlemen di Indonesia.

Representasi yang lebih Bermakna

Meskipun memang sangat strategis, kita pun tahu bahwa perjuangan kuota 30% hanyalah salah satu elemen utama dalam upaya mempromosikan representasi politik perempuan. Sudah saatnya, setelah melalui 3 pemilu pasca Orde Baru, kalangan perempuan memperluas makna representasi politik perempuan tersebut. Keterlibatan perempuan dalam sistem politik untuk tujuan representasi memang diperlukan (*necessary*), tapi sudah pasti tidak memadai (*sufficient*) karenanya ini harus diimbangi dengan tindakan-tindakan politik dalam kelompok-kelompok dan gerakan perempuan (Lister, 1997). Artinya, *go politics* dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik. Tapi ada dua dimensi utama di sini yakni yang menyangkut upaya untuk mempen-

garuhi proses-proses pengambilan keputusan publik, dan usaha untuk membangun basis sosial representasi politik perempuan baik melalui lembaga-lembaga representasi politik, baik formal maupun informal, dan partisipasi langsung (*direct democracy*). Ada rekoneksi antara gerakan perempuan, yang menjadi bagian dari gerakan sosial, dengan aksi-aksi politik, yang merupakan bagian dari demokrasi representasi.

Karena itu di masa-masa mendatang, khususnya menjelang tahun 2014, kalangan aktivis dan politisi

perempuan sudah harus melangkah satu langkah lagi dengan memperhitungkan representasi lainnya selain kuota 30%. Pada dasarnya, kalangan aktivis dan politisi perempuan merepresentasikan 3 elemen (*triple representatives*) yakni mewakili pemilihnya (*functional*), partai dan organisasi politiknya (*ideology*) dan konstituen perempuan sebagai identitas (*social*) (Lovenduski, 2001). Bagaimana mensinergikan ketiganya dalam rekoneksitas tindakan-tindakan politik dengan gerakan sosial perempuan, merupakan tantangan

yang harus dijawab kalangan perempuan ditengah-tengah kritik, keraguan dan bahkan cibiran masyarakat (baca: laki-laki pada umumnya) atas kemampuan dan keberdayaan mereka. Memang tidak mudah, butuh energi yang panjang dan juga waktu yang relatif lama untuk mewujudkan representasi politik perempuan yang lebih bermakna dalam proses demokrasi di Indonesia. Tapi satu hal yang pasti, demokrasi tanpa melibatkan kalangan perempuan di dalamnya bukan lah merupakan demokrasi yang sejati. (nis).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Fuchs, Gesine dan Beate Hoeker (2004), *"Without Women merely a Half-Democracy"*, International Policy Analysis Unit, Friedrich Ebert Stiftung
- Pitkin, Hanna (1967), *The Concept of Representation*. Berkeley: University Berkeley Press,
- Lister, R. (1997), *Citizenship: Feminist Perspective*. Basingstoke: MacMillan
- Lovenduski, Joni (2001), *"Women and Politics: Minority representation or critical mass?"*. Parliamentary Affairs 54 (4).
- Norris, P (1996), *"Women politicians: transforming Westminster?"*, dalam J. Lovenduski and P. Norris (eds), *Women in Politics*. Oxford University Press.
- Squires, Judith (1999), *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity
- Skard, T dan Haavio-Mannila (1985), *"Women in Parliament"*, dalam E. Haavio-Mannila et all (eds), *Unfinished Democracy: Women in Nordic Politics*. Pergamon, Oxford
- Thomas, S. (1994), *How Women Legislate*. Oxford University Press.
- Thomas, S dan S Welch, (1991), *"The Impact of Gender on the Activities and Priorities of State Legislatures"*, *Western Political Quarterly*, 44, 2.



HAPSARI

HIMPUNAN SERIKAT PEREMPUAN INDONESIA

HAPSARI adalah organisasi massa perempuan nonpemerintah, nonsektarian, nonpolitik, yang berbentuk perhimpunan (federasi) yang beranggotakan serikat-serikat perempuan independen tingkat kabupaten. Didirikan tahun 1990 atas inisiatif dari beberapa anak perempuan desa, dari desa Sukasari (sekitar 80 km dari Kota Medan, ibu kota propinsi Sumatera Utara). Awalnya, HAPSARI berbentuk Kelompok Kerja. Kemudian, pada tahun 1997, berbadan hukum dalam bentuk yayasan.

Saat ini, ada tujuh (7) serikat perempuan anggota HAPSARI yang menyebar di Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. HAPSARI mengemban mandat menjadi wadah perjuangan bersama membangun gerakan perempuan untuk ikut mewujudkan perubahan kehidupan yang lebih berkeadilan dan meninggikan derajat kemanusiaan kaum perempuan yang selama ini selalu direndahkan.

Pada Oktober tahun 2001, melalui Kongres I, HAPSARI menjadi organisasi berbentuk federasi, yang kemudian berubah nama menjadi HAPSARI-Federasi Serikat Perempuan Merdeka (HAPSARI-FSPM). Pada Kongres II HAPSARI bulan Desember tahun 2004, penyebutan FSPM dihilangkan dan diganti dengan akronim Himpunan Serikat Perempuan Indo-

nesia dan tetap disebut HAPSARI.

Sebagai organisasi perempuan, HAPSARI mempunyai cita-cita ideal, visi, dan misi yang hendak diperjuangkan. Cita-cita, visi, dan misi HAPSARI adalah sebagai berikut:

VISI/CITA-CITA IDEAL :

Terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa ada penindasan antara perempuan dan laki-laki dengan memberikan penghargaan yang sama terhadap hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

VISI OPERASIONAL :

Menjadi organisasi gerakan perempuan basis (kelas bawah) yang terpercaya dan berhasil mewujudkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, tanpa ada penindasan antara perempuan dan laki-laki.

MISI (MANDAT OPERASIONAL):

1. Melakukan penumbuhan dan penguatan gerakan perempuan, sebagai bagian dari gerakan rakyat untuk melakukan perubahan sosial budaya dan politik yang berkeadilan di Indonesia.
2. Menumbuhkan dan menguatkan kepemimpinan politik perem-

puan lokal, sebagai bagian dari kekuatan politik perempuan nasional.

3. Melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan baik yang dialami oleh anggota khususnya dan perempuan umumnya.

Kemudian, dalam rangka mencapai cita-cita ideal, visi, dan misi sebagaimana di atas, HAPSARI mempunyai program strategis sebagai berikut:

1. Memperkuat organisasi dan kepemimpinan perempuan (khususnya anggota HAPSARI) agar lebih mandiri dalam memperjuangkan cita-cita terjadinya perubahan sosial budaya dan politik yang adil untuk perempuan.
2. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota serikat perempuan agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan ketidakadilan sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat.
3. Mendidik perempuan (khususnya anggota HAPSARI) untuk memahami politik perspektif perempuan sebagai sarana melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik dan hukum yang adil untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan.



Sekretariat Nasional HAPSARI
Jl.Keramat Gg.Katu No.117 Kel.Syahmad
Kec.Lubuk Pakam 20515 Deli Serdang Sumut
Telp/Fax : 061-7782 1398
Email: hapsari1@indosat.net.id

4. Mensosialisasikan Hak Azasi Perempuan sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM) dan anti kekerasan berbasis gender kepada masyarakat luas di wilayah kerja HAPSARI khususnya dan wilayah Indonesia umumnya.

Catatan Pemilu Legislatif 2009

Upaya menumbuhkan dan menguatkan kepemimpinan politik perempuan adalah mandat yang tertuang dalam salah satu rumusan misi organisasi HAPSARI, yaitu Menumbuhkan dan menguatkan kepemimpinan politik perempuan lokal sebagai bagian dari kekuatan politik perempuan nasional. Oleh karena itulah, HAPSARI memutuskan untuk ikut pemilihan umum legislatif 2009. Kemudian, disusunlah sebuah strategi yang bertujuan untuk menguatkan kepemimpinan politik atau kemudian disebut sebagai "gerakan politik perempuan" melalui Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan bulan April.

Dalam pemilihan umum legislatif 2009, HAPSARI memang belum mampu meloloskan wakilnya ke DPR. Dari hasil perolehan suara, sampai sekitar tanggal 23 April 2009 diketahui bahwa perolehan total jumlah suara caleg HAPSARI adalah sebanyak 889

suara. Jumlah ini adalah jumlah suara sah untuk caleg tanpa memasukkan jumlah suara partai dan jumlah suara dua orang caleg lain dari partai yang sama yang jumlahnya tidak lebih dari 500 suara. Kemudian, pada bulan Maret 2009, diketahui (tercatat jumlah anggota kelompok pendukung) yang diperkirakan akan memberikan suara adalah sebanyak 1.591 orang yang berada di 22 desa, 43 kelompok di 2 kecamatan.

Jadi, setelah melalui waktu pengorganisasian selama 7 bulan mulai bulan September 2008 – Maret 2009 dengan berbagai strategi pengorganisasian, mulai dari pertemuan rutin dan pembentukan kelompok dengan penjelasan konsep, fasilitasi kegiatan kelompok (mulai dari pinjaman modal, kegiatan peternakan, Sanggar Belajar Anak, fasilitasi kegiatan pengembangan keterampilan, sumbangan perlengkapan kegiatan kelompok, dll) serta pendidikan pemilihan (bagaimana menyontren), total jumlah anggota kelompok yang memberikan suara hanya sebesar 56 % saja (889 orang dari 1.591 orang yang terdaftar). Sisanya, 30 % (469 orang) tidak memberikan suara (atau memberikan suaranya kepada caleg lain), 11 % (182 orang) tidak terdaftar dalam DPT, dan 3 % (51 orang) suaranya batal.

Meskipun target politik HAPSARI dalam pemilu legislatif kemarin kurang berhasil, tetapi banyak pelajaran penting yang didapat. Pertama, HAPSARI mampu menemukan metode pengorganisasian. Dari upaya pengorganisasian dukungan untuk pencalegkan, telah terbentuk kelompok baru sebanyak 26 Kelompok (menjadi 43 Kelompok dari sebelumnya hanya 17 Kelompok). Ini adalah fakta baru yang penting dicatat sebab selama ini begitunya HAPSARI membentuk kelompok-kelompok perempuan karena masih kuatnya stigma organisasi perempuan masa lalu yang pernah dilarang, yaitu Gerwani atau PKI. Melalui pembentukan kelompok pada masa pencalegkan, isu itu sama sekali tidak terdengar. Kedua, kerja politik. HAPSARI mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana melakukan kerja politik praktis. Jika kerja ini ditempatkan sebagai strategi membangun gerakan politik perempuan, maka setidaknya ditemukan tiga persyaratan yaitu, perlunya penguasaan konsep dan strategi kerja (gerakan politik perempuan), penguasaan wilayah kerja (teritori), penumbuhan pemimpin dan kader-kader gerakan (ketokohan dan pengaruh) di komunitas.

JALAN KETIGA, BUKAN SEKEDAR JALAN TENGAH

IVAN HADAR (Wakil PemRed Jurnal SosDem)

Pilpres 2009 di Indonesia cukup menarik karena diwarnai perdebatan terkait ideologi ekonomi para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Boediono yang berpasangan dengan SBY, ditenggarai banyak pihak sebagai salah satu pengusung utama ekonomi neoliberal di Indonesia. Tuduhan yang langsung dibantah lewat pidato politiknya di saat deklarasi pencalonannya sebagai wakil presiden mendampingi SBY.

Sebagai pemahaman awal, kalau dalam liberalisme klasik manusia dipandang sebagai homo economicus dalam kegiatan ekonomi, dalam agenda neo-liberalisme manusia dilihat sebagai makhluk ekonomi dalam semua aspek kehidupan mencakup bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Ketika dibatasi pada bidang ekonomi, neoliberalisme juga disebut sebagai Fundamentalisme Pasar. (Herry Priyono, *Sesat Neoliberalisme*, Kompas 28/5/2009)

Setahun pasca Tragedi 11 September 2001 yang meruntuhkan Menara Kembar WTC (sebagai simbol kapitalisme AS) yang menewaskan ribuan korban tak berdosa, di hadapan 25.000 pendukung gerakan

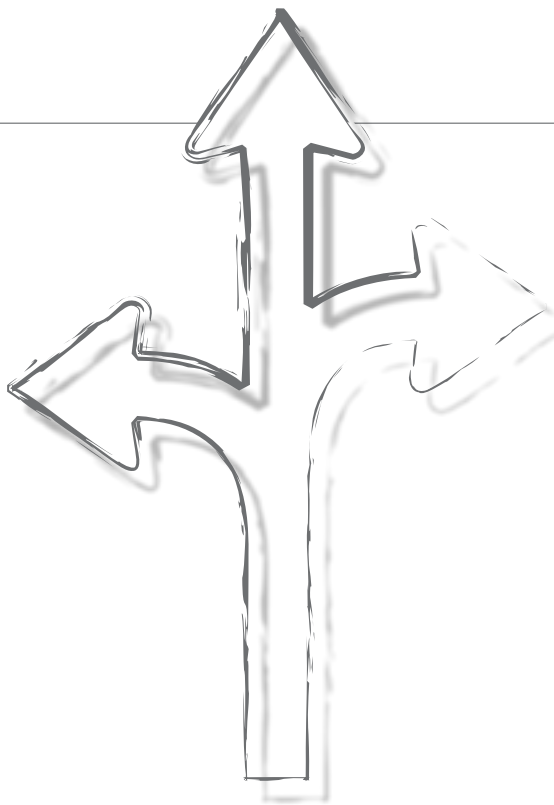
perdamaian di kota Koeln, Jerman, pemenang Nobel Perdamaian Johan Galtung berbicara tentang tiga corak fundamentalisme yang telah menjadikan penduduk bumi sebagai tawannya. Tiga corak fundamentalisme tersebut, meski berasal dari *'culture'* berbeda namun memiliki filosofi serupa, yaitu faksi Wahabi Osama bin Laden; faksi puritan Protestan asal Inggris yang kemudian menemukan lahan subur di Amerika Serikat, serta fundamentalisme pasar.

Menurut Galtung, pengikut fundamentalisme corak pertama dan kedua adalah mereka yang bertanggungjawab terhadap perbuatan kriminal di belakang Tragedi 11 September dan pemboman Afganistan serta Irak dengan korban puluhan ribu warga sipil tak berdosa. Keduanya, merasa sebagai manusia pilihan Tuhan dengan doktrin: "siapa pun yang tidak ikut saya adalah musuh saya" ("*...he/she who is not with me is against me*"). Keduanya begitu mirip, sehingga Galtung memplesetkan "George bin Laden dan Osama Bush, yang demi keyakinan, merasa bahagia karena mendapat pahala dengan membunuh ribuan manusia."

Corak ketiga, Fundamentalisme

Pasar, tak kalah kejam. Para pengikutnya tidak peduli ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap hari, 100.000an orang mati terutama karena pasar merampok makanan dan kesehatan mereka. Betapa tidak. Seperempat mereka yang mati itu semata-mata akibat lapar. Bagi George Soros, yang mempopulerkan istilah ini, Fundamentalisme Pasar saat ini demikian berkuasa sehingga siapa pun yang tidak berkiblat pada kebebasan pasar - karena mempunyai gagasan serta cita-cita ekonomi yang lain - bakal dicap sebagai sentimental, tidak logis dan naif. Soros yang sebenarnya memperoleh keuntungan miliaran dolar dari kapitalisme global, menyebut "Fundamentalisme Pasar sebagai ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan semua bentuk ideologi totalitar yang pernah ada." Termasuk, ideologi Nazi Jerman yang selama ini diakui paling kejam. Soros sendiri, nyaris menjadi tahanan Kamp Auschwitz dan hanya bisa lolos karena menggunakan dokumen palsu.

Pemenang Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz menyebut Fundamentalisme Pasar adalah basis teori - *Thatcherisme, Reaganomics* dan



“Konsensus Washington” - untuk mempercepat privatisasi dan liberalisasi serta menjadikan Bank Sentral sebagai lembaga independen dengan satu tugas, yaitu memerangi inflasi. Fundamentalisme Pasar juga memiliki keterkaitan sangat erat dengan Neoliberalisme – aliran dominan yang menjadi dasar berbagai kebijakan G8, IMF dan Bank Dunia.

Globalisasi neoliberalisme

Globalisasi adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena. Di satu sisi, revolusi dalam bidang komunikasi, misalnya, telah dengan cepat mengatasi (masalah) jarak. Di sisi lain, teknologi baru juga telah ikut memunculkan sebuah sistem ekonomi yang didominasi oleh uang. Yang paling berperan dalam era globalisasi saat ini adalah *finance capital*, posisi yang sebelumnya dipegang oleh *industry capital*. Perkembangan ini, dimungkinkan oleh instabilisasi finansial berbarengan dengan deregulasi ekonomi-moneter, liberalisasi pasar uang dalam negeri dan dibukanya pasar uang bagi transaksi internasional agar memudahkan spekulasi finansial. Teknologi informasi mutakhir telah mempercepat proses

integrasi pasar uang dunia.

Bagi para pendukungnya, globalisasi yang didominasi paradigma neoliberal ini, diyakini sebagai “mesin kemakmuran”. Sementara bagi kelompok penentangannya, globalisasi identik dengan “ledakan profit, yang semakin menyengsarakan orang miskin.” Paling lambat sejak demonstrasi spektakuler anti WTO (*World Trade Organization*) di Seattle, akhir 1999, menjadi jelas bahwa oposisi terhadap globalisasi telah pula menglobal. Hal yang juga diakui para pemimpin dunia. Bill Clinton, misalnya, sewaktu di Seattle mengatakan: “Bila kita tidak ingin, terjadi protes dalam setiap konferensi perdagangan, maka WTO harus memberikan kesempatan agar suara buruh, aktivis lingkungan dan negara berkembang bisa didengar. Setiap keputusan harus transparan, akses ke dokumen pun harus dibuka, begitu pula kejelasan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.” (*Seattle Post Intelligencer*, 1/12/99) Hal yang mirip diusulkan Pascal Lamy, mantan Komisaris Perdagangan Uni Eropa. “Sebuah kenyataan”, demikian Lamy, “bahwa implisit pada setiap konferensi dan pertemuan adalah hak untuk melakukan protes, dan kami harus mendengar (protes) mereka.” (*Plenary Speech to WTO Ministerial Conference in Seattle*, 30/11/99)

Berbagai protes terhadap globalisasi neoliberal yang semakin gencar ini, telah memicu diskusi tentang keterbatasan pasar dan seberapa perlu negara harus melakukan intervensi (baca: keberpihakan) dalam mengupayakan kesejahteraan sosial.

Berbeda dengan claim pendukung neoliberal, semaraknya perekonomian usai Perang Dunia II, tidak melulu disebabkan oleh liberalisme perdagangan, tetapi juga berkat kebijakan kesejahteraan oleh negara. Ketika itu, sebuah konsep ekonomi (*new deal*) berlandaskan teori Keynes diluncurkan pemerintah AS. Sasaran-

nya, peningkatan permintaan pasar dan *deficit spending* untuk memberantas pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Lewat ‘bantuan pembangunan’ (baca: utang), negara-negara berkembang diasumsikan mampu mengejar ketertinggalannya dari negara kaya.

Di satu sisi, konsep neoliberal, diakui bisa bermanfaat dalam upaya mengurangi mentalitas rent seeking para birokrat. Namun, pada sisi lainnya, Fundamentalisme Pasar sebagai perwujudannya dalam bidang ekonomi meminggirkan peran negara sebagai penyeimbang ini, gagal memenuhi janjinya. Kesenjangan antarnegara kaya dan miskin, serta antara lapis sosial dalam sebuah negara semakin melebar. Tiga contoh berikut, memperjelas keterbatasan dari berbagai solusi yang melulu bertumpu pada premis ekonomi pasar.

Pertama, asumsi fundamentalisme pasar bahwa pasar uang tidak hanya membantu penggunaan kapital secara optimal, tetapi juga menjamin pertumbuhan dan pengadaan lapangan kerja, tidak terbukti. Penyebabnya, pasar modal menjadi pasar spekulatif yang digelembungkan (*spekulativer Marktaufblähung*). Fluktuasi kurs di bursa efek, tidak menggambarkan kekuatan ekonomi sesungguhnya dari berbagai perusahaan anggotanya. Tanpa regulasi, pasar modal global bisa memengaruhi kuat-rapuhnya stabilitas ekonomi sebuah negara, kawasan atau bahkan dunia, seperti yang diperlihatkan oleh “Krisis Asia” yang dampaknya masih terasa bagi Indonesia hingga saat ini.

Kedua, kekuatan pasar tidak mampu mencegah krisis lingkungan global. Meski harus pula diakui, kegagalan yang sama dialami oleh negara, terutama terkait maraknya monopoli dan oligopoli. Ketiga, penelitian Prittchett (1996) membuktikan bahwa dalam proses globalisasi

terjadi kesenjangan yang meluas. Pemenangnya adalah negara-negara kaya anggota OECD, termasuk korporasi yang mengeruk kekayaan alam negara berkembang.

Paradigma ekonomi neoliberal memiliki tiga komponen pokok. Pertama, ia mengangkat peran pasar di atas peran negara, *civil society* dan sistem demokrasi partisipatoris dalam menata ekonomi dan arus barang dan modal. Kedua, mende-wakan peran dan cakupan sektor privat dan kepemilikan privat di atas kepentingan publik. Ketiga, menganggap bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) hanya dapat dicapai melalui pasar. Sehingga, ketika kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberalnya ternyata justru tidak membawa hasil seperti yang dijanjikan, maka kesalahan akan ditimpakan semata kepada tata kelola pemerintahan yang buruk (*bad governance*).

Paradigma inilah yang dianggun-gungkan oleh para promotor neoliberal, di antaranya Margaret Thatcher di Inggris, dan Ronald Reagan serta George W. Bush di Amerika Serikat, pada periode 1980-an dan 2000-an, dengan mengatakan "*There is no alternative!*" ("Tidak ada pilihan!"). Gerakan progresif sedunia melawan neoliberalisme menyerukan alternatif terhadap globalisasi neoliberal. Salah satunya adalah kerja sama gerakan sosial sedunia melalui World Social Forum (WSF) dengan semboyan "*Another world is possible*".

Perlawanan inilah yang disebut oleh Steger (Globalism, 2005) sebagai *globalization from below* (globalisasi dari bawah) yang merupakan anti-tesis dari *globalization from above* (globalisasi dari atas). Nasib dunia tidak boleh hanya ditentukan oleh para korporat besar dan para elite yang berkumpul dalam WTO. Nasib orang-orang miskin tak boleh diperdagangkan sebagai *trade-off* dari liberalisasi

perdagangan sebagaimana terjadi pada sidang-sidang tawar menawar di WTO.

'Globalisasi dari atas' harus dilawan sebelum dunia seluruhnya lunas dijual kepada para pedagang. 'Globalisasi dari bawah' mengangkat suara-suara yang selama ini tak didengarkan dalam WTO dan *World Economic Forum* (WEF), yakni suara masyarakat miskin dan marjinal untuk turut serta menentukan arah dunia. "Globalisasi dari bawah" menyerukan agar globalisasi neoliberal dengan perdagangan bebasnya (*free trade*) digantikan dengan perdagangan yang adil (*fair trade*). Sebagaimana dikatakan oleh Steger, "relasi pasar memang penting, akan tetapi demi melayani kebutuhan manusia, maka pasar harus diabdikan pada kesejahteraan seluruh manusia".

Sebenarnya, globalisasi bukan sesuatu yang baru. Begitu pula dengan upaya untuk tidak terbawa arus deras pasar bebas globalisasi yang bisa menenggelamkan. Simak, misalnya, apa yang dikatakan salah seorang presiden AS pada masa-masa awal lepas dari kolonisasi Inggris.

"Selama berabad-abad Inggris telah bergantung pada proteksi, melakukannya secara ekstrim dan telah memperoleh manfaat yang besar darinya. Tak ada keraguan bahwa karena sistem itulah, ia memperoleh kekuatannya kini. Setelah dua abad, Inggris telah menemukan saat yang nyaman untuk mengadopsi perdagangan bebas, karena mereka menganggap proteksi tak lagi menguntungkan mereka. Karena itu, saudara-saudara sekalian, apa yang saya ketahui tentang negeri kita ini, telah membawa

saya pada suatu kepercayaan, bahwa dalam tempo 200 tahun lagi, setelah Amerika telah tidak memerlukan manfaat proteksi lagi, negeri ini akan mengadopsi perdagangan bebas." (Frank 1987: 164, dikutip dari

Chang 2005: 108-09)

Pidato berapi-api di atas diucapkan oleh pahlawan perang sipil Amerika Serikat, Ulysess Grant, yang menjadi Presiden negara itu pada periode 1868-76. Amerika Serikat ketika itu resah dengan jargon dan kampanye pasar bebas yang dicanangkan oleh Inggris, negara adidaya pada waktu itu. Amerika Serikat memang pantas resah. Ia baru saja merdeka, melampaui saat-saat sulit perang sipil (1861-1865), dan kini saatnya negeri itu melakukan pembangunan ekonomi secara besar-besaran. Negeri itu tak mau, kebijakan pembangunannya dilucuti oleh kampanye pasar bebas dari negara adidaya yang telah membangun industrinya dengan proteksi. Ha-Joon Chang, ekonom pembangunan dari *University of Cambridge* (Inggris) mengatakan bahwa kampanye perdagangan bebas saat ini bagaikan upaya untuk menendang tangga pembangunan (*kicking away the ladder*) agar negara-negara berkembang tidak bisa memakai tangga itu untuk mengejar ketertinggalannya.

Sejak beberapa tahun terakhir, berlangsung *World Social Forum* (WSF) yang dimaksudkan sebagai pertemuan puncak anti-globalisasi yang berlangsung setiap tahun. Tujuannya, menawarkan "globalisasi alternatif" dan diadakan untuk menandingi *World Economy Forum* (WEF) yang, setiap tahun, dilakukan di Davos, Swiss. Pertanyaan mendasar apakah globalisasi menjadi hambatan, seperti diyakini pencetus WSF, atau peluang seperti yang dipromosikan oleh WEF, patut dicermati. Terutama pengaruhnya bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Para pendukung globalisasi neoliberal, misalnya WTO dan Bank Dunia, menyuarakan kabar gembira, bahwa liberalisasi pasar otomatis memicu pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran. Namun, serta merta,

pertanyaan yang muncul adalah, kemakmuran bagi siapa? Mereka yang kritis mengatakan bahwa 'berkah' globalisasi hanya bagi negara-negara industri kaya. Sementara itu, hanya sedikit negara berkembang - itu pun, hanya segelintir penduduknya - yang memperoleh berkah globalisasi.

Bertolak belakang dengan ramalan OECD dan WTO, hampir semua negara, dengan caranya masing-masing, akan diuntungkan dalam liberalisasi perdagangan dunia. Pengecualiannya, beberapa negara di pinggiran Sahara, Afrika, yang hanya mampu mengeksport sedikit bahan bakunya yang nyaris belum diolah. Apa yang secara politik-perdagangan, dulu menjadi "kekuatan" negara berkembang, yaitu tenaga kerja murah, kini semakin membludak jumlahnya.

Dalam studinya tentang "*Trade, Growth and Poverty*" (2001), Bank Dunia pun membuktikan adanya korelasi antara pengintegrasian sebuah negara ke dalam pasar (neoliberal) dunia dan pertumbuhan ekonominya. Di kebanyakan negara yang "terglobalisasi", ditunjukkan telah terjadi pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, hambatan negara berkembang untuk berintegrasi ke dalam pasar dunia, menurut sebuah studi Bank Dunia lainnya (*Globalization, Growth and Poverty*, 2002), adalah proteksi agrarian oleh negara-negara kaya anggota OECD serta hambatan impor tekstil bagi perusahaan dalam negerinya. Artinya, dalam sektor-sektor yang memiliki arti eksistensial bagi banyak negara berkembang inilah, tidak berlaku pasar bebas. Sebenarnya, disinilah harus ada terobosan dalam perundingan WTO berikutnya, atau prinsip pasar bebas akan kehilangan kredibilitasnya. Hal ini, berkaitan erat dengan pertanyaan, bagaimana globalisasi ditata secara politis agar memungkinkan tercapainya pemerataan pembangunan?

Kesenjangan global

Pertanyaan tersebut, sekaligus mengandung tiga pertanyaan yang harus segera dicarikan jawabannya. Pertama, pertanyaan strategis, yaitu bagaimana globalisasi ditata secara politis. Kedua, berkaitan dengan bagaimana globalisasi ditata dalam *power constellation* dunia saat ini. Dan, ketiga, pertanyaan normatif tentang bagaimana pembangunan yang adil dalam masyarakat dunia bisa dicapai.

Jawaban atas pertanyaan tersebut, antara lain diberikan oleh Lembaga Penelitian Pembangunan dan Perdamaian (SEF, 2003) dalam studinya berkaitan dengan konsep "*Global Governance*". Pertama, tatanan politis globalisasi berarti mempererat kerjasama internasional, karena tugas bersama seperti *Millenium development Goals (MDG)* hanya bisa dicapai lewat upaya bersama. Sebenarnya, dua dekade lalu, "Laporan Brandt" (*Brandt's Report*), telah berbicara tentang hal yang mirip yaitu "kebijakan masyarakat global" yang bernuansa social demokrasi - keseimbangan pasar dan peran afirmatif negara.

Kedua, untuk memungkinkan hal tersebut, tidak cukup sekedar lewat bantuan atau kredit murah, tetapi sejak awal harus diberlakukan aturan bersama yang berorientasi pada pasar (bebas) sosial-ekologi. Landasan normatifnya bisa ditemukan pada kodifikasi HAM sosial dan Konvensi Rio tentang pembangunan global berkelanjutan.

Ketiga, keharusan terjadinya perubahan struktur politik, baik struktur dalam negeri maupun internasional. Dalam negeri, diperlukan reformasi struktur politik, sosial dan ekonomi dengan tujuan memperkuat dinamika ekonomi pasar sosial, memperkuat kemampuan bersaing, penegakan hukum, keadilan sosial dan demokrasi. Sementara itu, di tataran internasional, harus ada

reformasi struktur di negara-negara industri kaya anggota OECD, yang selama ini berkat penguasaan pasar memperoleh keuntungan berlimpah dari pasar dunia. Perubahan struktur internasional yang berorientasi pada global sustainability, mengharuskan penghapusan proteksi perdagangan di negara-negara kaya, terutama dalam sektor agraria. Untuk memproteksi pasarnya, per tahun, negara anggota OECD memberikan subsidi sebesar 250 miliar US Dollar. Atau, tujuh kali lipat bantuannya lewat kepada negara berkembang.

Berkaitan dengan kesenjangan kekuasaan (*power disparity*) dalam politik global, menurut laporan PBB tentang Human Development (2003), terdapat kecenderungan meningkatnya frustrasi masyarakat dan mereka yang mewakili negara-negara berkembang. Dan, ini, mempunyai dampak psikologis yang lebih buruk dibandingkan ketimpangan dalam perdagangan.

Tak bisa dipungkiri, globalisasi adalah sebuah perubahan berdimensi historis yang membawa permasalahan baru yang besar, seperti polarisasi dan marginalisasi sosial, perusakan lingkungan yang semakin tajam, serta erosi demokrasi. Di tengah mitos globalisasi neoliberal dengan janji mengangkat dunia dari keterpurukan, jumlah orang miskin justru meningkat dari 800 juta orang pada tahun 1995 (ketika WTO didirikan), menjadi sekitar 850 juta pada 2005. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi per kapita baik di negara maju maupun di negara berkembang pun melambat. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara-negara termiskin di dunia (dengan PDB per kapita antara US\$ 375 - US\$ 1.121 per tahun), sejak periode 1980-2000 terus melambat 0,5 persen tiap tahun (Chang 2005: 18).

Globalisasi neoliberal telah membawa dunia pada jurang kemiskinan

yang semakin dalam, sehingga 20 persen penduduk terkaya di dunia menguasai 86 persen total konsumsi dunia. Kelestarian lingkungan hidup pun memburuk dengan deforestasi mencapai 940.000 kilometer persegi di wilayah-wilayah termiskin dunia sejak 1990.

Inilah kenyataan globalisasi di mana Indonesia pun turut 'bermain' dengan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal dengan pencabutan jaminan sosial melalui subsidi dan menjual semakin banyak sektor-sektor hajat hidup orang banyak kepada para pemodal dengan jargon 'pasar bebas'.

Joseph E. Stiglitz, mantan penasihat ekonomi-politik Bill Clinton, ketua tim ekonomi Bank Dunia dan pemenang Hadiah Nobel 2001, dalam bukunya *"Globalization and Its Discontent"* (2002), ikut dan berhasil menggulirkan diskusi panas terkait globalisasi neoliberal lewat Washington Consensus yang secara sadar dipromosikan Kementerian Perekonomian AS dan IMF sejak 1980.

Stiglitz menuduh implementasi asumsi-asumsi *"Washington Consensus"* (liberalisasi pasar tanpa batas, anggaran berimbang yang ketat serta privatisasi) bertanggung jawab atas meningkatnya kemiskinan global. Dalam buku terbarunya, *"Making Globalization Work"*, Stiglitz memperjelas posisinya terhadap globalisasi dan mengambil risiko mengecewakan para pendukungnya dalam gerakan anti-globalisasi.

Menurutnya, agar globalisasi yang saat ini telah bergulir jauh bisa benar-benar membawa kemajuan bagi manusia, diperlukan „sebuah arah dan organisasi baru“ dengan tujuan dan kerangka yang secara politis benar-benar bisa membawa manfaat bagi umat manusia.

Konsep dasar yang diajukan Stiglitz, bertumpu pada model sukses pembangunan Asia di mana negara

memiliki peran sentral. Stiglitz merehabilitasi kebijakan ekonomi-politik negara untuk perdagangan serta menggarisbawahi sikapnya pada lemahnya negara di Amerika Selatan sebagai penyebab utama kegagalan globalisasi ekonomi di kawasan tersebut. Contoh yang lebih menyedihkan terjadi di Afrika.

Stiglitz menuntut kondisi perdagangan khusus bagi negara-negara miskin sebagai bagian dari perdagangan internasional yang "adil". Lebih jauh, ia juga menyuarakan pemberlakuan hak-hak internasional yang efektif baik dalam persaingan internasional maupun dalam keadilan kontrak. Baginya, harus ada kredit khusus bagi negara berkembang yang ditawarkan dengan persyaratan ringan. Lebih dari itu, perlu perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara pandang para ekonom pengambil keputusan. Seharusnya, mereka tidak hanya bertanya apa saja kontrak yang membawa manfaat bagi negaranya. Dalam dunia yang menglobal saat ini, seharusnya mereka berpikir lebih jauh apa yang "lebih adil" dan memberikan kontribusi agar sumberdaya negara-negara terbelakang bisa dikembangkan secara menyeluruh.

Menurutnya, yang harus dikembangkan sebuah "Identitas-Dunia", yang mampu menyadarkan para ekonom bahwa keputusan penting yang diambil bakal berdampak "bagi semua", termasuk diri dan negara mereka. Tindakan "pihak luar" yang bisa merusak pihak lain, harus dihentikan, lembaga swadaya masyarakat harus lebih banyak diajak konsultasi dibandingkan sebelumnya, begitu pula transparansi dalam berbagai proses pengambilan keputusan internasional perlu diperbaiki. Globalisasi hanya akan berkeadilan dan diterima secara luas, bila reformasi dilakukan dengan tujuan terakomodasinya kepentingan kaum miskin dan terpinggirkan secara ekonomi-politik.

Bagi kita di Indonesia, mencermati sektor pertambangan, misalnya, di mana biasanya terjadi kolaborasi korporasi besar dan pemerintah, bisa menjadi contoh perekonomian neoliberal. Empat dekade lebih industri pertambangan mineral, misalnya, telah gagal membuktikan "mitosnya" sebagai penopang perekonomian, apalagi berperan mensejahterakan penduduk lokal. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi sektor ini hanya 1,3 - 2,3 trilyun terhadap APBN, lebih kecil dari sektor kehutanan. Nilai tambahnya juga rendah karena bahan tambang diekspor dalam bentuk bahan mentah, ditambah rendahnya penyerapan tenaga kerja masal di tingkat lokal. Sektor ini pun, gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan penyelesaian konflik dengan penduduk lokal di lokasi-lokasi pertambangan (Siaran Pers Jaringan Advokasi Tambang/JA-TAM (13.1.2006).

Contoh paling kasat mata adalah PT Freeport, korporasi tambang skala besar pertama di Indonesia yang telah beroperasi selama 33 tahun di Papua. Hingga kini, setidaknya 1.448 ton emas, belum lagi tembaga dan perak telah dikeruk. Namun, kondisi Papua jauh dari "kemilau emas" nya. Ironisnya, meskipun *Product Domestic Bruto* (PDB) Papua menduduki peringkat 3, tetapi nilai Index Pembangunan Manusia (IPM), yang mengekspresikan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita, menempati urutan 29 dari 30 propinsi Indonesia. Papua juga memiliki persentase penduduk miskin terbesar dengan akumulasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di atas 35% berada di kawasan konsesi PT Freeport. Yang meningkat, seiring kenaikan produksi PT Freeport adalah bisnis prostitusi. Tak heran, Timika menjelma menjadi kota dengan angka penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia (Database

JATAM 2005).

Selain itu, korporasi tambang skala besar juga telah gagal menangani daya rusak ekstraksi tambang. PT Freeport telah gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan dan resolusi konflik dengan penduduk lokal. Sekitar 1,3 milyar ton limbah tailing dan 3,6 milyar ton limbah batuan dibuang begitu saja ke lingkungan. Limbah tersebut telah mencemari Sungai Ajkwa dan menjadi penyebab jebolnya Danau Wanagon hingga terkontaminasinya ratusan ribu hektar daratan dan lautan Arafura. PT Freeport juga terbukti tidak memiliki akuntabilitas, karena melanggar berbagai aturan hukum lingkungan. Belum lagi catatan terjadinya pelanggaran HAM di sekitar kawasan pertambangan yang didokumentasikan Komnas HAM dan kelompok gereja di Papua pada tahun 1995, yang juga belum tuntas hingga saat ini.

Menurut JATAM, potret-potret yang tak jauh berbeda, dengan mudah bisa ditemukan di lokasi-lokasi pertambangan skala besar lainnya. Mulai dari tambang emas PT Barisan Tropikal Mining di Sumatera; PT Indo Muro Kencana, PT Kelian Equatorial Mining, PT Indominco Mandiri, PT Adaro, PT Arutmin, PT Bahari Cakrawala Sebuku di Kalimantan; PT Inco, PT Newmont, PT Antam di Sulawesi; PT Newmont, PT Arumbai di Nusa Tenggara; PT Nusa Halmahera Mineral dan Pulau Wetar di kepulauan Maluku, hingga PT Freeport di Papua.

Yang lebih parah adalah lokasi-lokasi tambang yang telah selesai dan ditinggalkan begitu saja, diantaranya PT Barisan Tropikal Mining di Kabupaten Muara Tiku, Sumatera Selatan dan tambang PT Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah. Penduduk lokal tak hanya menderita saat pertambangan beroperasi, tetapi juga mendapat warisan kerusakan lingkungan permanen pasca penam-

banan.

Ironisnya dengan “prestasi” di atas, pelaku pertambangan melalui IMA (*Indonesian Mining Association*) terus menuntut bahkan mengintimidasi agar mendapat perlakuan istimewa dari negara. Mulai menuntut pemangkasan pajak, menurunkan standar-standar peraturan lingkungan hidup hingga menuntut pembukaan 11,4 juta ha kawasan lindung menjadi pertambangan terbuka. Jika tidak mereka mengancam akan memindahkan atau membatalkan investasinya. Anehnya, pemerintah (biasanya) setuju, dengan berbagai alasan: menarik investasi, bersaing dalam era globalisasi, aturan main WTO. Atau, tak berdaya karena ditekan MNC dan perusahaan raksasa berikut lembaga pendukungnya seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan lainnya. Tentu saja, ada aroma KKN yang menyengat di balik semua itu. Banyak yang melansir bahwa kebijakan pembangunan pemerintah saat ini adalah “penopang” perekonomian neoliberal.

Jalan ketiga, bukan sekedar jalan tengah

Dalam diskusi kebijakan pembangunan, perlu dibedakan dua level diskusi, yaitu level teori dan level politik praktis. Dalam level teori, ditandai oleh hilangnya dogmatisme yang tadinya mewarnai perdebatan di tahun 70an hingga 90an. Saat ini, selain para ekonom neo-klasik dengan kepercayaan “buta”nya kepada “pasar bebas” yang diyakini mampu mengatur segala-galanya, tiada seorang pun, mengaku memegang kebenaran mutlak.

Kalau dulu, semuanya terpaku pada dikotomi metropol-periferi, atau masyarakat modern – tradisional, saat ini, dimungkinkan analisis yang lebih beragam. Kompleksitas (*under*)development hanya bisa digambarkan secara utuh setelah

menelusuri sejarah kolonial sebuah negara, menganalisis dampak pasar global dan pengaruh berbagai faktor lokal. Studi dengan pendekatan pluralisme teori yang kini mulai banyak dipraktekkan, menghasilkan asumsi yang lebih mendekati kenyataan riil tentang sebuah situasi atau tentang sebuah kelompok masyarakat. Meski, bisa menjadi masalah ketika muncul kesimpulan bahwa dimana-mana segala sesuatu itu berbeda, karena dari setiap kasus tidak mungkin dan tidak ingin ditarik kesimpulan yang berlaku umum.

Yang relatif baru, setelah cukup lama terjebak dalam pemikiran pur-ekonomi, maupun dalam ‘antagonisme’ utama: modal – pekerjaan, atau metropol – periferi, adalah debat tentang ekologi dalam teori pembangunan. Elmar Altavater misalnya, melakukan upaya besar, ketika menunjukkan keterkaitan antara krisis ekonomi dan ekologi dengan beragam bentuk penindasan (1996:49). Bagi Altvater, selama ini, kapitalisme dan model (masyarakat) industrial tidaklah kompatibel dengan tuntutan ‘pembangunan berkelanjutan’. Karena itu, ia mengusulkan “revolusi solar” dengan sebanyak mungkin memanfaatkan panas matahari. Setelah KTT Lingkungan di Rio de Janeiro, tuntutan yang mengemuka adalah restrukturisasi radikal masyarakat industrial. Tuntutan yang kini, semakin melunak dengan lebih banyak berupa pertanyaan tentang cara menjinakkan kapitalisme agar “berkelanjutan”.

Satu lagi yang mewarnai perdebatan teori pembangunan adalah diskusi tentang gender. Pengertian tentang “gender” yang sulit diterjemahkan ini, bukanlah dalam artian biologis (jenis kelamin) tetapi lebih mengacu pada peran sosiologis. Perempuan, dalam perspektif gender tidak terisolasi, tetapi dilihat dari sudut pandang hubungan sos-

ial. Lalu, ada pula akses baru dalam perdebatan tentang kebudayaan. Dalam varian “pesimistik-pemicu perang” (*Stock*), ada kecemasan tentang *clash of civilisations* (Huntington) dan penggusuran hegemoni budaya Barat, terutama oleh budaya (masyarakat) Islam. Sementara varian optimistik-liberal, lebih melihat “pembangunan sebagai perlombaan antar budaya” (Dieter Weiss) yang percaya bahwa sistem nilai non-Barat pun bisa menghasilkan pembangunan kapitalistik. Bahwa dalam varian ini, klaim tidak terdapat bias tentang keunggulan budaya Eropa seperti dalam pemikiran Max Weber, masih perlu dipertanyakan. Terakhir, yang juga marak adalah perdebatan tentang globalisasi, yang membahas tentang perkembangan “perekonomian dunia tanpa batas”.

Emoh teori dan pluralisme teori saat ini, mengandung bahaya berikut. Semua yang berbau ideologi ditinggalkan, sehingga dengan tanpa sadar, kita tidak mempunyai pegangan. Yang dilakukan sekedar mengibarkan bendera kecil dalam pusaran *wind of change* usai Perang Dingin. Padahal, angin yang berhembus, berasal dari arah neo-liberal. Dengan begitu, meski harus diakui bahwa terdapat banyak elemen yang mubazir dan salah dalam berbagai teori tersebut, banyak pula hal-hal yang berguna dari teori selain teori neo-liberal itu, menjadi terlupakan.

Ambil contoh konsep heterogenitas struktural. Hal ini, dalam era globalisasi, sebenarnya masih tetap penting dan diperlukan untuk memahami fenomena keterbelakangan. Konsep ini misalnya bisa menerangkan, mengapa Bangkok atau Jakarta, sebagai Metropol-Dunia-Ketiga lebih terkait dengan pasar dunia ketimbang dengan *hinterland*-nya sendiri. Begitu pula dengan konsep modernisasi yang mendiskusikan Landreform sebagai persyaratan pembangunan,

mempunyai nilai pencerahan yang tinggi. Yang diperlukan adalah upaya untuk mencocokkan berbagai teori dan strategi dengan realitas lapangan, dan tidak sekedar menjadi penganut buta pencetus teori.

Dalam kevakuman teori, implementasi kebijakan pembangunan dipenuhi oleh sejumlah jargon dan wacana yang kedengarannya progresif, meski bila ditilik lebih dalam bisa diinterpretasikan secara fleksibel. Partisipasi, ketahanan sosial, *good governance* dan *sustainability*, untuk menyebut beberapa yang terpenting, kedengaran sangat inovatif untuk membenarkan kegiatan ‘bantuan pembangunan’ atau ‘kerjasama pembangunan’ yang banyak dikritik dalam dekade 80-an.

Dengan mengambil contoh ‘partisipasi’, menjadi jelas betapa jargon sejenis masih perlu dipertanyakan. Dulu, ada tuntutan agar pembangunan harus dari bawah. Kini, formel ajaib ‘partisipasi’ akan menjamin pelibatan kelompok sasaran dalam berbagai proyek pembangunan. Penggunaan jargon ini menutupi perbedaan antara keterlibatan sukarela dan spontan dengan bentuk-bentuk partisipasi manipulatif dan diarahkan dari atas atau dari luar. Sebenarnya, yang penting, bukan kegiatan partisipatif itu sendiri, tetapi pertanyaan dalam hal apa dan untuk tujuan apa harus ada partisipasi.

Juga diskusi tentang orientasi pembangunan di kalangan kiri, misalnya di seputar teoretisi Immanuel Wallerstein, yang meski dalam berbagai pertemuannya masih mengklaim diri sebagai *one of the last leftist gangs* melawan kapitalisme, tetapi dari segi argumentasi bersifat defensif dengan sekedar mengemukakan berbagai fenomena krisis ekonomi global. Sementara ‘mantan’ teoretisi dependensia, seperti F.H. Cardoso yang – kemudian – pernah menjadi presiden Brasilia, menapaki jalan

neo-liberal dengan sedikit nuansa sosial-demokrasi.

Pertanyaan tentang penyebab vakumnya teori dan utopi berbarengan dengan ambruknya model sosialisme negara sebagai “alternatif”, juga di kalangan kiri non-ortodoks, belum memberikan jawaban memuaskan. Padahal, sosialisme demokrasi, anarkhisme utopis dan renungan Gandhi tentang ekonomi autarki, belum tercerminkan. Bahwa semua itu adalah alternatif terhadap logika kapitalistik, mestinya menjadi alasan optimistik, bukannya alasan berkecil hati (*resignation*). Sama halnya dengan, konsep “disosiasi”, yang pernah dengan agak mirip diajukan Soekarno berupa proteksi terhadap ekonomi global, tidak hanya berdampak negatif, tetapi pada sisi lain, paling tidak, hal tersebut membuka kesempatan bagi pembangunan yang mandiri, yang terbebas dari “pemaksaan persyaratan perekonomian (neoliberal) global”.

Bagi Indonesia, kita berharap Negara selayaknya berperan sebagai “penjaga” konstitusi mengacu pada Pasal 33 UUD 45 yang dengan sangat jelas menyebut pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kasus eksploitasi pertambangan seperti diuraikan di atas, sosial demokrasi yang dikenal menawarkan Jalan Ketiga, menurut pemahaman saya, seharusnya mendorong Negara untuk berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat ketimbang condong kepada segelintir perusahaan yang memakmurkan segelintir penikmat di atas penderitaan mayoritas rakyat. Dalam hal ini, Jalan Ketiga bukanlah sekedar Jalan Tengah.

PERBEDAAN KOMUNIS DENGAN SOSDEM

Oleh Soekarno

Sebagaimana sudah kita tulis di Fikiran Ra'jat nomor percontohan tentang sebab-sebabnya kemelaratan yang diderita oleh kaum Buruh ialah *stelsel* kapitalisme itu, maka di nomor ini kita akan terangkan bahwa di antara beberapa cara untuk menenyapkan *stelsel* kapitalisme atau kapital itu terutama dua cara yang perlu kita ketahui. Kedua faham dan cara yang mempunyai pengikut berjuta-juta kaum buruh ialah faham kaum sosial-demokrat dan fahamnya kaum komunis.

Banyak aliran-aliran lain yang juga berdasarkan ilmu sosialisme, aliran-aliran yang menentang kapitalisme dan imperialisme. Tetapi oleh karena lain-lain aliran sosialis itu tidak be-

gitu besar artinya di dalam perjuangan kaum buruh untuk menuntut perbaikan nasibnya, maka kita hanya mengupas sosial-demokrat dan komunis saja, kedua faham yang di dunia politik Indonesia umumnya tidak asing lagi.

Kedua faham atau isme ini di dalam hakikatnya tidak mengandung perbedaan satu sama lain, oleh karena kedua isme ini berdiri di atas faham sosialisme atau lebih tegas lagi: berdiri di atas faham Marxisme. Kedua faham adalah mengaku menjadi pengikut Marx.

Sebagaimana kapitalisme sendiri adalah sebuah faham yang mempunyai beberapa aliran, aliran-aliran mana mempunyai isme-isme sendiri

yang semuanya itu bersandar di atas faham kapitalisme, maka sosialisme sebagai hasilnya kapitalisme, juga mempunyai beberapa aliran.

Di dalam faham sosialisme itu termasuk juga syndikalisme dan anarkisme, kedua faham yang di halaman Fikiran Ra'jat No. 2 kita akan kupas.

Sesudah kapitalisme itu melahirkan faham-faham baru, yang bertentangan sekali dengan faham-faham yang hidup di zaman feodalisme, maka anggapan pemandangan dan pikiran rakyat di dalam sesuatu masyarakat itu dapat maju, jika tiap-tiap orang di dalam masyarakat itu hanya mempunyai kemerdekaan untuk berusaha dan berdagang,

mempunyai kemerdekaan dalam pemilikan dan kemerdekaan mengadakan perjanjian-perjanjian, di dalam praktiknya ternyata tidak betul. Justru oleh karena kemerdekaan itulah maka kapitalisme makin deras, sehingga kemelaratan lebih hebat, kesengsaraan masuk di desa-desa di rumahnya bapak tani, menghinggapi rumah tangganya kaum pedagang dan pertukangan kecil-kecil. Oleh karena kemerdekaan itu maka nasib Rakyat menjadi nasib proletar: oleh karena kemerdekaan itu maka di satu pihak timbul kelas kapitalisme dan di lain pihak timbul kelas proletar. Kelak kaum proletar ini tidak mempunyai kekuasaan sama sekali atas alat-alat pembuatan barang-barang di pabrik-pabrik dan di *onderneming-onderneming*.

Sesudah kapitalisme tua disokong oleh tenaga mesin-mesin menjadi kapitalisme modern, maka nasibnya kaum proletar itu makin jelek.

Kesengsaraan dan kesedihan yang diderita sehari-hari oleh kaum buruh tentulah melahirkan cita-cita dan harapan untuk menyelamatkan pergaulan hidup manusia yang bobrok. Cita-cita dan harapan melenyapkan kemiskinan dan kebobrokan di dalam masyarakat itu melahirkan faham sosialisme yang mengajarkan kepada pengukut-pengikutnya bahwa agar supaya pergaulan hidup bisa selamat susunannya harus bersendikan di atas aturan-aturan sosialistis. Mereka yang memiliki faham itu dinamakan kaum Sosialis.

Mula-mula mereka ini belum terang betul bagaimanakah caranya *stelsel* kapitalisme ini harus dilenyapkan. Mereka masih membayangkan saja. Penganjur-penganjurnya belum mendapat jalan yang terang untuk menyelamatkan pergaulan hidup. Mereka masih menghayal tentang pergaulan hidup yang selamat ialah pergaulan hidup yang tidak mengenal kesengsaraan. Kaum sosialis

yang mendasarkan "teorinya" ini atas khayalan belaka itu dinamakan kaum "*sosialis-utopis*" (Robert Owen, Saint Simon dll).

Tetapi lambat laun mereka itu makin sadar bahwa teori yang bersandar kepada utopi itu adalah teori yang tidak dapat memberi senjata untuk membasmi kapitalisme itu dengan akar-akarnya.

Teori yang dapat menyadarkan kaum proletar tentang kedudukannya di dalam masyarakat itu ialah hanya teori yang berdasar wetenschap, ialah teori yang hasilnya jadi ilmu, penyelidikan dan pengupasan yang dalam dan luas. Teori yang berdasarkan *wetenschap* itu dinamakan *wetenschappelijk—schappelijk-sosialisme*, lawannya utopistis-sosialisme. *Wetenschappelijk-Sosialisme* bukan sosialisme khayalan, tetapi sosialisme perhitungan.

Wetenschappelijk-sosialisme itu lahir di dunia sesudah pendekar kaum proletar yang terbesar, Karl Marx mempropagandakan teorinya, bagaimanakah harusnya perjuangan kaum buruh itu untuk menuju ke dunia sosialisme.

Setelah Karl Marx mengadakan penyelidikan sedalam-dalamnya tentang akar-akarnya kapitalisme yang kebutuhannya selalu bertentangan dengan kebutuhannya kaum buruh, maka Marx mengajarkan bahwa yang dapat menjungjung derajat kaum buruh itu ialah kaum buruh sendiri. Maka dari itu kaum proletar ini harus disusun di dalam satu organisasi yang menyadarkan mereka tentang nasibnya dan oleh karena itu keharusan mereka berjuang melenyapkan segala rintangan yang menentang usaha mereka menuju ke jaman sosialisme itu. Karl Marx adalah "bapaknya" dari kaum proletar.

Sebagaimana Marxisme itu adalah teorinya pergerakan kaum buruh di Eropa, Marhaenisme itu adalah teorinya kaum Marhaen di

Indonesia. Teori Marhaenisme yang terkenal adalah *meerwaarde*-teori, ialah mengajarkan bahwa sesuatu barang itu karena tenaga kaum buruh menjadi tambah harganya. Misalnya besi yang berharga f 500—, oleh tenaga kaum buruh dibuat menjadi mesin yang berharga f 2500—. Pertambahan harga adalah f 2000—. Tetapi f 2000— ini tidak jatuh ke tangan kaum buruh (mereka menerima sedikit sekali) tetapi di tangan kaum pemodal sendiri, dan dipakainya untuk menambah besarnya modal, karena itu maka modal itu mempunyai watak melembungkan badannya, artinya kaum pemodal itu senantiasa mempunyai watak membesarkan modalnya. Teorinya yang lain, yang juga termasyur ialah "Fase Teori", atau "Evolusi-Teori", ialah teori yang mengajarkan arahnya perubahan dari tiap-tiap pergaulan hidup manusia yang juga menjadi sebab perubahan fahamnya, anggapan dan pikiran rakyat.

Fase-teori mengajarkan bahwa masyarakat itu di jaman purbakala adalah *Ur-komunistis*, artinya pergaulan hidup manusia di jaman purbakala itu diatur menurut cara tidak ada ningrat-ningratan atau kelas-kelasan. Sesudah jaman ur-komunisme ini lalu, lantas lahirlah jaman feodal. Sendi dasarnya pergaulan hidup jadi feodalistis, yakni masyarakat terbagi dalam kelas raja, ningrat dan "hamba". Habis fase feodal ini tumbul fase kapitalisme. Mula-mula jaman *voor-kapitalisme* dan kemudian jadi modern kapitalisme. Jaman kapitalisme ini menuju ke fase-sosialisme. Fase-teori ini dianut oleh kaum sosial-demokrat dan juga oleh kaum komunis. Kedua aliran yang besar ini mula-mula berjuang bersama-sama di bawah "pimpinannya" Karl Marx.

Sekarang orang tanya mengapa kaum sosialis yang bersendi atas Marxisme itu terpecah menjadi dua aliran atau sayap yang menimbulkan

faham sendiri-sendiri?

Pada tahun 1889 sampai tahun 1914 kedua sayap ini diikat oleh satu badan yang bernama *Tweede-Internationale* atau di dalam bahasa Indonesia: Internasional-Kedua. Tetapi dalam tahun 1914 persatuan partai kaum buruh ini terpecah menjadi dua aliran: sayap yang satu memisahkan diri menjadi sosial-demokrat dan sayap yang lain menamakan dirinya kaum komunis. Perpecahan itu terjadi oleh karena kedua sayap ini tidak bisa akur pendiriannya satu sama lain tentang mufakat atau tidaknya kaum proletar terutama di negeri-negeri kapitalis turut menyokong peperangan dunia di tahun 1914. Kaum sosial-demokrat suka menyokong peperangan dunia itu, tetapi kaum komunis sama sekali anti peperangan. Kaum sosial-demokrat berpendapat bahwa kaum proletar harus turut menyokong pemerintahan dalam negeri "*verdedigings-oorlog* jika ada musuh menyerang negerinya.

Kaum komunis mendirikan *Internationale* sendiri ialah: "*Derde-Internationale*" ialah Internasional-Ketiga di Moskow di bulan Maret 1919. Pemimpin-pemimpin terbesar dari kaum komunis ialah Lenin, Trotsky dan Zinoviev mengajarkan bahwa pergaulan hidup manusia tidak harus tumbuh sebagaimana sudah digambarkan di dalam teori-teorinya Karl-Marx, tetapi pergaulan hidup dapat mengadakan *fase-sprong*, artinya bahwa masyarakat yang masih berada di dalam fase feodal itu tidak harus melalui zaman kapitalisme lebih dulu untuk menuju ke jaman sosialisme.

Dus pergaulan hidup Rusia yang masih feodal itu bisa terus masuk jaman sosialisme, *zonder* menginjak fase jaman kapitalisme dulu, asal saja cukup alat-alatnya. Teori yang demikian ini dinamakan teori *fase-sprong*.

Kaum sosial-demokrat membantah teori *fase-sprong* ini. Oleh sosial-

demokrat *fase-sprong* ini disebutkan anti-Marxisme. Mereka mengajarkan bahwa tiap-tiap pergaulan hidup itu harus tumbuh menurut wet-wet-nya alam. Karl Kautsky, pemimpinnya sosial-demokrat berkata bahwa wet-evolusi—fase teori—yang digambarkan oleh Marx itu harus tunduk. Sosial-demokrat berkata: "Marx bilang, bahwa masyarakat bergerak melalui beberapa fase, yakni melalui beberapa tingkat. Dulu fase ur-komunisme, kemudian fase feodal (ningrat-ningratan), kemudian fase modern-kapitalisme, kemudian fase sosialisme. Tiap-tiap fase harus dilalui. Sesudah fase ur-komunis tidak boleh tidak tentu fase feodal. Sesudah fase feodal tidak boleh tidak tentu fase *voor-kapitalisme*; dan begitu seterusnya. Dus masyarakat tidak bisa melompati sesuatu fase. Misalnya naik kereta api dari Bandung ke Jakarta harus melalui Cimahi, kemudian Padalarang, kemudian Purwakarta, kemudian Cikampek, kemudian Kerawang, kemudian Jakarta. Mau-tidak-mau semua tempat itu harus dilalui oleh kereta api itu. Tidak bisa dari Cimahi sekonyong-konyong Purwakarta, dengan melompati Purwakarta, dengan melampau Padalarang itu dengan secepat-cepatnya, melompati Padalarang kita tidak bisa. "Begitu pula dalam kita masuk ke fase sosialisme. Kapitalisme tidak boleh tidak harus dilewati. Bagian kita ialah melewati fase kapitalisme itu dengan secepat-cepatnya, supaya bisa selekas-lekasnya diganti fase sosialisme!"—begitulah kaum sosial-demokrat berkata sebagai bantahan atas sikap kaum komunis yang dari feodalisme (masyarakat Rusia masih 60% feodalisme) ujung-ujung masuk ke fase sosialisme.

Perbedaan yang kedua ialah bahwa tiap-tiap orang—menurut kaum sosial-demokrat—yang hidup di dalam suatu masyarakat itu adalah jadi anggota masyarakat itu dan oleh

karena itu ia berhak mengeluarkan pikirannya, kemauannya dan cita-citanya tentang cara-cara masyarakat itu diatur. Dus dengan lain perkataan pergaulan hidup itu harus diatur secara demokratis. Tetapi kaum komunis mengajarkan bahwa demokrasi itu di dalam hakikatnya tidak memberi kemerdekaan kepada Rakyat. Di dalam praktiknya, kata mereka, demokrasi itu tidak ada. Dan jika demokrasi ini ada, kerakyatan itu tidaklah dapat memberi hak-hak kepada Rakyat untuk mengatur pergaulan hidup. Dus demokrasi itu adalah perkataan kosong belaka. Kaum komunis oleh karena itu tidak mufakat dengan demokrasi itu tetapi mengajarkan bahwa hanyalah "diktator-proletariat" saja (artinya bahwa hanya kaum proletar saja yang mempunyai suara) yang dapat memberi kekuasaan hidup manusia itu bagi keselamatan masyarakat. *Diktator-proletariat* itu adalah suatu alat untuk mendatangkan pergaulan hidup sosialis—begitulah kaum komunis berkata. Di dalam diktator-proletariat ini, maka orang-orang yang bukan proletar tidak boleh ikut bersuara. Orang-orang yang bukan proletar tidak diberi stem di dalam pemerintahan negeri.

Inilah perbedaan antara sosial-demokrasi dan komunis tentang asas, yakni dua berpedaan yang fundamental. Untuk kali ini cukuplah sekian saja. Masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Tetapi untuk sekarang sekian saja.

Eropa Barat memiliki Sosial-Demokrasi; Rusia memiliki Komunisme; Tiongkok San Min Cu I; India mempunyai Gandhisme; marilah kita di Indonesia mempropagandakan kita punya Marhaenisme!

(Fikiran Ra'jat No. 2 memuat penguapan tentang faham syndikalisme dan anarkisme).

Fikiran Ra'jat, 1 Juli 1932 Nomor 1, hal. 9—12.



Potret Buram Perdagangan Manusia di Indonesia



BUKU berjudul “Ketika Mereka Dijual” ini adalah kajian yang melengkapi dokumentasi berbagai kasus trafiking di Indonesia antara kurun waktu 2004-2006. Kajian ini memfokuskan telaaahnya pada modus, pola, bentuk, dan peta jaringan perdagangan perempuan dan anak yang berlangsung di 15 provinsi di Indonesia yang dijadikan sampel penelitian (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua/Irian Jaya Barat). Buku hasil penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan oleh *International Catholic Migration Commission* (ICMC) bekerjasama dengan *Solidarity Center* (ACILS) ini penyusunannya dikoordinir langsung oleh Abhijit Dasgupta (seorang ahli perdagangan perempuan dan anak).

Ditinjau dari aspek tujuan, penelitian ini berupaya menggali beberapa informasi penting yang berlangsung dalam konteks trafiking di Indonesia, seperti: (1) bagaimana jeratan utang digunakan sebagai cara untuk memperdagangkan orang; (2) bagaimana

pola, bentuk serta jaringan migrasi dan trafiking buruh migran Indonesia ke Malaysia terus berlangsung hingga saat ini; (3) apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah di Indonesia dalam memberantas perdagangan orang; dan (4) pembahasan tentang peraturan-peraturan yang terkait dalam memerangi perdagangan orang (halaman 13).

Proses pencarian data guna menganalisis dan mendokumentasi modus, pola, bentuk, dan jaringan trafiking dilakukan secara cukup intens di 17 propinsi yang menjadi sampel penelitian, antara 5-10 hari per wilayah sampel, melibatkan diskusi dan wawancara mendalam dengan para informan kunci (tokoh agama dan masyarakat, aktivis masyarakat, warga komunitas daerah pengiriman dari para eks buruh migran, PJTKI, calo, perempuan dewasa dan anak-anak perempuan di lokasi-lokasi pelacuran, dan responden lain yang bekerja di industri hiburan), melakukan pengamatan langsung di daerah perbatasan, melakukan *assessment* atas sejumlah situasi sosial, pemberitaan media lokal, dan klipings surat kabar lokal dan nasional serta pengumpulan berbagai dokumen yang diperoleh dari instansi pemerintah terkait (Disnaker, kepolisian, panti sosial, dan beberapa lembaga resmi lainnya) baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi (halaman 13-14).

Terkait dengan situasi sosial di Indonesia, isu trafiking setidaknya mulai menguat sejak awal tahun 2000 lalu. Ini dipicu oleh kian maraknya kasus-kasus penyiksaan buruh migran Indonesia yang bekerja di luar

negeri, baik sebagai pekerja rumah tangga (PRT) maupun yang akhirnya terjerumus menjadi pelacur (PSK). Ditinjau dari aspek historis, sejak era kolonialisme Belanda hingga ke masa pendudukan Jepang, perempuan Indonesia telah mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan fisik dan seksual. Pasca penjajahan, beberapa hasil penelitian menunjukkan cukup banyak perempuan-perempuan Indonesia yang mencari pekerjaan luar negeri, dimana kekerasan-kekerasan yang mereka alami di tempat kerja sering dianggap wajar oleh masyarakat kita yang mayoritas berkultur patriarki.

Dari segi kajian, sejak awal tahun 2000 berbagai laporan mengenai tindak kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak mulai bermunculan ke permukaan, antara lain tentang pelecehan seksual terhadap penari Bali yang juga dikenal sebagai “duta budaya”, tumbuhnya industri seks di Bata, dan hebohnya kasus-kasus paedophilia di Bali dan Lombok., bisa dikatakan menjadi pelopor penelitian tentang eksploitasi seksual komersial anak yang berhasil menarik perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Namun demikian, berita yang sungguh-sungguh menyita perhatian masyarakat adalah kasus penyiksaan fisik majikan terhadap buruh migran perempuan seperti dalam kasus Nirmala Bonet yang bekerja di Malaysia, serta kasus bunuh diri yang dilakukan seorang perempuan Indonesia korban perdagangan orang di sebuah hotel di Tawau, Malaysia, tempat ia disekap dan dilacurkan. Peristiwa tersebut memaksa Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan *assessment* di negara bagian Sabah, Malaysia. Pada tahun 2003, *assessment* tersebut menghasilkan temuan mengejutkan, dimana di Sabah terdapat 5.000 perempuan Indonesia dipaksa memasuki dunia pelacuran.

Resensi Buku

J u d u l : Ketika Mereka Dijual:
Perdagangan Perempuan
dan Anak di 15 Provinsi di
Indonesia

Penulis : Abhijit Dasgupta, dkk.

Penerbit : International Catholic
Migration Commission
(ICMC) dan Solidarity Center
(ACILS)

Cetakan : November, 2006

Tebal : viii + 468

Guna memudahkan pembaca dalam memahami seluk-beluk trafiking di Indonesia, sistematika buku ini dibagi dalam empat pokok bahasan utama. Bab I adalah latar belakang masalah (*background*) yang berisi tujuan penelitian, metodologi, kajian definisi trafiking, dan definisi perdagangan orang saat ini di Indonesia. Bab II berisi elaborasi tentang masalah perdagangan orang, tujuan utama trafiking di dan dari Indonesia, rute trafiking di Indonesia, dan Indonesia sebagai negara tujuan trafiking. Bab III berisi elaborasi deskriptif tentang modus, pola, bentuk, dan peta jaringan trafiking di 17 provinsi yang menjadi sampel penelitian. Bab IV berisi kajian tentang isu-isu penting trafiking yang ditulis khusus untuk melengkapi perspektif trafiking di Indonesia. Bahasan tersebut meliputi Jeratan Hutang (ditulis oleh Jamie Davis), Migrasi dan Trafiking: Penempatan Buruh Migran Indonesia ke Malaysia (ditulis oleh Keri Lasmi S.), Usaha Penegakan Hukum dalam Memberantas Perdagangan Orang (ditulis oleh Anis Hamim), dan Upaya-upaya Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam Memberantas Perdagangan Orang (ditulis oleh Fatima Agustinanto, Keri Lasmi S., dan Eka Rachmawati).

Sepintas tentang trafiking

Ketika sistem migrasi dunia memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara pengirim maupun penerima, tidak sedikit pula persoalan yang dihadapi dalam proses migrasi ini ditimbulkan. Salah satunya adalah persoalan perdagangan/penyeludupan/perbudakan manusia secara ilegal yang sering disebut *trafficking in humanity*. Trafiking merupakan migrasi internasional yang ilegal, tidak tercatat serta dilakukan secara tersembunyi dan sistematis sehingga ia dapat dikategorikan se-

bagai penyeludupan manusia dengan cara penipuan, pemaksaan, dan kekerasan. Para pengamat sosial memaknai trafiking sebagai keseluruhan tindakan yang terlibat dalam proses rekrutmen dan/atau berpergiannya seseorang perempuan (dan anak-anak) dalam suatu negara atau lintas negara untuk mencari pekerjaan atau melayani kaum pria.

Perbudakan sesungguhnya fenomena yang telah berlangsung lama di muka bumi. Praktik ini merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan direkam dalam kisah perjuangan para nabi dalam kitab-kitab suci. Bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai "negara modern", meminjam istilah Peter L. Berger dalam karyanya *Piramida Kurban Manusia* (1992) dibangun dengan keringat warga miskin yang dipekerjakan secara paksa di sektor perkebunan dan infrastruktur. Sejarah juga mencatat berbagai konflik dan perang yang disebabkan isu perbudakan, seperti perang saudara (*civil war*) di Amerika. Di Indonesia, praktik trafiking dengan kedok pengiriman TKI/TKW ke luar negeri telah berlangsung sejak jaman pendudukan Jepang, baik atas misi kesenian atau TKI yang ujungnya menjadi ternyata dipaksa menjadi PSK, dikenal sebagai Jugun Yanfu. Praktik trafiking untuk tujuan prostitusi faktual telah berlangsung lama di negeri ini (Harkrisnuti, 2003).

Indonesianist asal Australia, Anthony Reid (1992), bahkan menyebutkan, pulau Jawa sejal dulu telah dikenal sebagai pengeksport budak terbesar untuk Malaysia. Pada zaman kolonial Belanda, perkebunan-perkebunan besar milik pengusaha kolonial juga banyak mempekerjakan buruh kasar (*koeli*) dari Jawa, yang dipekerjakan di negeri-negeri jajahan Belanda lainnya, seperti Suriname dan Kaledonia Baru (Parsudi Suparlan, 1995). Antara tahun 1909-1929

sekitar 5.000 buruh kasar dari Jawa telah diangkut oleh agen pengerah tenaga kerja ke Vietnam yang saat itu sedang dijajah Perancis. Mereka umumnya dipekerjakan di daerah eksplorasi pertambangan (Adam dan Asmi, 1994).

Apakah kini perbudakan dalam konteks negara modern saat ini telah sungguh-sungguh terhapuskan? Secara yuridis formal mungkin ya, karena tak satupun negara di dunia ini yang mentolerir praktik perbudakan. Tapi bukan berarti bahwa perbudakan telah menghilang dari muka bumi. Perbudakan justru kini menemukan bentuk yang lebih "modern" yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*). Demikian seriusnya masalah ini, sehingga PBB melalui *Office of The High Commissioner of Human Rights* mengeluarkan *Fact Sheet No.14* dengan judul *Contemporary Forms of Slavery*. Perilaku yang termasuk dalam kategori ini adalah: trafiking anak, prostitusi anak, pornografi anak, eksploitasi pekerja anak, mutilasi seksual terhadap anak perempuan, pelibatan anak dalam konflik bersenjata, perhambaan, trafiking manusia, perdagangan organ tubuh manusia, eksploitasi untuk pelacuran, dan sejumlah eksploitasi perempuan dan anak di bawah rezim apartheid dan penjajahan (Valentina Sagala, 2003).

Dalam *Trafficking in Persons Report* (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan *Economy Social Commission on Asia Pacific*, Indonesia menempati *Tier 3* atau terendah atau terburuk, yaitu negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar, namun pemerintahnya tidak atau belum melakukan 'usaha-usaha yang berarti' dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Disampaikan dalam laporan lembaga tersebut antara lain bahwa

Indonesia merupakan “sumber penting” bagi manusia yang diperdagangkan, terutama perempuan dan anak. Korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja ke Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan, dan Jepang.

Penelitian Harkristuti (2003) menunjukkan, dari laporan yang disampaikan Kepolisian RI tahun 2000 tercatat tak kurang terjadi 1.683 kasus perdagangan perempuan dan anak melalui jalur gelap. Dari 8 kota besar di Indonesia, terdapat 1.094 kasus perdagangan manusia yang telah diajukan ke pengadilan. Sementara pada tahun 1999 kasus yang terungkap dan tertangani sebanyak 1.712 dan diajukan ke pengadilan sebanyak 1390 kasus. Data berdasarkan lokasi terungkapnya perdagangan perempuan adalah sebagai berikut:

KOTA	TAHUN 1999	TAHUN 2000
Surabaya	313	309
Medan	286	282
Manado	179	175
Bandung	161	157
Ujung Pandang	155	151
Padang	151	147
Bali	133	129
Jakarta	130	126

Sumber: Komnas Perempuan, Oktober 2002.

Laporan trafiking tahun 2000 seperti ditulis Natalis Pigay (www.stoptrafiking.or.id) menunjukkan, di seluruh dunia diperkirakan antara 700.000 hingga 2 juta kaum perempuan dan anak-anak diperdagangkan atau diseludupkan secara ilegal. Dari jumlah tersebut di atas sekitar 200.000 sampai 225.000 orang diantaranya terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara. Walaupun demikian semua angka tersebut sulit dipastikan validitasnya karena praktik penyeludupan manusia dilakukan

secara sangat tersembunyi (*klandestan*) untuk menghindari tuntutan hukum terhadap perilaku kriminal, baik aktor maupun institusi yang secara konvensional maupun terorganisir melakukan berbagai praktik bisnis perdagangan manusia.

Namun, ditilik secara kuantitatif, angka perdagangan dan penyelundupan manusia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data *Bureau of Public Affairs* yang dirilis *US Departement of State* menunjukkan, pada Juni 2003 saja setiap tahun antara 800.000-900.000 manusia diselundupkan atau diperdaganglam dengan mengabaikan batas-batas yuridiksi negara. Penyelundupan perempuan (dan anak) ini sepenuhnya didasari motif bisnis, yakni untuk memenuhi pasokan ke industri seks dan permintaan tenaga buruh migran yang tinggi di pasar internasional. Celaknya, penyeludupan tersebut dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional (*transnational criminality*) yang beroperasi secara rapi.

Setiap tahun, jumlah orang dewasa dan anak-anak yang menjadi korban trafiking terus bertambah. Mustahil untuk mendapatkan angka jumlah korban secara pasti, namun menurut suatu perkiraan yang dikeluarkan sekitar 50.000 orang menjadi korban trafiking setiap tahunnya di Afrika, 75.000 di Eropa Timur, 100.000 di Amerika Latin dan Karibia, serta 375.000 di Asia. Perempuan dan anak-anak dibujuk, dipaksa, dan jual sebagai pekerja seks, buruh bergaji murah, serta dipekerjakan untuk pekerjaan pekerjaan lain yang penuh eksploitasi termasuk pekerjaan rumah tangga, pekerja migran atau sebagai istri pesanan.

Pemaksaan dan kekerasan dalam trafiking ini menyebabkan kaum

perempuan (terutama para gadis muda) dipaksa untuk bekerja di lokasi-lokalisasi sebagai PSK. Kondisi ini menyebabkan pemerintah di berbagai negara di dunia mengambil suatu inisiatif untuk membuat perjanjian guna membasmi tindakan penyeludupan dan perdagangan manusia tersebut. Kerjasama negara-negara yang termasuk dalam wilayah kawasan Asia Selatan sejak tahun 2002 telah menandatangani suatu konvensi pencegahan dan pembasmin terhadap penyeludupan manusia khususnya para kaum wanita dan anak-anak yang terlibat dalam prostitusi. Selain itu Kanada, Amerika Serikat, Rusia, serta sebagian besar negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik telah mengambil inisiatif untuk melakukan ratifikasi konvensi PBB tentang hak hak kaum wanita, anak-anak, dan para migran untuk melawan tindakan penyeludupan manusia.

Definisi konseptual

Studi deskriptif tentang trafiking di Indonesia yang kajiannya tertuang dalam buku ini melandaskan pengertian trafiking menurut definisi Protokol PBB tahun 2000, yakni upaya untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum trafiking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak (suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara). Dalam protokol tersebut trafiking didefinisikan sebagai: “perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”.

PROSES	+	CARA/JALAN	+	TUJUAN
Perekrutan Atau Pengiriman Atau Pemandangan Atau Penampungan Atau Penerimaan	D A N	Ancaman Atau Pemaksaan Atau Penculikan Atau Penipuan Atau Kebohongan Atau Kecurangan Atau Penyalahgunaan Kekuasaan	D A N	Prostitusi Atau Pornografi Atau Kekerasan/ Eksploitasi Seksual Atau Kerja Paksa/ dengan upah yang tidak layak Atau Perbudakan/ Praktek-praktek lain serupa perbudakan

Tabel definisi PBB yang diadaptasi dan dimodifikasi oleh ICMC dan ACILS

Tabel di bawah ini, yang disarikan dari definisi PBB di atas, adalah alat yang berguna untuk menganalisa masing-masing kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam kategori trafiking atau tidak. Agar suatu kejadian dapat dikatakan sebagai trafiking, kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan. Jika satu unsur dari masing-masing ketiga kategori di atas muncul, maka hasilnya adalah trafiking.

Penyebab trafiking

Trafiking merupakan suatu bagian dari dinamika perpindahan penduduk. Dalam hal ini migrasi tenaga kerja pada satu titik bisa berlangsung secara sukarela untuk kepentingan jangka pendek dan dapat dilakukan secara paksa. Perpindahan tenaga kerja baik secara sukarela maupun paksa bukanlah fenomena baru. Misalnya pada jaman kolonisasi, penduduk lokal dipindahkan baik melalui perbudakan, perdagangan karena hutang, ataupun perpindahan yang dilakukan oleh negara dalam hal penjahat kriminal atau pengasingan politik.

Namun ada perbedaan mendasar dengan trafiking yang terjadi pada abad ini, yaitu proses migrasi antarnegara. Dalam arus migrasi ini, terdapat fenomena lain yang muncul

yakni feminisasi migrasi yang didominasi oleh anak gadis dan perempuan. Pekerjaan yang dilakoni oleh gadis-gadis atau perempuan korban penyeludupan manusia bercirikan 3D, yaitu: *dirty*, *no dignity*, dan *dangerous* (kotor, tidak memiliki martabat, dan berbahaya).

Salah satu faktor struktural yang mendasari terjadinya praktik perdagangan manusia adalah ambruknya sistem ekonomi lokal, yang berdampak pada perempuan dan anak-anak untuk mencari pekerjaan ke berbagai negara. Eksodus penduduk miskin ini kian merajalela di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi parah serta negara-negara yang mengalami konflik sosial berkepanjangan. Di samping itu, pekerjaan yang tersedia dalam negeri tidak sesuai dengan pekerjaan pilihan mereka untuk tetap tinggal di kampung halamannya. Dengan kata lain, pekerjaan yang ada tidak memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi para anak gadis itu. Bagi para calon migran sendiri, mereka tidak mengetahui apakah calon tenaga kerja atau para rekruter itu resmi atau gelap. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ada tawaran suatu pekerjaan disuatu negara, dan dengan jumlah tertentu atau dengan kesepakatan tertentu, mereka bisa direkrut untuk pekerjaan itu. Orang-orang seperti ini, baru kemudian menyadari bahwa mereka

telah memasuki negara orang secara gelap. Dan para migran gelap inilah yang posisinya sangat rentan, tanpa perlindungan.

Faktor-faktor pendorong di atas, juga terkait erat dengan diskriminasi jender dalam keluarga dan masyarakat. Banyak anak gadis dan perempuan yang berupaya melarikan diri dari ketidakadilan jender, beban kerja yang terlalu berat di rumah, atau mereka dipaksa kawin oleh orang tua. Di dalam kebanyakan budaya kita di Indonesia, anak gadis dan perempuan kurang mendapat penghargaan tinggi. Dalam situasi krisis, anak gadis dan perempuan yang pertama dikorbankan. Misalnya anak perempuan yang pertama kali akan diberhentikan dari sekolah apabila keluarga mengalami krisis ekonomi atau krisis pangan. Bahkan tidak jarang, orang tua menjual anak gadis mereka untuk bekerja demi meringankan beban ekonomi keluarga.

Argumen lain menyebutkan, trafiking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang, kondisi, dan persoalan yang berbeda, seperti: (1) kurangnya kesadaran. Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan; (2) faktor kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman; (3) keinginan cepat kaya. Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-

orang yang bermigrasi rentan terhadap trafiking.

Faktor budaya juga memberi kontribusi terhadap terjadinya praktik trafiking, seperti: pertama, peran perempuan dalam keluarga. Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka. Kedua, peran anak dalam keluarga. Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

Ketiga, perkawinan dini. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka. Keempat, sejarah pekerjaan karena jeratan hutang. Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

Kelima, Kurangnya pencatatan

kelahiran. Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya. Keenam, kurangnya pendidikan. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Ketujuh, korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran rentan menjadi korban trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.

Bentuk-bentuk trafiking

Terdapat berbagai bentuk yang mendorong munculnya trafiking manusia yang umumnya terjadi pada perempuan dan anak-anak. Beberapa bentuk umum yang kerap ditemui dalam konteks trafiking, antara lain meliputi: pertama, kerja paksa seks dan eksploitasi seks—baik di luar negeri maupun di Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.

Kedua, pembantu rumah tang-

ga (PRT)—baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, seperti: jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak melarikan diri.

Ketiga, bentuk lain dari kerja migran—baik di luar atau di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri *cottage*, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

Keempat, penari, penghibur, dan pertukaran budaya—terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

Kelima, Pengantin pesanan—terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mere-

ka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

Keenam, beberapa bentuk buruh/pekerja anak—terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

Ketujuh, trafiking/penjualan bayi—baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaan yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

Dampak yang ditimbulkan

Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari praktik trafiking, baik dampak psikologis maupun dampak sosial ekonomi bagi korban. Di samping itu sifat pekerjaan yang tersedia baik bagi tenaga kerja migran serta tenaga yang diperdagangkan ini justru mengingkari hak asasi manusia karena pekerjaan yang ada adalah pekerjaan gelap. Majikan berkepentingan untuk menutup-nutupi para pekerja mereka yang gelap karena mereka merasa perlu menyembunyikan sesuatu. Sebagai akibatnya, majikan seringkali mengurung secara fisik para tenaga kerja gelap ini.

Kombinasi antara dua faktor, yaitu faktor penarik (*push*) dan pendorong (*pull*) tersebut yang menciptakan terbentuknya tenaga kerja murah dan berketrampilan rendah, hal ini tidak hanya kita di Indonesia namun dirasakan juga di negara-negara sedang berkembang maupun di negara-negara maju. Kedua, adalah keun-

tungan sosial ekonomi, sekalipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor, namun bila dikaitkan dengan keuntungan dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya.

Sekalipun penyeludupan tersebut dilakukan secara ilegal, tetapi seringkali korban memiliki hubungan kontak dengan sanak saudaranya di kampung halaman sehingga sesekali mengirimkan sedikit uang yang dihasilkannya. Hal ini terlebih terjadi pada orang tua korban yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. Indonesia dalam fenomena Trafiking memiliki letak yang strategis, menjadikan Indonesia sebagai negara penting dalam jalur komunikasi dan transportasi internasional, sekaligus rawan terhadap kejahatan penyeludupan dan perdagangan manusia. Perdagangan tenaga kerja secara ilegal ke sejumlah negara tetangga, bahkan diantara mereka dipaksa berprofesi sebagai pekerja seksual.

Menghapuskan trafiking

Persoalan trafiking sebagai bagian dari praktik perbudakan sekaligus kekerasan terhadap perempuan telah sampai pada titik yang memprihatinkan. Dalam perkembangannya, persoalan ini dikaitkan dengan kegiatan kejahatan terorganisir (*organized crime*), yang membuat negara-negara dunia ketiga menyepakati Protokol PBB untuk Mencegah, Menanggulangi, dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-anak (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The U.N. Convention Against Transnational Organized Crime*) yang ditetapkan oleh Majelis Umum pada tanggal 2 November 2000.

Indonesia saat ini telah meng-

adopsi definisi trafiking berdasarkan protokol tersebut ke dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. Sebagai korban, perspektif hak perempuan dalam kerangka hak asasi manusia dengan demikian terkait, dan paling jelas terlihat dalam Konferensi PBB di Wina tahun 1993 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Pasal 6 undang-undang tersebut menyebutkan: “negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran”. Demikian pula perspektif hak anak tercermin dalam Konvensi Hak Anak yang telah disahkan menjadi Keppres No. 36 Tahun 1990.

Perdagangan (trafiking) sebagai bentuk perbudakan “baru” dengan demikian harus dipandang sebagai praktis pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, dan merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab negara. Namun, jika kita kaji secara kritis, buku ini tidak mempersoalkan problem struktural yang dididap negara terkait ketidakmampuan birokrasi dalam penyelesaian persoalan trafiking. Perspektif konseptual yang dirujuk dan dielaborasi buku ini hanya menyinggung persoalan kulit dari problem akuntabilitas negara terkait isu trafiking, seperti minimnya anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, penegakan hukum yang kurang efektif, dan seterusnya.

Pada sisi lain, sistem ekonomi kapitalistik yang kini menjadi mainstream kebijakan ekonomi negara juga tidak menjadi acuan dalam

meng-analisis persoalan perdagangan manusia. Padahal, kaum perempuan nyata berada di dalam posisi sebagai obyek eksploitasi tiga lapis. Pertama, pada tingkat global sebagai warga masyarakat negara pinggiran, kaum perempuan akan menjadi korban kesenjangan dan ketidakadilan sistem internasional. Kedua, pada tingkat produksi sebagai bagian terbesar lapisan bawah dari sistem stratifikasi kerja industrial, kaum perempuan menjadi korban pertama dari kesenjangan relasi industrial kapitalistik. Ketiga, pada tingkat kemasyarakatan, kaum perempuan juga harus mengalami perlakuan yang tidak adil dari struktur dan ideologi jender yang telah berlangsung berabad-abad. Pengalaman pembangunan yang sedang berlangsung di berbagai belahan dunia yang cenderung menerapkan pembangunan yang bersifat kapitalistik—dengan maksimasi produksi dan profit sebagai logika utamanya—menunjukkan rentannya posisi perempuan untuk dieksploitasi dalam proses industrialisasi dan modernisasi.

Arus globalisasi kapitalisme yang melanda dunia memperlihatkan dengan jelas pesan-pesan yang terkait dengan perempuan cenderung dimanfaatkan guna memperoleh keuntungan (Rahayu, 1996). Faktual, kaum perempuan saat ini tak lebuhi dari obyek/sasaran berbagai produk industri kapitalis.. Di lain pihak, kaum perempuan yang berada pada level sosial-ekonomi tinggi yang memiliki harta melimpah terus dituntut untuk mempertahankan segala kelebihan-nya agar dapat memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Akhirnya, semua kaum perempuan dari berbagai lapisan ber-usaha memperoleh uang-uang sebanyak-banyaknya agar dapat memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Dalam era globalisasi serta ketimpangan jender yang tengah berlangsung *intens* saat ini, perempuan

juga mengalami hal-hal seperti perampokan, perampasan dan pelecehan seksual. Industri hiburan yang menjamur pada dasarnya menjual seksualitas kepada konsumen yang mewakili kepentingan laki-laki, baik dalam bentuk gambar, film, maupun secara langsung dipergunakan untuk melayani kepentingan seks laki-laki. Di sektor industri, buruh-buruh perempuan melayani kepentingan pengusaha besar dengan upah yang rendah atau tenaga kerja wanita melayani orang asing dan devisa negara. Fenomena-fenomena di tersebut memperlihatkan bagaimana perempuan dieksploitasi untuk memenuhi norma-norma kapitalistik. Ketrampilan atau peningkatan wawasan seperti banyak dilakukan oleh organisasi perempuan belum banyak mengubah posisi perempuan.

Terkait peran dan tanggung jawab negara dalam konteks trafiking, beberapa hal berikut nampaknya penting sebagai bahan refleksi ke depan. Pertama, negara perlu mengambil langkah-langkah strategis dan program kerja yang komprehensif guna menghadapi persoalan perdagangan manusia yang semakin kompleks. Pembuatan undang-undang, perda, Rencana Aksi Nasional tentang penghapusan trafiking perempuan dan anak bisa jadi sesuatu yang bermanfaat selama subsidi atau materi produk hukum tersebut dibuat berlandaskan hak asasi manusia dan kepentingan korban. Selain itu, para penegak hukum perlu memiliki pemahaman dan penguasaan yang komprehensif terkait persoalan trafiking.

Kedua, penghapusan trafiking perempuan dan anak harus menyentuh dan membongkar akar-persoalan, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang mahal dan sulit diakses mayoritas warga bangsa yang miskin, kebijakan negara dan pembangunan yang bias jender,

serta menguatnya bias-bias patriarki dalam masyarakat yang mensubordinasikan perempuan dan anak sebagai "milik" (property). Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang telah ditandatangani Indonesia, menegaskan hal ini. Oleh karena itu, penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas kebijakan negara.

Ketiga, perlu dipikirkan penataan kelembagaan yang lintas sektoral dalam mencegah dan menghapuskan trafiking, terutama kaburnya batas-batas kewenangan yang bersifat sistematis antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan dan berbagai instansi terkait lainnya. Jika problem kewenangan dan koordinasi antarinstansi ini tidak cepat ditangani, situasi ini hanya akan mengentalkan kaburnya agenda penanganan perempuan sebagai agenda penting negara yang bersifat lintas sektoral, kompleks, dan rumit.

Keempat, menegaskan tanggung jawab negara (pemerintah). Pengakuan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, termasuk dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dari sini kita dapat mengukur seberapa besar komitmen pemerintahan (Megawati) untuk menegakkan hak asasi konstituen perempuan, termasuk perempuan korban tindak kekerasan (baik kekerasan domestik, masyarakat, maupun bentuk-bentuk kekerasan yang direproduksi negara).

Kelima, *positioning* Komnas Perempuan. Sebagai sebuah lembaga yang berdiri berlandaskan Keppres No.181 Tahun 1998, Komnas Perempuan merupakan mekanisme nasional untuk penegakan HAM perempuan Indonesia. Sejauh manakah efektivitas peran ini dirasakan oleh perempuan

akar rumput? Se jauh mana pula posisi Komnas Perempuan dalam intervensinya terhadap pemerintah dan masyarakat? Setelah mendesak tidak berhasil, lalu apa? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab agar keberadaan Komnas Perempuan ti-

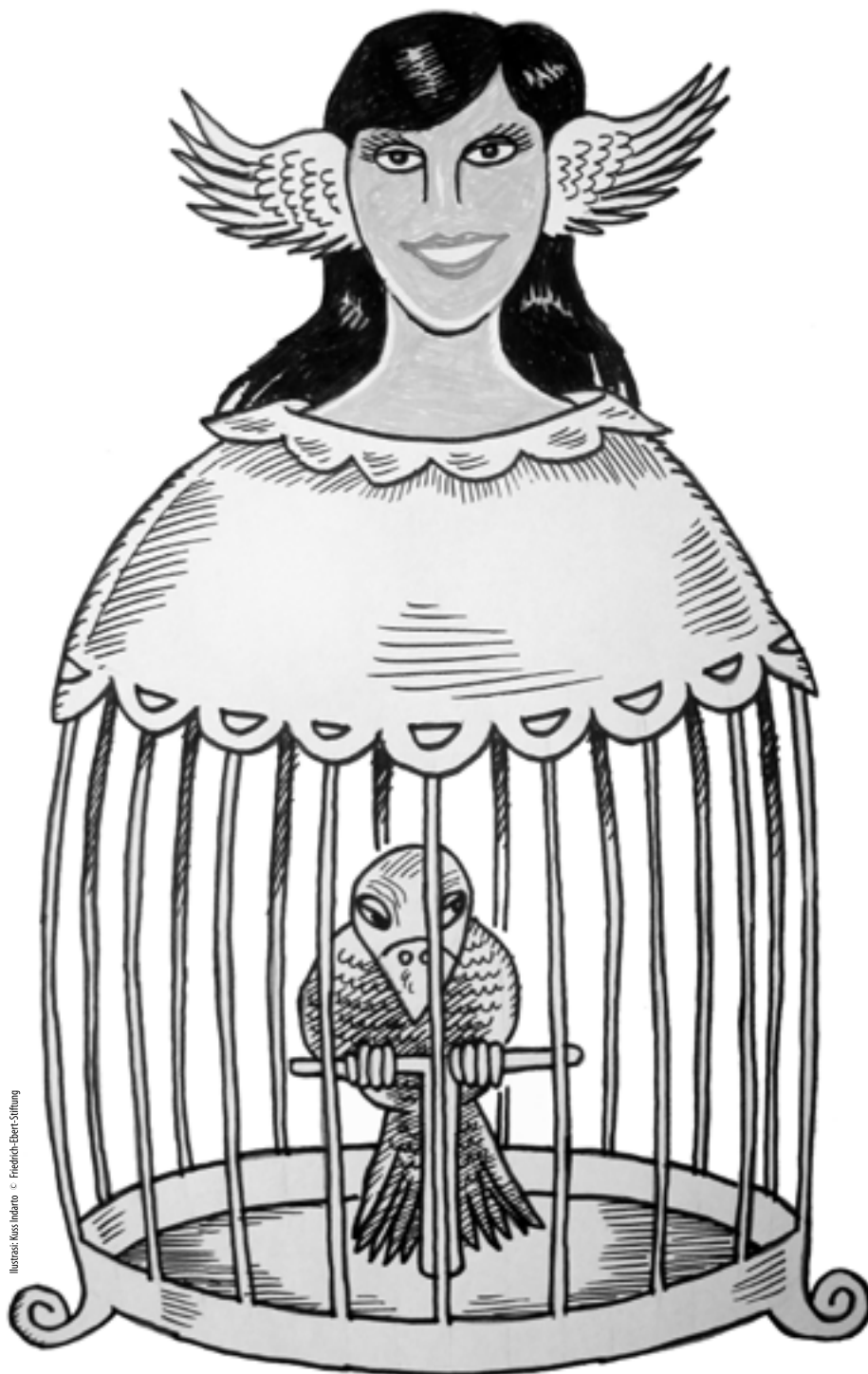
tidak sekedar menjadi komisi nasional tanpa kewenangan dan solusi terkait hak-hak mendasar perempuan.

Keenam, terkait positioning politik konstituen perempuan dan para aktivis gerakan perempuan, dalam membaca peta Pemilu 2009? Apakah

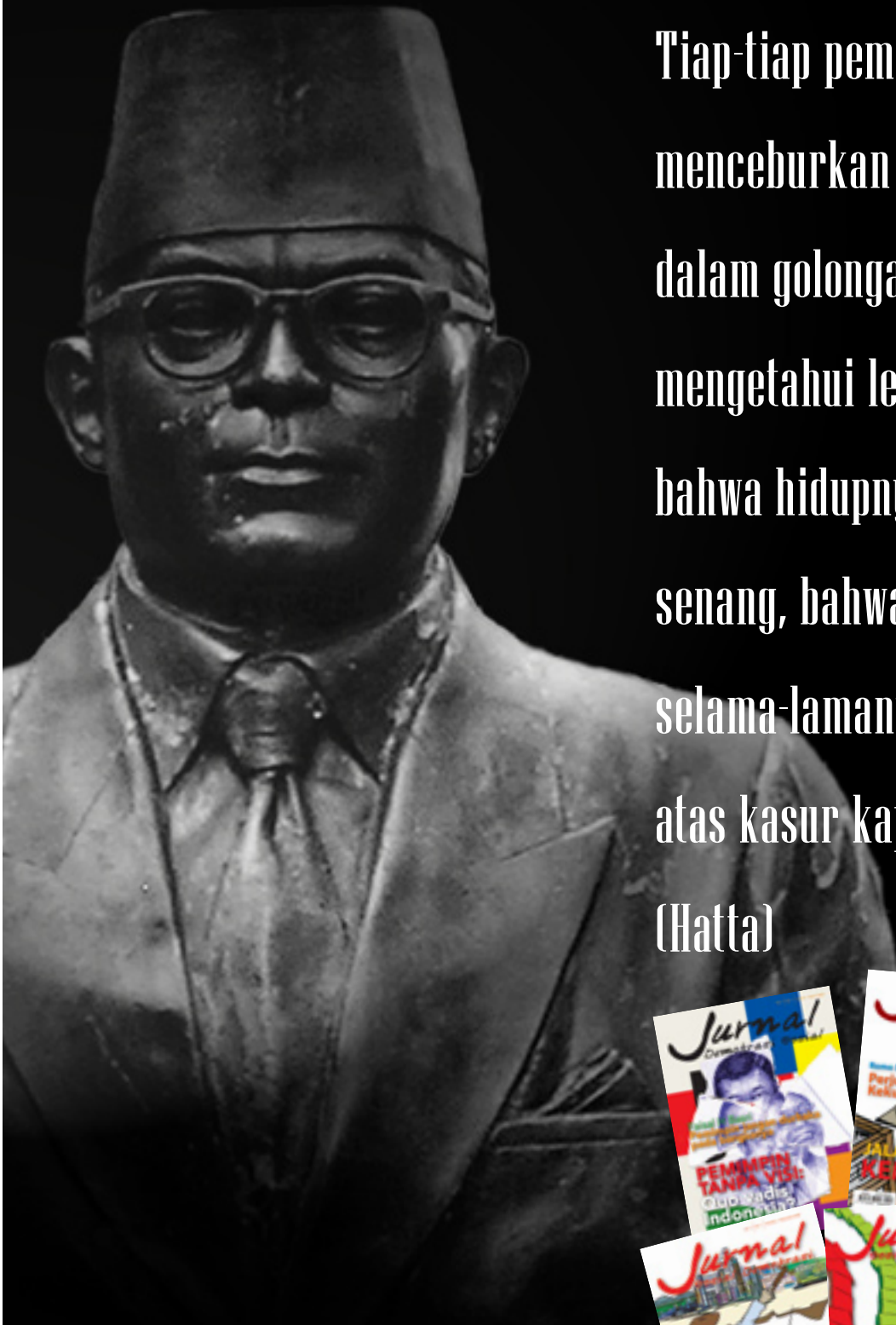
partai-partai politik hasil Pemilu 2009 yang dipastikan masuk ke parlemen 2009-2014 memiliki agenda yang jelas dan konkret guna mewujudkan terciptanya tata nilai kehidupan politik yang berkeadilan jender di negeri ini? Apakah ketiga pasangan capres-cawapres (SBY-Boediono, Jusuf Kalla-Wiranto, dan Megawati-Prabowo) memasukan isu-isu krusial perempuan (terutama terkait representasi politik perempuan) sebagai bagian integral dari visi, misi, platform yang akan menjadi agenda utama kebijakan pemerintahannya kelak?

Pilihan politik perempuan jelas terkait dengan agenda perbaikan struktural menyangkut eksistensi, posisi, peran, dan fungsi perempuan dalam konteks kebijakan negara. Sebab, tanpa dukungan negara dan tanpa desakan yang kuat dan solid dari seluruh elemen perjuangan perempuan terhadap negara, maka upaya-upaya konkret guna mengangkat harkat dan derajat perempuan dari eksploitasi sistem kapitalisme (neoliberalisme), hegemoni negara, dan kungkungan nilai-nilai patriarki (baca: domestifikasi perempuan yang dilegitimasi nilai-nilai budaya dan klaim ajaran agama yang hingga kini masih menjadi tata nilai dominan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat negeri ini) hanya akan menjadi slogan tak bermakna.

L a u n a, adalah Redaktur Pelaksana Jurnal Sosial Demokrasi dan Project Officer pada Asian Labor Network on IFI's (ALNI) Indonesia.



Tiap-tiap pemimpin yang menceburkan dirinya ke dalam golongan rakyat telah mengetahui lebih dahulu, bahwa hidupnya tidak akan senang, bahwa ia tidak selama-lamanya akan tidur di atas kasur kapas yang enak.
(Hatta)



Jurnal
Sosial Demokrasi





Bila kita hendak mengentaskan kemiskinan, kita harus berikan kekuasaan, pengetahuan, tanah, kredit dan organisasi ke tangan si miskin.

